



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**STRATEGI KEBIJAKAN INDONESIA MENGHADAPI  
*ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA*  
DALAM PERDAGANGAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL  
( 2005-2011 )**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains pada Program Studi Hubungan Internasional**

**NI PUTU RATIH PRATIWI**

**1006797143**


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
JAKARTA  
JULI 2012**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Ni Putu Ratih Pratiwi

NPM : 1006797143

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Juli 2012

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Ni Putu Ratih Pratiwi  
NPM : 1006797143  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional  
Judul Tesis : Strategi Kebijakan Indonesia Menghadapi ACFTA  
dalam Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil  
Periode 2005-2011

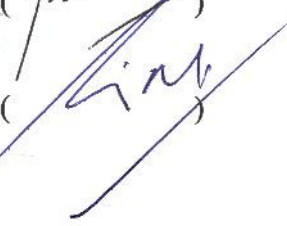
**Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia**

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang : Dr. Drs. Fredy B.L Tobing M.si. (  )

Sekretaris : Asra Virgianita, MA (  )

Pembimbing : Syamsul Hadi, Ph.D (  )

Penguji Ahli : Makmur Keliat, Ph.D (  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 2 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

*ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) merupakan blok perdagangan antara ASEAN dan China yang disepakati dilaksanakan pada 1 Januari 2010 bagi ASEAN-6 termasuk Indonesia. China sebagai negara *emerging market* yang terus mengalami pertumbuhan dalam ekonomi dan sangat kuat dalam perdagangan karena kuatnya daya saing dan dukungan pemerintah terhadap industri sehingga produknya menjadi murah dan mampu memaksimalkan setiap kerjasama antar negara yang diterapkannya dalam penetrasi pasar. Hal ini menjadi tantangan Indonesia, dimana kondisi industri belum siap akan serbuan produk murah China dan peran negara lah menjadi penting dalam memformulasikan strategi dan kebijakan agar mampu memaksimalkan tujuan perdagangan bebas.

Puji Syukur yang tak terkira dalamnya saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih karunia-Nya yang besar saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Syamsul Hadi, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan memberikan inspirasi saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Dr. Drs. Fredy B.L. Tobing, M.Si selaku ketua sidang tesis dan *mbak* Asra Virgianita, S.Sos, M.A., selaku sekretaris sidang yang telah bersedia memberikan masukan, saran dan pengetahuan untuk membantu saya memperbaiki kualitas tesis ini.
- (3) Makmur Keliat, Ph.D selaku penguji ahli yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan dan berbagi pengetahuan dalam merampungkan tesis ini.
- (4) Ketua Departemen HI dan Ketua Program Pasca Sarjana HI serta segenap pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan FISIP UI yang

telah memberikan bimbingan dan pengetahuan selama menjalani masa studi di Universitas Indonesia

- (5) Mbak Ice dan Pak Udin, selaku staf di Program Pasca Sarjana HI yang selalu setia melayani dan membantu segala permintaan selama menjalani masa studi saya di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UI.
- (6) Orang tua tercinta, I Made Mendra dan A.A Sayu Raka Arifini yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan dan semangat dalam melaksanakan pendidikan di Universitas Indonesia dan dalam menyusun tesis ini.
- (7) Adik-adik saya tercinta, Agus, Ayu dan Arya, yang selalu siap menjadi penyemangat di saat jatuh bangun dalam menjalankan dua tahun masa studi di Universitas Indonesia.
- (8) Teman terdekat, Yos Kriyanatha yang telah memberikan waktu dan bersabar menerima keluh kesah saat-saat patah semangat dan terus memberikan dukungan dan semangat hingga mampu menyelesaikan tugas akhir.
- (9) Teman-teman Pasca Sarjana Hubungan Internasional UI 2010, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas persahabatan, dan keakraban yang saya terima selama menjalankan masa studi.

Akhir kata, saya hanya dapat mengucapkan terima kasih dan semoga Tuhan yang membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyusun tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Jakarta, 10 Juli 2012

Ni Putu Ratih Pratiwi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ni Putu Ratih Pratiwi  
NPM : 1006797143  
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional  
Departemen : Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Strategi kebijakan Indonesia Menghadapi ASEAN-China Free Trade Area dalam Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil Periode 2005-2011.**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Juli 2012

Yang menyatakan



(Ni Putu Ratih Pratiwi)

**ABSTRAK**

Nama : Ni Putu Ratih Pratiwi  
Program : Hubungan Internasional  
Judul : Strategi Kebijakan Indonesia Menghadapi *ASEAN-China Free Trade Area* dalam Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil Periode 2010-2011

Tesis ini membahas strategi kebijakan Indonesia terkait dengan implementasi ACFTA yang dimulai 1 Januari 2010 dan dampak perdagangan bebas tersebut terhadap perdagangan Tekstil dan produk Tekstil (TPT) Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Kesiapan pemerintah menjadi fokus dalam penelitian ini terkait dengan strategi kebijakan yang telah dirumuskan. Penelitian memperlihatkan Indonesia belum siap khususnya industri termasuk ITPT yang masih terkendala kebijakan yang bersifat ekonomi biaya tinggi. Sehingga belum mampu meningkatkan daya saing berkompetisi dengan produk China yang murah. Dengan keunggulan komparatif tenaga murah yang dimiliki Indonesia dan China membuat pemerintah Indonesia merumuskan strategi kebijakan baik *trade strategic* maupun *industrial policy* yang mampu meningkatkan daya saing industri TPT dan tidak hanya sekedar kebijakan namun minim implementasi.

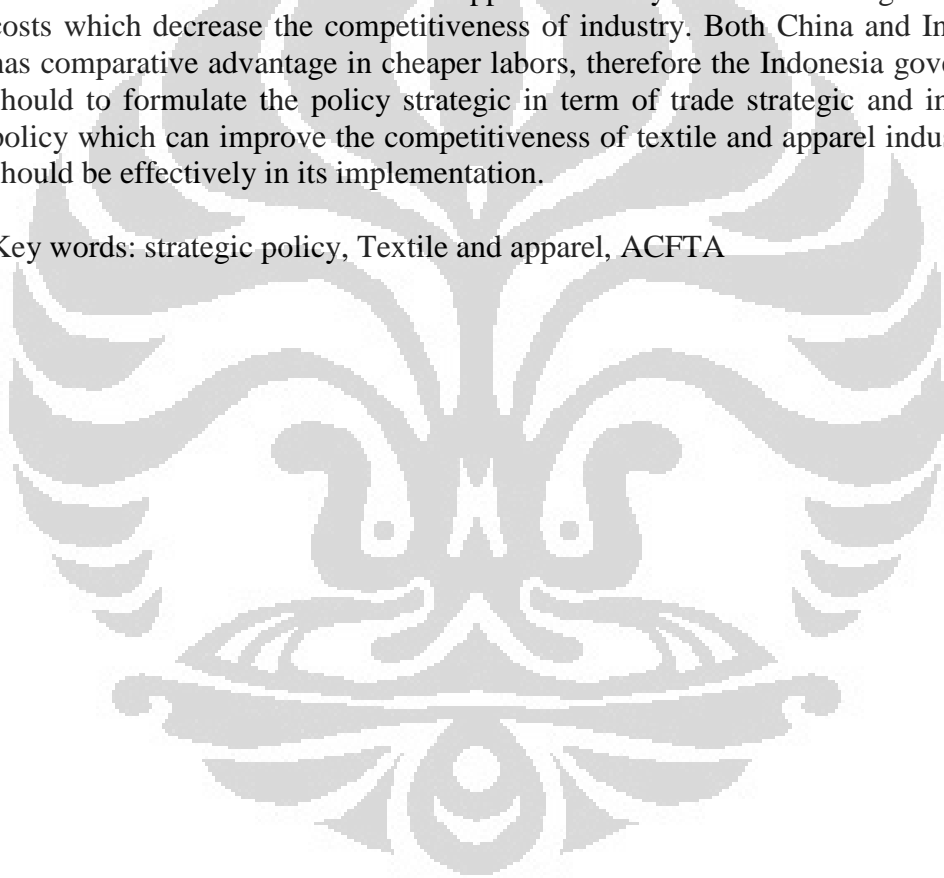
Kata kunci: strategi kebijakan, TPT, ACFTA

## ABSTRACT

Name : Ni Putu Ratih Pratiwi  
Program : International Relations  
Title : The Indonesia's Policy Strategic in facing ASEAN-China Free Trade Area toward the Textile and Apparel Industry 2010-2011

The focus of this study is the readiness of Indonesia government in facing ASEAN-China FTA by analyzing the policy strategic and the implication of that free trade to the Indonesia's Textile and Apparel trade. This research was done by qualitatively in descriptive design. The research shows that Indonesia was not ready yet especially the competitiveness of industry to compete the cheaper products of China. The textile and apparel industry still face the high economic costs which decrease the competitiveness of industry. Both China and Indonesia has comparative advantage in cheaper labors, therefore the Indonesia government should to formulate the policy strategic in term of trade strategic and industrial policy which can improve the competitiveness of textile and apparel industry and should be effectively in its implementation.

Key words: strategic policy, Textile and apparel, ACFTA

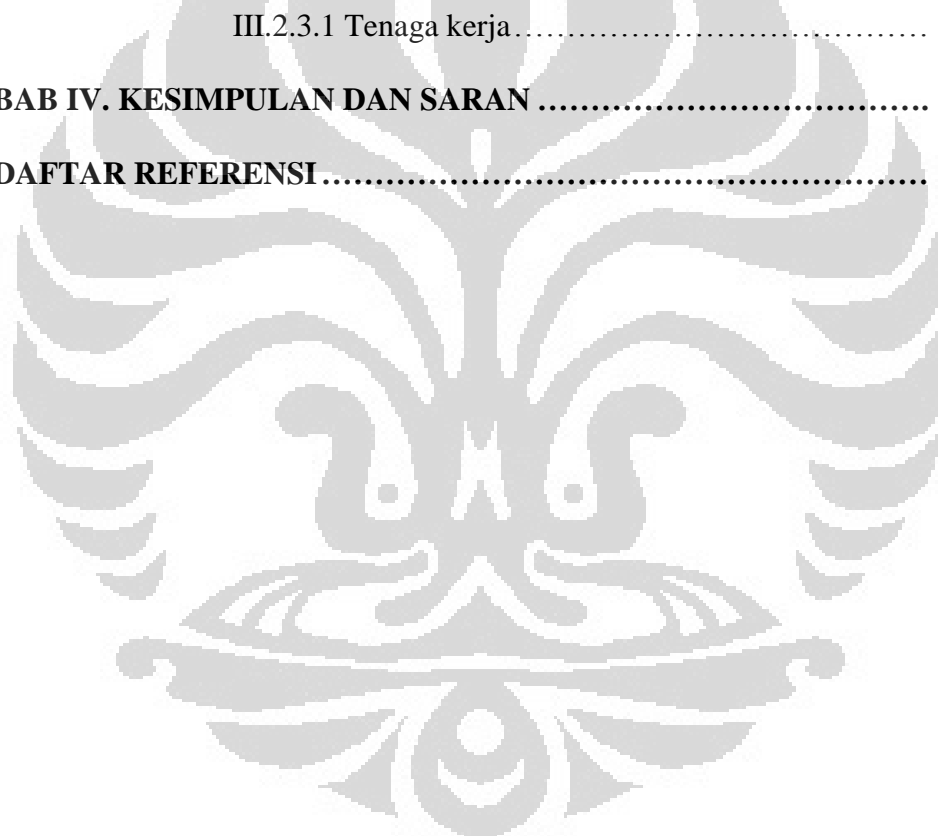




## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	4
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
I.3.1 Tujuan Penelitian .....	4
I.3.2 Manfaat Penelitian .....	5
I.4 Tinjauan Pustaka .....	5
I.5 Kerangka Pemikiran.....	16
I.5.1 Perdagangan Bebas, Keunggulan Komparatif, <i>Relative Gains</i> .....	16
I.5.2 <i>Neo-mercantilism, trade strategic, industrial policy</i> ....	21
I.6 Asumsi .....	24
I.7 Model Analisa .....	25
I.8 Metode Penelitian .....	25
I.9 Sistematika Penelitian .....	25
<b>BAB II. KESEPAKATAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA DAN KESIAPAN INDONESIA .....</b>	<b>27</b>
II.1 Dinamika Hubungan Ekonomi Indonesia-China Sebelum Kesepakatan ACFTA .....	27
II.2 Dinamika hubungan ekonomi ASEAN-China dan Proses Kepakatan ACFTA .....	38
II.2.1 Proses Terbentuknya ACFTA.....	44
II.2.1.1 Tahapan penurunan dan penghapusan tarif .....	48
II.3 Kesiapan Indonesia Menghadapi ACFTA .....	51
II.3.1 Industri Tekstil dan Produk tekstil Indonesia .....	61
II.4 Perbandingan Kesiapan Thailand menghadapi ACFTA .....	67
II.4.1 Hubungan Ekonomi Thailand-China.....	67
II.4.2 Strategi Kebijakan Pemerintah Thailand menghadapi FTA .....	69
<b>BAB III. STRATEGI KEBIJAKAN DAN DAMPAK ACFTA DALAM PERDAGANGAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL INDONESIA PERIODE 2005-2011 .....</b>	<b>73</b>

III.1 Strategi Kebijakan Indonesia Menghadapi ACFTA dalam Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil .....	72
III.1.1 Pengamanan Pasar Domestik .....	74
III.1.1.1 Penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI)	74
III.1.1.2 Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri ..	79
III.1.2 Peningkatan daya saing industri .....	83
III.1.2.1 Restrukturisasi permesinan .....	84
III.1.2.2 Infrastruktur .....	87
III.1.2.3 Distribusi energi dan Listrik .....	90
III.1.3 Penguatan Ekspor .....	94
III.2 Dampak ASEAN-China FTA terhadap Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia .....	95
III.2.1 Neraca Perdagangan TPT Indonesia ke China .....	98
III.2.2 Banjir produk China di pasar nasional .....	106
III.2.3 Industri nasional .....	112
III.2.3.1 Tenaga kerja .....	115
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>119</b>
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>123</b>



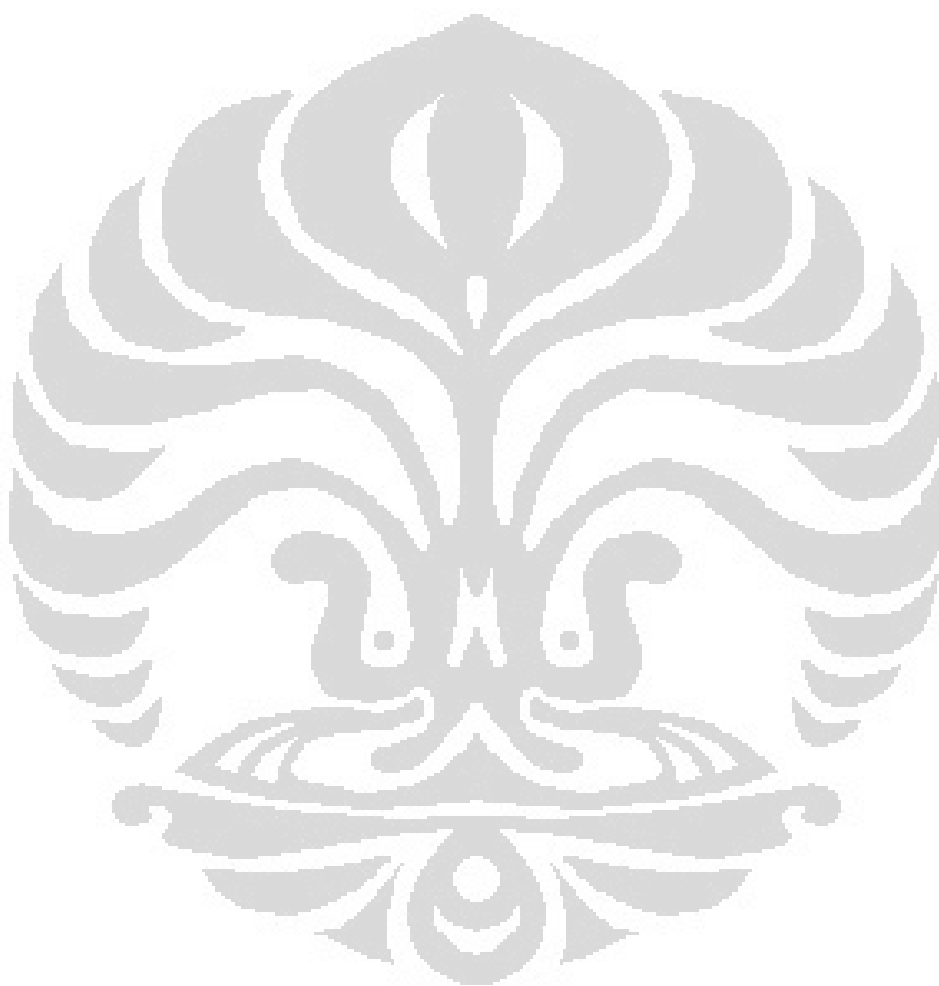
## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ekspo-Import Indonesia ke China 2000-2006.....	33
Tabel 2.2	Sektor yang Meningkat dalam Ekspor ASEAN-China 2000.....	42
Tabel 2.3	China dan ASEAN-5 Top 5 ekspor .....	43
Tabel 2.4	Timeline pembentukan ACFTA .....	46
Tabel 2.5	Jadwal Penurunan Tarif EHP .....	49
Tabel 2.6	Penurunan Tarif Normal Track .....	50
Tabel 2.7	Neraca Perdagangan Indonesia-China 2004-2009 .....	59
Tabel 2.8	Perdagangan Thailand-China 2006-2008 .....	68
Tabel 2.9	Ekspor Thailand ke China 2006-2008 .....	69
Tabel 3.1	Standar Nasional Indonesia (SNI) pada 20 Sektor Industri ....	76
Tabel 3.2	Ekspor Import China-Indonesia 2010 pada 20 Sektor Industri..	100
Tabel 3.3	Tarif Indonesia di ACFTA turun ke tingkat yang rendah pada tahun 2010 .....	106



**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 2.1	ASEAN-CHINA TRADE, 1991-2000 .....	40
Grafik 3.1	Share Impor Total Indonesia dari RRT vs Dunia Terhadap 6 sektor .....	102



# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Kesepakatan *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) merupakan kesepakatan perdagangan bebas regional antara ASEAN dan China yang ditandatangani pada tahun 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Perjanjian ACFTA dalam perdagangan barang, yang berlaku pada 20 Juli 2005, menghasilkan penurunan tarif impor secara bertahap yang berlaku timbal-balik di antara negara-negara yang bersepakat. Pada 1 Januari 2010, pelaksanaan ACFTA yang hampir sempurna dilaksanakan oleh ekonomi negara-negara ASEAN-6, termasuk Indonesia dan China, dengan penerapan tarif nol kepada 90 persen produk-produk atas hampir seluruh jajaran tarif. Kemudian, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam akan mencapai tujuan yang sama pada tahun 2015. Hal ini merupakan representasi liberalisasi perdagangan yang dilakukan ASEAN dan China yang tidak terlepas dari globalisasi ekonomi yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu proses dimana semakin banyak negara yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi global.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN yang menandatangani kesepakatan ACFTA tentunya berkaitan dengan tujuan Indonesia untuk mendapatkan *gains from trade* yang statis maupun dinamis yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui surplus neraca perdagangan. Bagi Indonesia setidaknya ada tiga peluang positif yang dikemukakan pemerintah pada saat perjanjian ACFTA ditandatangani pertama kali tahun 2001 pada era Presiden Megawati, yaitu: (1) penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan nontarif oleh China akan membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor ke negara berpenduduk terbesar di dunia. (2) Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan terbuka, membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari China. (3) peningkatan kerjasama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas, membantu Indonesia meningkatkan kapasitas baik

---

<sup>1</sup> Tulus Tambunan, *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 1.

dalam teknologi maupun manajerial.<sup>2</sup> Liberalisasi perdagangan berhubungan dengan pembukaan akses pasar produk ekspor Indonesia ke dunia. Namun, perlu dicatat bahwa terbukanya akses pasar dunia berlaku juga sebaliknya, dalam arti bahwa pasar domestik Indonesia juga terbuka bagi produk impor negara lain. Hal inilah yang perlu diwaspadai oleh pemerintah agar impor tidak melebihi ekspor sebagai salah satu tantangan yang dihadapi dalam perdagangan bebas.

Dengan peluang yang ada, tetap ada indikasi yang cukup kuat bahwa pemerintah tidak mempersiapkan kondisi ekonomi nasional secara optimal untuk meraih peluang positif dari pemberlakuan ACFTA. Hal ini tercermin dari ketidakmampuan pemerintah dalam mendorong peningkatan daya saing sektor industri manufaktur yang sebenarnya merupakan prasyarat utama untuk meraih manfaat dari pemberlakuan ACFTA. Buruknya kualitas infrastruktur, tingginya suku bunga dan modal kerja, rantai birokrasi yang panjang serta banyaknya pungutan liar merupakan cerminan kegagalan pemerintah menciptakan prasyarat dasar untuk mendorong peningkatan daya saing beragam sektor ekonomi termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

Ketika menyongsong liberalisasi penuh per 1 Januari 2010, banyak kalangan industri yang khawatir Indonesia akan diserbu produk impor China yang akan mengambil pasar domestik serta keterbatasan ekspor Indonesia karena persaingan harga termasuk Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Kekhawatiran ini cukup beralasan karena harga produk China yang murah membuat produk lokal terancam terlebih kekhawatiran pelaku industri menjadi pedagang ataupun importir. Sesuai yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Kadin Surakarta bidang Industri dan Investasi, Liliek Setiawan menyatakan bahwa sekitar 30 persen pelaku industri tekstil beralih menjadi pedagang, karena sulitnya persaingan industri tekstil.<sup>3</sup> Hal ini tentu menampar industri TPT dimana produksi yang bertujuan ekspor harus berubah menjadi pedagang yang menjual produk-produk impor China. Dari adanya produk murah China, konsumen Indonesia memang

---

<sup>2</sup> Latif Adam dan Siwage Dharma Negara, "ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT: Tantangan dan Peluang Bagi Indonesia," *Masyarakat Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 2010, Vol. xxxvi No. 2, h. 3.

<sup>3</sup> Yaseer Arafat, "Tekstil Cina Gempur Pasar, Tekstil Indonesia terpuruk." Diakses dari: <http://harianjoglosemar.com/berita/tekstil-China-gempur-pasar-tekstil-indonesia-terpuruk-42218.html>. diakses pada 18 November 2011, pukul 20.05 WIB.

diuntungkan dengan harga murah namun produk Indonesia menjadi langka serta industri yang menyerap banyak tenaga kerja akan memilih gulung tikar. Hal ini tentu menjadi tantangan dibalik kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China tersebut. Tekstil dan produk tekstil juga diproduksi oleh UKM (Usaha Kecil Menengah) sehingga tidak hanya industri TPT yang terkena dampaknya namun UKM dalam sektor ini pun terkena dampak ACFTA. Walaupun berskala kecil, UKM tidak bisa dipandang sebelah mata dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional. Hal ini sesuai yang disampaikan Stiglitz bahwa industri kecil menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.<sup>4</sup>

Tekstil sebagai salah satu sektor strategis Indonesia mendapat tantangan berat akan tekstil dan produk tekstil China. Kualitas Produk Indonesia sebenarnya jauh lebih berkualitas namun pasar lebih memilih dari segi harga dimana harga murah produk impor menjadi keuntungan bagi masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari, namun kalangan industri menengah dan kecil menjerit karena pasaran harga menjadi rendah padahal biaya produksi besar. Sektor industri tekstil dan produk tekstil menyerap banyak tenaga kerja sehingga keberlangsungan sektor ini harus tetap dipertahankan. Disinilah peran pemerintah untuk membuat kebijakan yang mampu secara internal maupun eksternal mengangkat sektor tekstil dan produk tekstil ditambah salah satu aset nasional batik pun kini terancam produksinya karena produk batik China. Jika peluang menghasilkan pendapatan tidak ada karena gulung tikar akibat kalah bersaing bagaimana masyarakat dapat membiayai kebutuhan walaupun harga murah.

Tantangan domestik dan regional dihadapi oleh hampir seluruh sektor menghadapi serbuan barang-barang China baik impor dalam negeri maupun persaingan ekspor ke negara-negara ASEAN. Kendala eksternal tentunya menghadapi kompetisi daya saing produksi lokal dan barang China sementara dari domestik sendiri peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi kendala internal seperti modal, teknologi, informasi dan sebagainya yang menghambat daya saing UKM dan industri tekstil dan produk tekstil. Dengan demikian pemerintah harus terus mengkaji dan merumuskan strategi kebijakan-kebijakan yang mengoptimalkan perdagangan ekspor Indonesia serta meredam impor

---

<sup>4</sup> Joseph Stiglitz, *Making Globalization Work: The Next Step to Global Justice*, (England: Allen Lane Penguin Group, 2006), h. 192.

berlebihan yang merugikan industri dalam negeri seperti tekstil dan produk tekstil yang merupakan juga industri padat karya dalam skema ACFTA ini.

## **I.2 Rumusan Masalah**

1 Januari 2010, bagi para pelaku perdagangan di tanah air, merupakan kondisi pembuktian atas kekhawatiran banyak pihak menyusul pemberlakuan penuh ACFTA (*ASEAN-China Free Trade Area*) kesepakatan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan lima negara pemrakarsa ASEAN lainnya (Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei, dan Thailand) dengan China. Melalui kesepakatan perjanjian ini, diterapkan berbagai persyaratan mencakup penghapusan tarif serta dicabutnya aturan-aturan yang membatasi perdagangan di antara pihak-pihak yang bersepakat. Berbagai reaksi pro dan kontra muncul menanggapi keberlangsungan ACFTA ini termasuk di dalam negeri. Sebagian memandang ini sebagai sebuah harapan untuk meningkatnya iklim perdagangan dan investasi di Indonesia. Namun tak kalah banyak pihak yang menganggap ini sebagai tantangan atau bahkan titik balik untuk mematikan peluang. Semua tentu bergantung pada jenis, karakter serta keunggulan komparatif masing-masing produk, usaha, dan jasa. Bagi Indonesia, ACFTA menjadi kekhawatiran bagi kalangan industri dan UKM terutama sektor tekstil dan produk tekstil melihat skema liberalisasi penuh China-ASEAN mulai 1 Januari 2010. ACFTA telah berjalan secara bertahap dari tahun 2005 untuk perdagangan barang sehingga Indonesia tentunya sudah harus lebih siap hingga implementasi penuh tahun 2010 tersebut. Dengan perumusan masalah di atas, pertanyaan yang diajukan adalah:

1. Bagaimana strategi kebijakan Indonesia menghadapi ACFTA dalam sektor tekstil dan produk tekstil periode 2005-2011?
2. Bagaimana dampak kesepakatan ACFTA terhadap perdagangan tekstil dan produk tekstil Indonesia periode 2005-2011?

## **I.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **I.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:



1. Mendeskripsikan strategi kebijakan Indonesia serta implementasinya dalam menghadapi ACFTA khususnya dalam sektor tekstil dan produk tekstil periode 2005-2011.
2. Mendeskripsikan dampak ACFTA dalam perdagangan tekstil dan produk tekstil.

### **I.3.2 Manfaat Penelitian**

Merujuk pada tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu:

Memberikan gambaran kesiapan Indonesia melalui strategi kebijakan yang diterapkan dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN-China. sebagaimana Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN yang menghadapi tantangan China merupakan aktor penting dalam mengatur strategi kebijakan disaat industri nasional belum siap menghadapi tantangan daya saing produk China. Sebagai negara yang ingin menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya, Indonesia memegang kepentingan nasional yang ingin dicapai dalam perdagangan bebas ACFTA agar dapat memanfaatkan keuntungan dari pada perdagangan bebas tersebut yang dituangkan dalam strategi kebijakan dengan melihat pra dan pasca implementasi liberalisasi penuh ACFTA, khususnya pada Tekstil dan Produk Tekstil. Dengan melihat dampak perjanjian kesepakatan ASEAN-China terhadap TPT Indonesia sebagai salah satu indikator efektifitas strategi kebijakan Indonesia yang dapat digunakan untuk rujukan perbaikan dan rekomendasi strategi kebijakan yang lebih baik dan efektif.

### **I.4 Tinjauan Pustaka**

Tulisan-tulisan maupun penelitian-penelitian yang membahas mengenai ACFTA ini jumlahnya sangat banyak. Ini mengingat bahwa perjalanan ACFTA tersebut (mulai dari lahirnya pemikiran untuk membentuk kesepakatan ACFTA tersebut sampai keberadaanya saat ini) telah lebih dari 10 tahun. Selama itu muncul berbagai pemikiran dan hasil penelitian dari para ahli dan peneliti baik yang khusus berbicara mengenai ACFTA saja, maupun yang dikaitkan dengan

pengaruhnya terhadap Indonesia. Berikut akan dibahas beberapa tulisan yang dirasa memiliki arti penting bagi penelitian ini, khususnya dalam menjelaskan posisi yang ingin diambil penulis dalam penelitian ini.

China-ASEAN FTA menurut **Shen Danyang** dalam “ASEAN-China FTA: Opportunities, Modalities and Prospects,”<sup>5</sup> merupakan suatu perjanjian yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN hal ini dipicu oleh internal ekonomi China. Pengamat ASEAN melihat China bukan saja sebagai lokomotif untuk pertumbuhan ekonomi regional tetapi juga sebagai lokomotif baru bagi perekonomian dunia, sebagai negara maju yang terus melakukan ekspansi mencari sumber-sumber baru untuk pertumbuhan ekonominya.

Dalam buku ini melihat pertumbuhan perdagangan China-ASEAN cukup cepat dimana 1990-2003 telah mencapai 20,8 persen. Struktur dalam perdagangan pun semakin ditingkatkan dimana ekspor 5 terbesar ASEAN terbesar adalah minyak, kayu, minyak sayur, komputer atau *machinery* serta peralatan listrik. Sedangkan import ASEAN meliputi peralatan listrik, komputer atau *machinery*, kapas, bahan bakar serta tembakau. Melihat pertumbuhan dari tahun 1990 manufaktur merupakan sektor yang mengalami peningkatan yang signifikan.

Para pemimpin ASEAN dan China melihat pertumbuhan posisi ASEAN dalam pasar China terus meningkat dari tahun 1991-2003 meningkat 7,1 persen. Posisi ASEAN merupakan partner dagang kelima terbesar China sedangkan China merupakan ekspor keenam terbesar ASEAN begitupula impor dari China merupakan sumber impor keenam terbesar. Dengan melihat skema *the Framework Agreement on ASEAN-China Economic Corporation*, dimulai dengan skema *Early harvest Programme* pada tahun 2004, menurut penulis, keuntungan signifikan terlihat terbukti dari skema awal penerapan ACFTA ini. Prediksi penulis, Ekspor China akan meningkat ke ASEAN dalam komoditi “early harvest” hingga US\$ 784-946 juta dan begitu pula impor China dari ASEAN yang meningkat hingga US\$ 838-1,017 juta sehingga China mengalami defisit perdagangan.

Pada tahun 2004, awal diberlakukannya EHP, China impor dari ASEAN mencapai US\$ 744 juta atau meningkat 16,1% dari tahun 2003. Hal ini tentunya

---

<sup>5</sup> Shen Danyang, “ASEAN-China FTA: Opportunities, Modalities and Prospect.” Dalam: *ASEAN-China Relations: Realities and Prospects*, (Singapore: ISEAS Publications, 2005).

karena penurunan tarif produk pertanian dari ASEAN ke China. Perjanjian FTA ini tidak hanya meningkatkan perdagangan ASEAN dan China tetapi juga mengurangi *over-dependence* ekspor pada negara maju. Namun hal tersebut susah terjadi melihat masih banyak negara ASEAN yang tergantung pada AS, Jepang dan Eropa sebagai pasar ekspor.

Dengan masuknya China ke WTO dan terbentuknya ACFTA akan membuat pasar China lebih terbuka sehingga ASEAN dapat mengurangi ketergantungan pada negara maju. Melihat faktor tersebut akan meningkatkan pertumbuhan perdagangan antara ASEAN dan China sehingga dalam konteks ekonomi global, dimana Jepang mengalami resesi tentu China dan ASEAN akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan.

Literatur pertama melihat prospek yang baik bagi ASEAN dalam ACFTA, begitupula dalam skema pertama yaitu EHP yang memberikan surplus atau peningkatan perdagangan terutama dalam pertanian. Perbedaan pandangan mengenai skema EHP serta prediksi ACFTA diungkapkan oleh **Daniel Pambudi** dan **Alexander C Chandra** dalam buku *Garuda Terbelit Naga: Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China terhadap Perekonomian Indonesia*.<sup>6</sup> Buku ini membahas dampak ekonomis dari pelaksanaan kesepakatan ACFTA yang dimulai dengan fase *Early Harvest Programme* yang telah berlangsung sejak 2004 terhadap perekonomian Indonesia. buku ini menjadi sebuah gambaran dari pelaksanaan awal ACFTA sebelum liberalisasi penuh per 1 Januari 2010. Penulis menggambarkan masalah yang fundamental yang dihadapi Indonesia adalah kurang terwakilinya kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan perdagangan bebas ACFTA. Pambudi dan Chandra merefleksikan dampak ACFTA dalam jangka panjang dan pendek memberikan hasil yang berbeda dimana dalam jangka pendek ASEAN belum mampu mengalahkan dominasi produk China. Penulis melihat bahwa kajian ACFTA selama ini lebih melihat dari kacamata ekonomi konvensional yang melihat keuntungan jangka panjang dimana perekonomian ASEAN dan China akan tertata ulang guna mencapai efisiensi dan daya saing

---

<sup>6</sup> Daniel Pambudi dan Alexander C Chandra, *Garuda Terbelit Naga: Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China terhadap Perekonomian Indonesia*, ( Jakarta: Institute for Global Justice, 2006).

ekonomi akibat persaingan yang timbul dari jangka pendek. Penulis melihat adanya sistem tidak adil dalam perjanjian ACFTA ini, China terlihat baik dengan memberikan mekanisme *Early Harvest Programme* (EHP) sebagai tahap awal ACFTA dengan kebijakan pemerintah China meliberalisasi sektor pertaniannya agar produk-produk pertanian ASEAN dapat masuk ke China tanpa dikenai tarif apapun. Perlakuan tersebut seolah untuk meredam kritik membanjirnya produk China di Asia Tenggara. China memang memiliki tujuan-tujuan politis jangka panjang melalui pelaksanaan kerjasama ekonomi yang lebih dekat dengan ASEAN. Faktor pendukung perekonomian China seperti murahness buruh dan produksi serta modal asing membuat surplus perdagangan China-ASEAN. Dalam buku ini memberikan salah satu gambaran mengenai kesulitan para pembuat kebijakan ASEAN mengenai perjanjian ACFTA karena data statistik dari pemerintah China tidak akurat sehingga pembuat kebijakan susah mendapatkan gambaran yang akurat mengenai perekonomian China.

Buku karangan Pambudi dan Chandra lebih menekankan dampak ACFTA dari EHP sebagai dasar dampak ACFTA di masa mendatang. Fokus penulis menekankan analisa dampak EHP yang merupakan fase awal ACFTA terhadap pertanian Indonesia yang memberikan gambaran awal sebelum EHP berlangsung dan memberikan penjelasan umum mengenai kerangka ACFTA. Penulis menganalisa bahwa dalam fase EHP impor Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan ekspor. Selain itu, kebijakan EHP menyebabkan berbagai biaya produksi di dalam negeri meningkat. Dengan meningkatnya biaya produksi harga pun akan meningkat sehingga produk impor akan menggantikan produk lokal. Di tingkat jumlah tenaga kerja, melihat dari jangka panjang-pendek juga akan mengalami penurunan. Sehingga Pambudi dan Chandra melihat bahwa pada skema awal EHP pun ASEAN khususnya Indonesia akan mengalami defisit perdagangan karena ekspor besar impor pun lebih besar karena produk dalam negeri kalah bersaing dalam harga.

Literatur selanjutnya menggambarkan dukungan terhadap Pambudi dan Chandra bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan berat dalam persaingan ACFTA terutama terhadap produk China namun menyetujui pula bahwa apa yang disampaikan Danyang bahwa Indonesia juga mendapat keuntungan dari

kesepakatan ACFTA ini. Karya tulis tersebut berjudul “Tantangan Indonesia Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN-China oleh **Jusuf Wanandi**.”<sup>7</sup> Wanardi menggambarkan tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam bidang perdagangan luar negeri yaitu bagaimana meningkatkan daya saing terhadap ekonomi negara-negara kawasan yang makin meningkatkan pertumbuhan dan produktivitasnya. Sebagian sorotan terhadap ACFTA salah arah karena menganggap ACFTA merugikan karena FTA tersebut bukanlah alasan bagi banjirnya barang impor China ke Indonesia. Perjanjian dimaksudkan untuk membuka kesempatan bagi Indonesia untuk dapat lebih baik bersaing di pasar China. Memang ada beberapa jenis barang di mana persaingan sangat dirasakan seperti garmen atau sepatu dengan kualitas rendah. Indonesia tidak bisa melawan China dalam industri tertentu. UKM merupakan yang paling terkena dampak sehingga bantuan dari pemerintah seperti kredit, pelatihan dan mencari pasar.

Mulai 1 Januari 2010 Indonesia telah membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan China. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan China, yang disebut dengan *ASEAN China Free Trade Agreement* (ACFTA). Produk-produk impor dari ASEAN dan China akan lebih mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah karena adanya pengurangan tarif dan penghapusan tarif, serta tarif akan menjadi nol persen dalam jangka waktu tiga tahun. Sebaliknya, Indonesia juga memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara ASEAN dan China.

Beberapa kalangan menerima pemberlakuan ACFTA sebagai kesempatan, tetapi di sisi lain ada juga yang menolaknya karena dipandang sebagai ancaman. Bagi kalangan penerima, ACFTA dipandang positif karena bisa memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia. Pertama, Indonesia akan memiliki pemasukan tambahan dari PPN produk-produk baru yang masuk ke Indonesia. Tambahan pemasukan itu seiring dengan makin banyaknya obyek pajak dalam bentuk jenis dan jumlah produk yang masuk ke Indonesia. Beragamnya produk China yang

---

<sup>7</sup> Jusuf Wanardi, “Tantangan Indonesia Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN-China,” *Analisis CSIS*, Maret 2010, Vol. 39, No. 1.

masuk ke Indonesia dinilai berpotensi besar mendatangkan pendapatan pajak bagi pemerintah. Kedua, persaingan usaha yang muncul akibat ACFTA diharapkan memicu persaingan harga yang kompetitif sehingga pada akhirnya akan menguntungkan konsumen (penduduk atau pedagang Indonesia).

Bagi yang menolak, hal ini dikarenakan rasa khawatir akan ancaman produk China yang mengalahkan produk lokal. Produk dalam negeri yang bersaing ketat di pasar adalah industri kerajinan seperti properti dan furnitur, industri hasil hutan yang selama ini menjadi unggulan Indonesia dalam pasar domestik maupun mancanegara, dan yang paling merasakan dampak langsung arus perdagangan bebas dengan China adalah industri tekstil karena industri inilah yang paling diunggulkan di negeri tirai bambu tersebut. Sedangkan di Indonesia sendiri juga cukup menonjol dalam dunia perindustrian sektor tekstil, sehingga secara tidak langsung akan terjadi sebuah perang harga di pasaran dalam negeri, apalagi produk tekstil China biasanya lebih murah daripada produk dalam negeri.

Di sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), serbuan produk-produk China berupa kain dan garmen sudah mulai dirasakan oleh pasar dalam negeri sejak awal berlakunya ACFTA. Ancaman ini dirasakan oleh industri tekstil besar maupun Industri Kecil Menengah karena masyarakat akan cenderung lebih memilih tekstil dari China yang harganya relatif murah. Selama ini produk kain dan garmen yang berasal dari China harganya lebih murah 15%-25% bila dibandingkan dengan produk dalam negeri. Selain itu, produk pakaian jadi impor asal China diakui sejumlah pedagang lebih diminati masyarakat karena kualitas dan modelnya yang lebih mengikuti tren. Melihat persaingan dari produk China, produk lokal terkendala akan biaya produksi yang masih tinggi sehingga membuat harga produk lokal lebih mahal.

Tulisan Wanardi ini memberikan gambaran bahwa ACFTA memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia tetapi kurang spesifik hanya melihat dari pajak masuk barang dan hal ini tentu tidak sebanding dengan produksi dalam negeri yang masuk ke China ataupun dalam pasar negeri. Jika dengan melihat hanya dari segi pajak masuk tidak melihat kelangsungan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada sektor-sektor usaha kecil menengah. Tekstil dan Produk Tekstil seperti yang diungkapkan Wanardi merupakan sektor yang terkena imbas

karena kuatnya tekstil China sehingga akan terjadi perang harga. Hal ini tentu menjadi fokus yang harus dilihat dari pemerintah dalam kebijakannya dalam impor barang China dengan penurunan tarif yang harus disesuaikan ataupun adanya sistem regulasi dalam hubungan perdagangan ACFTA yang lebih ketat. Dengan demikian tujuan meraih keuntungan dari ACFTA ini masih minim implikasinya sehingga tujuan dari skema EHP hingga liberalisasi penuh tahun 2010 tetap memberikan gambaran defisit bagi perdagangan Indonesia.

**Jati Andrianto, Aditya Perdana Putra dan Fadjar Adrianto** dalam karya tulis mereka yang berjudul “ACFTA:Memetakan Sektor Berpeluang dan Terancam”<sup>8</sup> memberikan gambaran dari proses ACFTA yang bersifat *sum zero* dimana perjalanan globalisasi mengalami berbagai perkembangan yang tidak memberikan pola yang pasti. Mereka dari awal telah melihat bahwa kesepakatan ACFTA bersifat *sum zero* dimana ada yang untung dan ada yang rugi. Pengandaian semua negara mendapatkan keuntungan yang setara dari hilangnya batas-batas teritorial negara dalam aktivitas ekonomi tidak berjalan secara sempurna. Berbekal realitas yang demikian ini, maka pelaksanaan globalisasipun mengalami beberapa perubahan. Globalisasi yang menyatukan aktivitas ekonomi dunia menjadi terpolarisasi menjadi dua pola aktivitas ekonomi global, yakni (i) kelompok perdagangan yang dibentuk atas dasar kedekatan wilayah (integrasi regional); dan (ii) kelompok perdagangan yang dibentuk berdasarkan skala ekonomi tertentu. Pola pertama itulah yang menjadi pijakan atas pelaksanaan kesepakatan perdagangan bebas antara ASEAN dan China mulai 1 Januari 2010.

Dampak langsung dari implementasi ini tentu tidak seketika terjadi pada 1 Januari 2010. Penulis memperkirakan imbas kesepakatan perdagangan bebas regional tersebut mulai riil terjadi pada April 2010. Bagi Indonesia, ancaman serius dari kesepakatan perdagangan ini datang dari China. Pondasi ekonomi makro China yang disokong oleh kebijakan moneter, terutama penetapan kurs Renimbi, yang sangat kokoh menjadikan China lebih superior dalam kesepakatan ini dibandingkan negara-negara lainnya. Lebih dari segalanya, perdagangan bebas regional yang sampai sekarang ini telah terjadi memang memberikan gambaran bahwa tidak ada keadilan ekonomi setara yang diperoleh setiap negara peserta

---

<sup>8</sup> Jati Andrianto, Aditya Perdana Putra dan Fadjar Adrianto, “ACFTA:Memetakan Sektor Berpeluang dan Terancam,” *Jurnal Sosial Demokrasi*, 2010, Vol. 8, No. 3.

kesepakatan perdagangan bebas tersebut. Berpijak pada realitas yang demikian ini, sebenarnya dalam tataran debat akademik kesepakatan perdagangan bebas regional ini memang belum selesai.

Dalam konteks perdagangan antara China dan Indonesia, pola yang terjadi di wilayah regional tidak sama dengan perdagangan bilateral ini. Dalam konteks neraca perdagangan misalnya, selama Januari Oktober 2009, neraca perdagangan Indonesia terhadap China mengalami defisit yang mencapai US\$ 2 miliar. Lebih lanjut, berdasarkan data BPS, struktur neraca perdagangan Indonesia ke China tersebut dikuasai oleh sektor manufaktur, yakni sebesar 80%. Sisanya diikuti dengan pertambangan 16% dan pertanian 4%. Namun jika struktur ekspor tersebut dikuliti lebih lanjut, sebenarnya yang paling dominan itu adalah ekspor berbasis sumber daya alam, yaitu mencapai sebesar 50,6%. Sedangkan, yang non-sumber daya alam sebanyak 49,4%. Dalam karya tulis ini berisikan data yang menggambarkan bahwa nilai ekspor Indonesia ke China memiliki nilai tambah yang rendah. Lebih dari segalanya, jika nilai perdagangan akan meningkat secara drastis di wilayah regional, namun secara bilateral terus mengalami defisit, maka bisa dipastikan bahwa volume perdagangan produk dalam negeri kurang kompetitif tatkala bersaing di China.

Melihat struktur makro ekonominya yang tidak seimbang, bagaimana dengan struktur mikro ekonominya, spesifik tentang sektor-sektor ekonomi yang ada. Akan ada sektor yang berpeluang maupun yang terancam dari perdagangan bebas ASEAN-China tersebut. Ciri-ciri sektor usaha yang berpotensi meraih kesempatan dengan adanya ACFTA ialah apabila sektor usaha itu mampu menjadi penopang ekonomi domestik, memiliki basis industri yang kokoh dari hulu ke hilir, tidak masuk dalam pos tarif penundaan ACFTA, memiliki indeks keunggulan komparatif yang cukup tinggi, dan tingkat ekspor yang tak terganggu dengan adanya ACFTA, serta memiliki perangkat kebijakan dan undang-undang yang telah siap diimplementasikan.

Dalam karya tulis ini terdapat dua sektor industri Indonesia yang memiliki peluang tumbuh dalam implementasi ACFTA. Pertama, sektor otomotif. Tren pertumbuhan industri otomotif Indonesia memiliki kecenderungan untuk tetap stabil. Hal ini didasarkan pada indeks pertumbuhan produksi otomotif yang



mengalami kenaikan selama tiga tahun (2006 - 2008). Walaupun sektor kendaraan bermotor mengalami defisit sebesar 46,46% pada 2006, tetapi pada dua tahun berikutnya meningkat ke angka 29,65% dan 22,41%. Adapun pada bagian subsector (alat angkutan selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih), memiliki porsi kenaikan lebih tinggi dan persentase penurunan yang fluktuatif. Kedua, sektor pertambangan. Pertambangan merupakan sektor usaha di Indonesia yang termasuk memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Faktor utama dari potensi sektor ini ialah luasnya sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Komoditas-komoditas yang dihasilkannya pun sukses menjadi komoditas dunia. Indonesia memiliki potensi pasar yang besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk salah satu komoditas dalam sektor ini, secara keunggulan komparatif berhasil mencapai angka 41,05% pada 2008 dengan trend yang meningkat setiap tahunnya.

Sektor yang berpeluang tidak sebanding dengan sektor yang terancam melihat sektor-sektor yang terancam merupakan usaha padat karya dan Usaha Kecil Menengah. Penulis memberikan ciri-ciri sektor usaha yang diperkirakan terancam terkait ACFTA yaitu memiliki perangkat undang-undang dan kebijakan yang masih lemah, memiliki basis industri yang masih lemah dari hulu ke hilir, masuk dalam pos tarif penundaan ACFTA, indeks keunggulan komparatif yang cukup rendah, dan ekspor terganggu dengan adanya ACFTA. Dengan dua sektor yang berpeluang tidak sebanding dengan delapan sektor industri di Indonesia yang terancam akibat implementasi ACFTA. Sektor-sektor yang ketat berkompetisi adalah: Pertama, sektor alas kaki. Walaupun ekspor alas kaki diprediksi akan meningkat dalam beberapa tahun mendatang, tetapi implementasi ACFTA diyakini akan membuat industri alas kaki di dalam negeri ikut tergerus. Pasalnya, proporsi kenaikan ekspor itu ditaksir belum mampu menutupi kerugian dalam negeri akibat penerapan ACFTA. Melihat indeks pertumbuhan produksi industri alas kaki, maka selama 2006, rata-rata produksinya mengalami pertumbuhan defisit sebesar 3,45% dan pada 2007 defisit itu mulai berkurang menjadi 0,47%. Sebagai salah satu sektor padat karya di Indonesia, sudah barang tentu industri alas kaki harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dengan penerapan ACFTA, otomatis kualitas dan harga-harga produk murah dari China akan

menjadi konsumsi utama konsumen dalam negeri. Dengan kondisi ekonomi yang belum pulih dan melihat keuntungan yang akan diambil dari ekspor akan tetap lebih rendah, maka sungguh beralasan untuk cemas atas kemungkinan membanjirnya produk China di Indonesia saat ini.

Sektor kedua adalah sektor tekstil dan produk tekstil. Keunggulan komparatif (CA) yang rendah untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) selama delapan tahun terakhir memberikan opsi ancaman bagi industri TPT di Indonesia dalam menghadapi ACFTA. Berdasarkan kalkulasi *Institute for Development of Economics and Finance Indonesia* (Indef) misalnya, pada 2008 CA TPT hanya sebesar 1,81%. Pada 2007 dan 2006 pun tidak jauh berbeda, hanya 1,9% dan 2,03%. Sektor TPT juga menjadi penyumbang eksportir terbesar jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Tercatat terdapat 187 eksportir yang melakukan ekspor ke luar negeri. Berdasarkan data BPS, indeks pertumbuhan produksi TPT juga mencatat pertumbuhan fluktuatif selama tiga tahun terakhir (2006-2008), yang secara berurutan sebesar 6,04%, 11,17%, dan 3,38%. Atas dasar ini, tampaknya pemerintah perlu meratifikasi kebijakan terkait penentuan standar tarif dan bea dumping yang diterapkan bagi produk-produk TPT. Ketiga, sektor kimia. Kapasitas produksi bahan kimia pada 2008 mencapai 38,24 juta ton, sedangkan untuk ekspor pada periode yang sama mencapai 5,63 juta ton. Sementara itu, kebutuhan bahan kimia yang diimpor pada 2007 mencapai 3,7 juta ton dan pada 2008 mengalami peningkatan menjadi 3,8 juta ton. Industri kimia terbilang salah satu industri yang terancam akibat penerapan ACFTA. Dengan kesenjangan kualitas mutu standar yang tinggi antarjenis barang kimia, hal ini menjadi celah negatif yang dapat mengakibatkan rendahnya daya saing barang kimia di pasar domestik. Sementara itu, tingkat keunggulan komparatif industri kimia hanya 0,47% pada 2008. Keempat, sektor besi dan baja. Dari usulan total 228 pos tarif yang disepakati untuk ditunda dalam proses negosiasi ACFTA, sebanyak 114 pos tarif berasal dari sektor industri besi dan baja, dengan jumlah kompensasi sebanyak 53 pos. Hal ini makin meyakinkan bahwa industri besi dan baja dalam negeri akan mengalami kesulitan menghadapi serbuan produk-produk impor China.

Sektor selanjutnya adalah sektor furnitur. Dalam usulan rekapitulasi perubahan pos tarif pemberlakuan ACFTA, terdapat 5 pos (terkait sektor furnitur) dari total 228 pos tarif yang diusulkan untuk ditunda. Dalam hal indeks pertumbuhan produksi, sektor furniture mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan yang drastis. Pada 2006, rata-rata pertumbuhan produksi furniture sebesar 1,87%, lalu pada 2007 sebesar 14,12%, dan pada 2008 menjadi positif di level 33,56%. Data ini menandakan bahwa sektor tersebut belum stabil dalam laju pertumbuhan produksinya. Sektor ini pun mengalami keadaan sensitif terkait krisis global di wilayah Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini dikhawatirkan akan membuat produsen mebel dalam negeri gulung tikar karena permintaan yang menurun dan membanjirnya produk China di pasar domestik dengan harga murah dan kualitas yang lebih baik. Keenam, sektor elektronik. Implementasi ACFTA diprediksi mampu menggerus lima produk elektronik dalam negeri. Di antaranya, radio kaset jinjing, televisi jenis cembung, kipas angin, setrika berkapasitas 350 watt, serta pompa air 125 watt. Kelima produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan rendah dan jumlah populasi segmen masyarakat tersebut sebanyak 20 juta kepala keluarga di Indonesia. Maka, China yang memang menasar segmen menengah-atas di bisnis elektronik punya banyak alasan untuk menjadikan ACFTA sebagai waktu yang tepat untuk mengeruk keuntungan di pasar elektronik di Indonesia. Sektor terakhir adalah sektor makanan dan minuman. Menurut laporan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), terdapat empat produk olahan khusus yang perlu diproteksi, yaitu yang berbahan baku jagung, kedelai, gula, dan beras. Produk-produk tersebut diyakini belum dapat bersaing dengan China.

Karya tulis di atas memberikan informasi analisa mengenai sektor-sektor yang berpeluang maupun terancam dalam pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN-China. sektor yang berpeluang dan yang terancam tidak sebanding dimana yang berpeluang hanya dua dan yang terancam ada delapan sektor. Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan-kebijakan perdagangan luar negeri baik penerapan SNI, *safeguard* maupun anti dumping yang menjamin sektor dalam negeri tidak tergerus produk China. Pemerintah harus melihat sektor dari ekspor dan impor yang seimbang sehingga surplus dapat tercapai. Konsep ekspor

tetap besar yang dikumandangkan pemerintah tidak didasarkan pada impor yang jauh lebih besar sehingga ACFTA mengarah pada dampak merugikan daripada menguntungkan. Memang jelas melihat fenomena yang ada FTA yang digambarkan penulis benar adanya bahwa tidak ada keadilan ekonomi setara yang diperoleh setiap negara peserta kesepakatan perdagangan bebas tersebut.

Berangkat dari telaah terhadap tulisan-tulisan tentang ACFTA di atas, maka penulis kemudian menentukan arah yang ingin dituju dalam penelitian ini. Berbeda dengan tulisan-tulisan tersebut, yang umumnya berbicara tentang *critical assesment* terhadap ACFTA, prediksi mengenai dampak pemberlakuan ACFTA terhadap Indonesia, serta saran tentang bagaimana sebaiknya proses pengimplementasian ACFTA tersebut dilakukan, penelitian ini ingin melihat strategi kebijakan Indonesia serta keterkaitannya dengan dampak yang lebih khusus pada sektor tekstil dan produk tekstil yang merupakan salah satu sektor strategis Indonesia yang diprediksi terancam akan produk China baik dampak dalam negeri maupun ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia ke kawasan ASEAN maupun China. Dari deskripsi tersebut dapat melihat apakah kebijakan dan strategi perdagangan yang diambil tersebut telah cukup dan siap untuk menghadapi pemberlakuan ACFTA ini.

## **I.5 Kerangka Pemikiran**

### **I.5.1 Perdagangan Bebas, Keunggulan Komparatif dan *Relative Gains***

Kesepakatan ACFTA merupakan sebuah kesepakatan perdagangan bebas dengan paradigma perspektif liberalisme. Pendekatan liberalisme meyakini bahwa pasar akan membentuk interaksi antar individu dan negara dalam kerjasama yang saling menguntungkan. Suatu negara sedang menjalankan kebijakan liberalisasi bila kebijakan yang diterapkan tersebut menyebabkan perekonomian semakin berorientasi ke luar (*outward-oriented*) dan juga *openness*. Maksud dari kebijakan liberalisasi adalah kebijakan perdagangan yang diambil suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal atau terbuka. Secara khusus, perubahan ke arah yang semakin netral tersebut meliputi penyamaan insentif (rata-rata) diantara sektor-sektor perdagangan. Suatu rezim kebijakan dianggap menjalankan kebijakan liberalisasi bila tingkat intervensi negara secara

keseluruhan semakin berkurang. Kebijakan liberalisasi dapat tercapai melalui beberapa cara seperti pengurangan hambatan-hambatan dalam perdagangan atau pemberlakuan subsidi ekspor.

Liberalisasi perdagangan merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh negara berkembang yang mengakibatkan pengurangan atau eliminasi tarif dan kuota yang dikenakan pada produk impor. Tarif maupun kuota digunakan untuk melindungi produk domestik dari kompetisi produk impor. Liberalisasi perdagangan bertujuan untuk menyamakan insentif dengan memperbaiki ketidakseimbangan insentif produksi dari pasar domestik.

Berdasarkan teori perdagangan internasional, motivasi utama untuk melakukan perdagangan internasional adalah mendapatkan *gains from trade* meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya. Perdagangan internasional memberikan akses terhadap barang yang lebih murah bagi konsumen dan pemilik sumber daya memperoleh peningkatan pendapatan karena menurunnya biaya produksi. Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda.

*Free Trade Area* merupakan blok perdagangan yang setiap negaranya menandatangani kerjasama perdagangan bebas yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan meningkatkan arus perdagangan bagi negara-negara dalam perjanjian tersebut. Dalam pelaksanaannya FTA tidak terlepas dari liberalisasi yaitu proses eliminasi tarif serta pengaturan pengecualian terhadap industri atau produk tertentu. Argument utama yang bisa menjelaskan kemunculan perdagangan bebas adalah teori keunggulan komparatif yang dapat diartikan perdagangan bebas dapat menguntungkan dalam hubungan internasional dimana masing-masing pelaku ekonomi dapat memproduksi secara optimal, sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki. Dengan potensi tersebut, perdagangan

bebas akan membawa peningkatan standar kehidupan, tenaga kerja dan sebagainya yang akan menguntungkan setiap negara.<sup>9</sup>

David Ricardo mengemukakan bahwa setiap negara akan memperoleh keuntungan jika setiap negara menspesialisasikan pada produksi dan ekspor yang dapat diproduksi pada biaya yang relatif lebih murah serta mengimpor yang memerlukan biaya lebih mahal.<sup>10</sup> Ini menjelaskan dengan keunggulan komperatif tersebut, maka negara akan mengekspor komoditas dengan nilai keunggulan komperatif yang tinggi dan mengimpor komoditas dengan keunggulan komperatif yang lebih rendah. Perdagangan antar negara akan membawa dunia pada penggunaan sumber daya yang lebih efisien serta perdagangan bebas yang menguntungkan dengan spesialisasi sesuai dengan keunggulan komperatif yang dimiliki setiap negara.

Dalam perjanjian China-ASEAN ini kenyataannya Indonesia dan China memiliki keunggulan komperatif yang relatif sama baik mengembangkan industri teknologi rendah serta memproduksi tekstil dan produk tekstil, dan kaitan dalam penelitian ini sama-sama negara pengeksport tekstil dan produk tekstil. Produk TPT merupakan salah satu produk yang menyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia. Di kuartal pertama tahun 2010, industri TPT menyumbang ekspor sejumlah 840 Juta Dollar (dengan pertumbuhan sebesar 18,4%), berada di peringkat pertama dalam produk ekspor non-migas.<sup>11</sup> Selama rentang 2002- 2010, share tekstil tidak pernah kurang dari 25%, yang menandakan besarnya kontribusi industri tekstil terhadap pembentukan GDP Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara pengeksport tekstil yang cukup besar, pada tahun 1997-2001 posisi Indonesia meningkat ke posisi 27 dari posisi 85 pada tahun 1994-1998 dari 103 negara pengeksport tekstil. Hal ini menunjukkan bahwa tekstil merupakan keunggulan komperatif yang harus tetap diperhitungkan melihat Industri tekstil Indonesia mempekerjakan 1,3 juta orang dengan nilai ekspor

---

<sup>9</sup> M.A.B. Siddique, *Regionalism, trade and economic development: theories and evidence from the Asia-Pacific region*, (UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2007), h. 3.

<sup>10</sup> Tulus Tambunan, *op.cit*, h. 57.

<sup>11</sup> Kementerian Perdagangan, "Penyusunan Catatan Perdagangan Indonesia 2010," 2010, h. 11.

sekitar 9,4 miliar Dollar pada tahun 2009.<sup>12</sup> Namun, China sangat terkenal sebagai raja dari industri tekstil walaupun pada periode 1997-2001 laju pertumbuhan China per tahunnya lebih rendah yang berada pada posisi 42, namun pangsa pasar China berada pada posisi 1 sedangkan Indonesia pada peringkat 14.<sup>13</sup> Jelas keunggulan komperatif China pada tekstil sangat kuat dimana setiap tahunnya terus meningkat. Dengan keunggulan komperatif yang relatif sama pada tekstil tentu spesialisasi menjadi tanda tanya dan menghasilkan negara yang *lose* dan *win* dalam kerangka *ASEAN-China Free Trade Area* tersebut. Indonesia harus mengakui keunggulan China dalam daya saing industri tekstil dan produk tekstilnya dimana hal ini dapat dilihat dari defisit perdagangan Indonesia dalam neraca perdagangan.

Neraca perdagangan merupakan catatan sistematis atas nilai transaksi barang suatu negara yang terdiri dari barang ekspor dan impor.<sup>14</sup> Defisit dalam suatu neraca perdagangan direpresentasikan bahwa nilai barang impor lebih besar daripada barang yang diekspor, sedangkan surplus ketika barang yang diekspor lebih besar nilainya dari barang yang diimpor. Dalam kasus Indonesia dan China dalam ACFTA, Indonesia ternyata mengalami defisit yang dapat dilihat pada periode Februari-Maret 2011, ekspor Indonesia ke China naik 10,4 persen (dari US\$ 1.181,7 juta menjadi US\$ 1.304,3 juta) namun impor juga meningkat 30,8 persen (dari US\$ 1.508 Juta menjadi US\$ 1.972,7 juta).<sup>15</sup> Pada perdagangan tekstil dan produk tekstil selama Januari-September 2011 Indonesia mengalami defisit hingga US\$ 1,4 miliar.<sup>16</sup>

Pola hubungan perdagangan terlihat asimetris dengan pertumbuhan industri China yang pesat disandingkan dengan industri Indonesia yang masih lesu akibat krisis 1997. Tidak hanya itu, sifat perdagangan yang tidak komplementer

<sup>12</sup> Anton Alifandi, "Perdagangan Bebas ASEAN Cina," diakses dari: [http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan\\_khusus/2010/06/100625\\_acftahalaman.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2010/06/100625_acftahalaman.shtml), diakses pada 26 Oktober 2011, pukul 01.16 WIB.

<sup>13</sup> Tulus Tambunan, *op.cit*, h. 287.

<sup>14</sup> Jeff Madura, *International Financial Management 6<sup>th</sup> Edition*, (South Western College: International Thomson Publishing Inc, 2000), h. 32.

<sup>15</sup> Latif Adam, "Surplus yang Tergerus", diakses dari: [http://www.ekonomi.lipi.go.id/informasi/berita/berita\\_detil2.asp?Vnomer=467](http://www.ekonomi.lipi.go.id/informasi/berita/berita_detil2.asp?Vnomer=467). Diakses pada 19 februari 2012, pukul 18.56 WIB.

<sup>16</sup> Sandra karina, "Penyelundupan Tekstil China Capai USD 500 Juta", diakses dari: <http://economy.okezone.com/read/2011/10/25/320/520226/penyelundupan-tekstil-China-capai-usd500-juta>, diakses pada 20 Februari 2012, pukul 20.55 WIB.

mengakibatkan adanya kompetisi antar ASEAN dan China untuk dapat memaksimalkan pasar dalam skema ACFTA. Liberalisme mengusung *absolute gains* dalam sebuah kerjasama bahwa setiap anggota perdangan bebas akan memperoleh keuntungan bersama. Kaum neoliberalisme sangat percaya bahwa peran pemerintah harus dibatasi, dan membiarkan pasar berjalan apa adanya. Selain itu kaum neo-liberal memandang institusi sebagai pemeran utama dalam menengahi dan memecahkan konflik.<sup>17</sup> Namun ketika pasar tidak mampu berjalan sendiri terlihat dari ketidaksiapan industri, maka peran pemerintah menjadi lebih kuat agar industri mampu menghadapi perdagangan bebas.

ACFTA dibentuk untuk membangun sebuah kawasan perdagangan yang berdasarkan pada regional. Tujuan pembentukannya adalah untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas di kedua wilayah untuk membuka pasar masing-masing negara yang bersepakat dalam perjanjian ini. Ide awal lahirnya upaya liberalisasi perdagangan adalah untuk menciptakan suatu rezim perdagangan yang adil, namun kenyataan yang ada justru sebaliknya. Joseph E. Stiglitz<sup>18</sup> menegaskan hubungan yang tidak adil bagi negara berkembang dalam era globalisasi. Dengan kekuatan yang dimilikinya, negara-negara maju sering kali bersikap mau menang sendiri, misalnya dengan memaksa negara-negara berkembang untuk menerima isi kesepakatan yang menguntungkan negara maju. Negara maju memaksa negara berkembang untuk tetap menjadi produsen barang mentah dan produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja murah. Stiglitz menunjuk kasus Meksiko sebagai renungan negara berkembang untuk melaksanakan perdagangan bebas. Meksiko mengikuti jejak Amerika Serikat dan Kanada untuk bergabung dalam kesepakatan perdagangan bebas wilayah Amerika NAFTA (*North American Free Trade Area*). Prediksi Meksiko akan mencapai kemakmuran dengan bergabung NAFTA dengan asumsi Meksiko mendapatkan akses langsung atas pasar Amerika Serikat sebagai pasar terbesar di dunia. Namun kenyataan yang terjadi Meksiko semakin di bawah Amerika Serikat dengan

---

<sup>17</sup>Jill Steans dan Llyod Pettiford, *Hubungan Internasional: Perspektif dan tema*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), h. 141.

<sup>18</sup> Joseph E.Stiglitz, *loc.cit.*, h. 57.



kesenjangan ekonomi mencapai 10% pada satu dekade pelaksanaan NAFTA.<sup>19</sup> Pertumbuhan Meksiko atas dasar pertumbuhan perkapita riil sehingga penanaman investasi menjadi sangat rentan dalam perekonomian Meksiko, sehingga kekuatan perekonomian Amerika Serikat menjadi sangat dominan dalam pertumbuhan perekonomian Meksiko.

Dengan demikian, pola perdagangan bebas yang asimetris akan mengarah pada bahwa semua negara harus dikaitkan dengan *relative gain* yang dihasilkan dari usaha-usaha perjanjian dan kerja sama internasional. *Relative gain* dianggap bahwa tinggi rendahnya tingkat kemampuan aktor mempengaruhi tingkat keuntungan yang didapat oleh aktor. Hal tersebut terjadi ketika salah satu aktor dalam jalinan kerjasama tersebut memiliki kekuatan atau pengaruh lain yang lebih besar daripada aktor lain sehingga mengakibatkan kesepakatan yang lebih cenderung sepihak yang dilakukan secara terpaksa oleh keadaan.<sup>20</sup> Neo-realisme mulai menerima adanya aktor non-state namun aktor negara tetap yang menjadi aktor utama atau dominan dikarenakan pertimbangan atas kemampuan negara yang memiliki kedaulatan yang lebih kuat dibanding non-negara.

Dalam perdagangan China-ASEAN terlihat setiap negara mengeksport komoditas dengan nilai keunggulan komparatif yang tinggi dan mengimpor komoditas dengan keunggulan komparatif yang lebih rendah. Persaingan antar negara tidak bisa dipungkiri melihat setiap negara ternyata tidak bersifat komplementer tetapi substitusi seperti Indonesia dan Thailand dalam beras dan Indonesia dan China dalam sektor tekstil dan produk tekstil. China dan Indonesia masing-masing memiliki keunggulan masing-masing namun di sisi lain berkompetensi dengan produk yang sama.

### ***1.5.2 Neo-mercantilism, Trade Strategic dan Industrial Policy***

Perdagangan bebas memiliki paradigma liberalisme yang menganggap intervensi negara harus terbatas dan meyakini setiap entitas ekonomi yang melaksanakan perdagangan bebas akan meraih keuntungan bersama. Dengan

---

<sup>19</sup> Syamsul Hadi dan Shanti Darmastuti, *Dominasi Modal Jepang di Indonesia: Telaah Kritis Atas Dampak Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) Indonesia-Jepang*, (Jakarta: Institute for Global Justice Jakarta, 2009), h. 8.

<sup>20</sup> Jill Steans dan Lloyd Pettiford, *op.cit.*, h. 79.

kekuatan negara yang berbeda di setiap belahan dunia membuat pola *absolute gain* atau keuntungan bersama dalam perdagangan bebas susah terimplikasi. Bagi negara yang tidak mampu meraih manfaat dari kebijakan perdagangan bebas akan lebih memilih kebijakan merkantilisme dengan menekankan pada kekayaan negara dan proteksi terhadap industri domestik. Alexander Hamilton meyakini bahwa peran negara yang aktif diperlukan untuk menggalakkan industri dalam negeri. Hamilton meyakini tindakan negara diperlukan untuk meningkatkan daya produktif dalam bentuk kebijakan.

Neo-merkantilisme menggambarkan upaya pemerintah membantu industri nasional untuk memperoleh keunggulan komparatif. Negara terdorong untuk melakukan intervensi dan mempengaruhi perkembangan dalam ekonomi domestik dan ekonomi internasional. Contoh Jepang sebagai negara yang menentukan beberapa industri nasional untuk didukung dalam proses produksi dan ekspor, sembari menghambat masuknya produk impor yang menyaingi produk nasional. Peran negara semakin penting ketika perusahaan multinasional semakin berkembang. Banyak negara semakin menerapkan kebijakan yang mengkaitkan investasi MNC dengan tujuan pembangunan ekonomi negara. Untuk meningkatkan daya saing industri nasional, banyak negara semakin menggantungkan pada informasi dan teknologi yang dimiliki MNC. Namun, MNC juga bergantung pada negara untuk memelihara stabilitas politik sehingga dapat beroperasi efektif.

Robert Gilpin melihat neo-merkantilisme yang baik diterapkan yang bersifat defensif dimana negara berusaha melindungi ekonomi nasional dari kekuatan ekonomi dan politik yang merugikan.<sup>21</sup> Negara menjadi lebih agresif dan memiliki lebih banyak peluang untuk menghadapi tantangan negara-negara lain yang kebijakan perdagangan dan investasinya dianggap merugikan ekonomi dan politik mereka. Pemerintah berusaha melindungi kepentingan nasionalnya dengan menekankan kebijakan mencapai surplus neraca perdagangan. Kebijakan diarahkan baik bersifat meningkatkan ekspor maupun untuk membatasi impor. Negara memiliki berbagai cara untuk membantu industri agar mampu bersaing

---

<sup>21</sup> Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, (Princeton: Princeton University Press, 1987), h. 33.

dengan memberikan pinjaman, program pembangunan infrastruktur, promosi investasi, dan sebagainya.

Intervensi negara di saat menerapkan perdagangan bebas tetap penting, guna menjaga kepentingan nasional dan meraih manfaat dari perdagangan bebas tersebut. Paradigm liberalism dengan *absolute gain* meyakini semua akan meraih manfaat yang sama, namun kenyataannya keuntungan yang didapat tidak terdistribusi sama bagi setiap negara. Sehingga teori *trade strategic* menyarankan intervensi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan nasional.<sup>22</sup> *Trade strategic* atau perdagangan strategis merupakan teori yang menekankan pada penciptaan keunggulan komparatif melalui penargetan industri oleh pemerintah.<sup>23</sup> Dalam teori ini membenarkan intervensi pemerintah dalam hal ini meningkatkan daya saing industri dengan kebijakan yang mendukung industri dan produk nasional.

Barbara Spencer dan James Brander<sup>24</sup> menyatakan bahwa kegagalan pasar sebagai alasan baku yang membenarkan campur tangan pemerintah jika kondisi persaingan sempurna ideal tidak terpenuhi. Spencer dan Brander menegaskan, di sejumlah sektor industri, hanya ada sedikit yang bersaing secara efektif. Pemerintah perlu ikut campur dalam hal mengatur aturan yang digunakan demi mengalihkan imbalan dari asing ke domestik. Subsidi pemerintah bagi industri domestik dapat merintangangi kegiatan produksi asing.

Teori perdagangan strategis menghasilkan pilihan bagi negara untuk menggunakan tingkatan proteksi seperti pemberian subsidi terhadap industri tertentu dan mengatur kebijakan industri yang akan menghasilkan perusahaan domestik yang surplus baik di pasar lokal maupun internasional. Ide pokok dari teori ini bahwa pasar dan pemerintah berperilaku strategik dalam pasar yang tidak sempurna sehingga akan menciptakan perdagangan yang seimbang dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.

---

<sup>22</sup> Jeffrey A. Hart and Aseem Prakash, *Strategic Trade and Investment Policies: Implication for the Study of International Political Economy*, (USA:Blackswell Publishers Ltd., 1997), h. 463.

<sup>23</sup> David DeCarlo, "Industrial Policy as Strategic Trade Policy in a Global Economy," *Undergraduate Economic Review*, Vol. 3, No. 1, Article 9, h. 5.

<sup>24</sup> James A. Brander and Barbara J. Spencer, "Export Subsidies and International Market Share Rivalry," *Journal of International Economics*, 1985, Vol. 18, h. 83-100.

Dalam kerangka ASEAN-China FTA jelas terlihat intervensi pemerintah Indonesia yang lebih intensif. Kapasitas perekonomian China yang semakin kuat dalam industri manufaktur terutama Tekstil dan Produk Tekstil membuat produk-produk China semakin tersebar di dunia. Upah buruh yang murah serta pemerintah yang sangat pro industri membuat kemajuan industri China menghasilkan produk dengan harga murah. Perdagangan Indonesia dan China sebelum liberalisasi penuh 2010, Indonesia telah mengalami defisit. Kekhawatiran menjelang tahun 2010 tentu masuk akal karena sebelum menerapkan tarif 0%, Indonesia telah mengalami defisit. Intervensi pemerintah Indonesia dibutuhkan untuk menahan gejolak dan gelombang produk China serta mendukung industri dalam negeri untuk terus meningkatkan daya saing.

Terkait dengan *trade strategic*, tidak terlepas dengan *Industrial Policy* atau Kebijakan industri yang merupakan rencana suatu negara yang mendeskripsikan strategi yang diambil untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri manufaktur dalam ekonomi.<sup>25</sup> Kebijakan industri terkait dengan infrastruktur yang mendukung industri seperti transportasi, komunikasi maupun energi yang merupakan bagian utama dari sektor manufaktur.

Jepang merupakan negara yang telah menerapkan kebijakan industri dimana negara, bekerjasama erat dengan para eksekutif perusahaan secara seksama menentukan industri strategis yang perlu mendapat bantuan pemerintah. *Trade strategic* juga diterapkan negara-negara industri maju untuk menjaga industrinya tetap berdaya saing. Gabungan kebijakan yang melibatkan peran negara, yaitu *industrial policy* dan *trade strategic* membuat Jepang mampu meningkatkan daya saing.

## I.6 Asumsi

Penelitian ini berdasarkan asumsi:

- Peran pemerintah Indonesia melalui strategi kebijakannya diperlukan dalam perdagangan bebas ACFTA.

---

<sup>25</sup> Takako Ishihara, "Industrial Policy and Competition Policy," diakses dari: [www.jftc.go.jp/eacpf/05/jicatext/aug27.pdf](http://www.jftc.go.jp/eacpf/05/jicatext/aug27.pdf), diakses pada 16 Maret 2012, pukul 09.15 WIB.

- Formulasi dan implementasi strategi kebijakan negara yang baik berdampak terhadap perdagangan TPT.

### **I.7 Model Analisa**

Model analisa merupakan alat bantu dalam menstimulasi atau mempertajam pemahaman terhadap suatu realitas yang terjadi. Model analisa atau alur analisis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



### **I.8 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menjelaskan dengan menggambarkan berdasarkan data-data yang ada secara objektif serta menjelaskan variabel-variabel yang dibangun dari data-data yang ada sehingga diperoleh hubungan satu sama lainnya untuk sampai pada suatu kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Data yang dipergunakan untuk keperluan analisa adalah data primer dan sekunder. Data primer didapat dari pernyataan formal pemerintah Indonesia dan China baik berupa situs resmi kenegaraan maupun pernyataan yang terekam atau termuat dalam media massa. Data-data sekunder akan diperoleh dari berbagai jurnal, buku, dan situs-situs internet. Data-data dari sumber-sumber tersebut diharapkan dapat membantu menjawab pertanyaan permasalahan dalam penelitian ini.

### **I.9 Sistematika Penelitian**

Dalam menjawab permasalahan yang diajukan, penulisan penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bagian atau bab dengan sistematikan penulisan sebagai berikut:

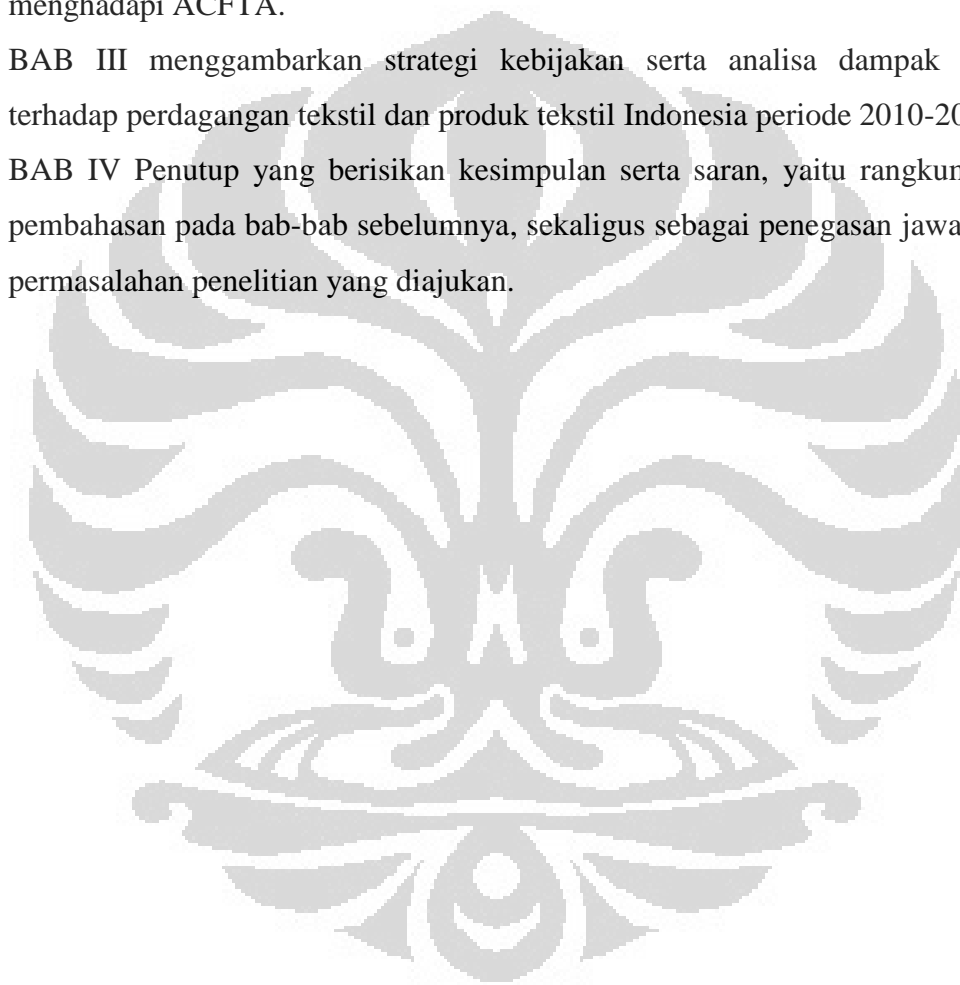
## BAB I Pendahuluan

Meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penulisan.

BAB II membahas hubungan ekonomi Indonesia-China dan ASEAN-China yang dilanjutkan dengan proses pembentukan ACFTA. Dalam bab ini juga membahas mengenai kesiapan Indonesia menghadapi ACFTA dengan menganalisa implemenrasi *normal track* 2005-2009 beserta perbandingan kesiapan Thailand menghadapi ACFTA.

BAB III menggambarkan strategi kebijakan serta analisa dampak ACFTA terhadap perdagangan tekstil dan produk tekstil Indonesia periode 2010-2011

BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan serta saran, yaitu rangkuman atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sekaligus sebagai penegasan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan.



## BAB II

### KESEPAKATAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA DAN KESIAPAN INDONESIA MENGHADAPI ACFTA

#### II.1 Dinamika Hubungan Ekonomi Indonesia-China Sebelum Kesepakatan ACFTA

Indonesia dan China menjadi *nation state* pasca perang dunia kedua namun memiliki perbedaan sistem sosial yang mempengaruhi hubungan ekonomi antara kedua negara. Selaras dengan pengaruh rezim politik internasional pada masa Perang Dingin, hubungan ekonomi China dan Indonesia selalu naik turun. Harus diakui, hubungan ekonomi kedua belah pihak sangat erat berkaitan dengan hubungan politik kedua negara. Sebagaimana pasang surut hubungan politik, begitu pula hubungan ekonomi yang dijalani oleh Indonesia dan China.

Hubungan diplomatik Indonesia dan China dimulai pada tahun 1950 pada masa Moh. Hatta menjadi perdana menteri yang ditandai dengan pengakuan secara resmi kedaulatan China pada tanggal 15 Januari 1950 dan pengukuhan hubungan diplomatik secara resmi pada 13 April 1950.<sup>26</sup> Pertukaran duta besar antara Indonesia dan China menandai mulai eratnya hubungan kedua negara tersebut. Baik Indonesia maupun China menyadari pentingnya kedua negara dalam menjalin kerjasama baik secara politik maupun ekonomi. Awal hubungan yang terjalin belum memberikan hubungan yang produktif karena situasi dalam negeri China dan Indonesia yang sedang disibukkan dengan proses rekonstruksi.

Hubungan bilateral perdagangan Indonesia-China ditandatangani pertama kali pada tahun 1953. Diawal kerjasama, perdagangan kedua negara hanya mencapai US\$ 7,4 Juta namun terus meningkat hingga US\$ 129 Juta dalam waktu lima tahun.<sup>27</sup> Pada tahun 1965, China menjadi partner dagang terbesar kedua Indonesia dengan nilai ekspor dan impor mencapai 11% dari nilai total

---

<sup>26</sup> Tuty Enoch Muas, "Hubungan Indonesia-China: Secara Historis, Dinamis!," dalam *Merangkul China* ed. I Wibowo & Syamsul Hadi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 26.

<sup>27</sup> Chongbo Wu, "Forging Closer Sino-Indonesia Economic Relations and Policy Suggestions," *Ritsumeikan International Affairs*, 2011, Vol. 10, h. 119-142.

perdagangan Indonesia.<sup>28</sup> Pertumbuhan yang baik dalam hubungan perdagangan tidak membuat hubungan China dan Indonesia secara politik dapat berjalan baik. Dengan isu komunisme China turut berperan aktif membantu pertumbuhan PKI yang membuat Indonesia membekukan hubungan diplomatik pada tahun 1967 setelah peristiwa G30S/PKI yang mengakibatkan penghentian hubungan perdagangan. Namun, perdagangan antara Indonesia dan China tetap terjadi secara tidak langsung melalui jaringan Hongkong dan Singapura yang bernilai hingga 200 Juta Dollar Amerika per tahun.<sup>29</sup>

Selama fase pembekuan, China terus melontarkan strategi-strateginya untuk menormalisasi kembali hubungan diplomatik dengan Indonesia melalui diplomasi dagang. Salah satu keberhasilan diplomasi tersebut dengan kehadiran delegasi Kamar Dagang Indonesia (KADIN) yang turut berpartisipasi dalam Pameran dagang Guangzhou pada bulan November 1977.<sup>30</sup> Kontak pertama tersebut menjadi jalan untuk merajut kembali hubungan perdagangan Indonesia dan China yang tidak terlepas dari besarnya keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak. Selang delapan tahun pasca kehadiran KADIN di Guangzhou, hubungan antara Indonesia dan China semakin membaik pada tahun 1985 ketika pemerintah Indonesia membuka kembali perdagangan langsung bagi komunitas bisnis antar kedua negara. Hal ini menjadi langkah awal yang sangat penting menuju normalisasi hubungan diplomatik sebagaimana perdagangan bilateral akan terus berkembang dan sangat dibutuhkan Indonesia karena tekanan ekonomi dan keinginan Indonesia untuk berperan lebih besar dalam diplomasi Internasional.

Normalisasi semakin cepat terwujud melihat dari sisi Indonesia dimana Presiden pada saat itu Jendral Besar Soeharto menginginkan perluasan pasar ekspor nonmigas Indonesia termasuk ke China dan keinginan menjadikan Indonesia sebagai ketua Gerakan Non-Blok.<sup>31</sup> Jelas untuk meraih tujuan tersebut menjalin hubungan diplomatik dengan China menjadi penting. Lima tahun

---

<sup>28</sup> Lin Mei, "The Economic Relations Between China and Indonesia and Mainland China's Investment in Indonesia," diakses dari [www6.cityu.edu.hk/searc/CSEA.../CSEA.../LinMei\(Eng\\_rev\).pdf](http://www6.cityu.edu.hk/searc/CSEA.../CSEA.../LinMei(Eng_rev).pdf), diakses pada 5 April 2012, pukul 16.23 WIB.

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Tuty Enoch Muas, *op.cit.*, h. 33.

<sup>31</sup> Syamsul Hadi, "Hubungan Indonesia-China di Era Pasca-Orde baru: Perspektif Indonesia," dalam *Merangkul China* ed. I Wibowo & Syamsul Hadi, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 54.



berselang, tepatnya tahun 1990 hubungan diplomatik Indonesia-China kembali dibuka yang ditandai dengan kunjungan resmi Perdana Menteri China Li Peng ke Indonesia pada tanggal 6-10 Agustus 1990 yang berkaitan dengan Kesepakatan Penyelesaian Kewajiban Hutang Indonesia ke China (*Agreement on the Settlement of Indonesia's Debt Obligation to China*) serta penandatanganan naskah mengenai pemulihan hubungan diplomatik (*Comminique on the Resumption of Diplomatik Relation between people's Republic of China and the Republic of Indonesia*) yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah persetujuan hubungan kerja sama dalam bidang ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan China.<sup>32</sup> Salah satu persetujuan kerjasama terkait dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* untuk pembentukan hubungan perdagangan anatar kedua negara oleh kamar dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Dewan Promosi Perdagangan International China, *China Council for the Promotion of International Trade* (CCPIT).<sup>33</sup>

Dengan kembali normalnya hubungan diplomatik Indonesia dan China begitupula dengan hubungan perdagangan kedua negara. Di awal tahun 1980an ekspor Indonesia ke China hanya 8 juta Dollar Amerika jauh lebih rendah daripada ekspor Indonesia ke negara Asia lainnya seperti Malaysia, Thailand ataupun Filipina. Dengan awal yang tidak terlalu baik, namun trend perdagangan terus meningkat dengan cepat sehingga perdagangan dengan China merupakan hal yang penting bagi keseimbangan neraca perdagangan Indonesia. Bahkan dengan waktu yang relatif singkat, China dengan cepat menjadi mitra besar Indonesia dengan peringkat lima besar negara tujuan ekspor dan impor Indonesia.<sup>34</sup> China pun berhasil melampaui Taiwan yang sebelumnya menjadi mitra dagang terbesar kelima Indonesia hingga akhir tahun 80an (setelah Jepang, Amerika Serikat, Singapura dan Korea). China dengan kebijakan yang lebih terbuka dalam perdagangan disertai pula dengan peningkatan industri yang pesat, hal ini terlihat

<sup>32</sup> Nurul Huda dan zulihar, "Perdagangan Bilateral Indonesia-China Periode 2000-2009," *Dikta Ekonomi*, Desember 2009, Vol. 6 No. 3, h. 187.

<sup>33</sup> Indah Retnoningsih. "Perkembangan Kerjasama Bilateral Ekonomi Indonesia Dan China Dari Tahun (1967 -2006) dalam lingkup pengaruh ACFTA di Kawasan ASEAN," diakses dari: <http://diplomacy945.blogspot.com/2010/06/perkembangan-kerjasama-bilateral.html>, diakses pada 30 Desember 2011, pukul 23.15 WIB.

<sup>34</sup> Imron Husin, "The Emergence of China: Some Economic Challenges to Indonesia," *Research Paper*, dipresentasikan pada AT10 Research Conference Tokyo, 3-4 February 2004, h. 4.

dari komoditas ekspor China yang dapat berkompetisi dengan produk yang sama dari negara lain dalam pasar domestik Indonesia dimana China mampu mengakomodasikan kebutuhan dan memenuhi permintaan dari berbagai kalangan konsumen Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri hubungan ekonomi merupakan faktor utama dalam pemulihan hubungan Indonesia dan China dengan perdagangan sebagai faktor penting dalam keberlanjutan hubungan kedua negara. Sejak tahun 80an perdagangan kedua negara mencapai nilai US\$ 500 juta per tahun namun tahun 2000 mampu mencapai US\$ 7,5 milyar atau dua kali lipat dari jumlah tahun sebelumnya. Tahun 2001, dengan perlambatan ekonomi dunia terjadi penurunan nilai perdagangan antara China dan Indonesia yang hanya mencapai US\$ 6,7 milyar. Perdagangan tahun 2002 mampu meningkat kembali namun lebih rendah dari tahun 2000 yang menyentuh angka US\$ 7,3 milyar.<sup>35</sup> China resmi menjadi partner dagang kelima terbesar Indonesia dan Indonesia berada pada urutan partner dagang ketujuh belas China.

Krisis finansial 1997 yang menghantam perekonomian Indonesia tidak disangka membawa hubungan Indonesia dan China semakin dekat. Besarnya arus modal yang keluar dan regulasi yang tidak baik serta pengawasan yang rendah dalam sistem perbankan membuat menurunnya perekonomian nasional yang ditandai dengan jatuhnya nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil tindakan dengan meningkatkan suku bunga secara drastis dan alhasil tingginya inflasi menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi. Tidak hanya itu, banyak perusahaan yang gagal membayar pinjaman mereka terutama yang berdasarkan nilai Dollar Amerika. Hal ini tentu berdampak pada jumlah pemutusan hubungan kerja yang memaksa Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri terdesak pula dengan banyaknya demonstrasi mahasiswa pada tahun 1998.

Menghadapi turbulensi ekonomi, Indonesia membutuhkan bantuan untuk memulihkan perekonomiannya. Bantuan IMF yang dianggap mampu mengatasi masalah tersebut ternyata sudah cukup terlambat. Hal ini bertolak belakang dengan China yang memberikan bantuan kepada Indonesia dan juga berjanji

---

<sup>35</sup> Anthony L. Smith, "From Latent Threat to Possible Partner: Indonesia's China Debate," *Asia-Pacific Center for Security Studies*, December 2003, h. 5.

untuk tidak mendevaluasi nilai mata uang Yuan.<sup>36</sup> Selama masa itu, China memberikan bantuan ekonomi senilai US\$ 200 juta kepada Indonesia dan China ikut berpartisipasi dalam rencana penyelamatan IMF.<sup>37</sup>

Dalam perjalanan perdagangan Indonesia-China pasca normalisasi juga berdampak akibat tantangan krisis Asia tahun 1997 tersebut. Sebelum krisis, ekspor Indonesia ke China terus meningkat hingga mencapai US\$ 2,7 milyar tahun 1997.<sup>38</sup> Tidak mengherankan banyak pengusaha memprediksikan ekspor ke China akan mencapai US\$ 4 hingga 5 milyar dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Namun sayangnya harapan tersebut terhalang dengan krisis finansial yang muncul dipertengahan tahun 1997. Ekspor Indonesia ke China selama krisis tidaklah menentu. Perlu dicermati, pada awal tahun 1998 fokus pemerintah Indonesia lebih mengarah pada perekonomian dalam hubungan bilateral dengan China. Peningkatan perdagangan antara kedua negara memperlihatkan pola hubungan pasca normalisasi antara Jakarta dan Beijing masih sebatas perdagangan dan investasi khususnya hingga krisis Asia.

Pasca krisis 1997, ditahun 1998 volume ekspor Indonesia kurang dari US\$ 2 milyar namun 2 tahun kemudian, tepatnya tahun 2000 volume ekspor meningkat kemudian tahun 2001 kembali turun hanya mencapai US\$ 2,2 milyar. Dengan tidak menentunya ekspor Indonesia, China mampu meraih surplus dalam neraca perdagangannya. Tahun 1998 merupakan surplus terbesar yang dicapai Indonesia dengan total US\$ 925 juta. Bagaimanapun sukses tersebut bukan karena peningkatan jumlah ekspor melainkan jumlah impor China yang menurun. Dalam perdagangan pasca turunnya Presiden Soeharto serta kerusuhan Mei yang melibatkan etnis Tionghoa ternyata masih memberikan surplus walaupun mengalami penurunan. Di tahun 1999, Indonesia kembali mencapai surplus perdagangan namun mengalami penurunan dengan jumlah US\$ 766 juta. Pada tahun ini pula Indonesia memiliki wajah presiden baru hasil Pemilihan Umum yaitu Presiden Abdurrahman Wahid yang cenderung mengarah ke timur daripada

---

<sup>36</sup> “Dinamika Pengaruh China dalam Kerja Sama Multilateral di Kawasan Asia Timur”, diakses dari: <http://morentalisa.wordpress.com/2012/01/18/dinamika-pengaruh-China-dalam-kerja-sama-multilateral-di-kawasan-asia-timur/>, diakses pada 15 April 2012, pukul 23.34 WIB.

<sup>37</sup> Eduardus, “Working Paper: Amerika Serikat dan Krisis Finansial Asia 97-98,” diakses dari: <http://coretcoretkuliah.wordpress.com/2011/01/12/working-paper-amerika-serikat-dan-krisis-finansial-asia-97-98/>, diakses 17 April 2012, pukul 21.45 WIB.

<sup>38</sup> Chongbo Wu, *loc.cit.*, h. 119.

barat dan hal ini semakin menjamin hubungan Indonesia dan China semakin membaik.<sup>39</sup> Selain alasan politik akibat disintegrasi Timor-Timur, alasan ekonomi tentunya menjadi faktor arah kebijakan luar negeri era Gusdur mengarah ke China. Kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dilakukan melalui kepercayaan domestik dan internasional dalam pemerintahan Gusdur khususnya komunitas Tionghoa Indonesia dengan komunitas Bisnis China.<sup>40</sup> Kebijakan ini dimaksudkan dengan pemikiran bahwa pemulihan ekonomi domestik dapat dipercepat dengan kembalinya kepercayaan etnis China Indonesia untuk berbisnis kembali di Indonesia pasca krisis dan peristiwa 1998.

Hubungan bilateral dalam ekonomi antara China dan Indonesia pada masa presiden Wahid terus meningkat terutama dalam perdagangan periode 1999/2000. Menurut data BPS ekspor China ke Indonesia tahun 2000 sebesar US\$ 3,06 milyar, naik sebesar 60% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar US\$ 906 juta. Untuk tahun 2001 sampai bulan September sebesar US\$ 2,12 milyar turun 6,19%, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US\$2,18 milyar. Neraca perdagangan Indonesia-China selama ini menunjukkan surplus untuk Indonesia, yang pada tahun 2000 mencapai nilai sebesar US\$ 1,34 milyar. Dalam tahun 2000, Indonesia merupakan negara urutan ke 14 sebagai negara tujuan ekspor China, dan urutan ke 13 sebagai negara sumber impor China.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Ben Perkasa Drajat, "Skenario Diplomasi Presiden Gus Dur [Scenario for President Gus Dur's Diplomacy]," *Panji Masyarakat*, 17 November 1999, No. 31, h. 21.

<sup>40</sup> Rizal Sukma, "Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort amid Uncertainties," diakses dari: [www.nids.go.jp/english/publication/joint\\_research/series4/.../4-5.pdf](http://www.nids.go.jp/english/publication/joint_research/series4/.../4-5.pdf), diakses pada 17 April 2012, pukul 02.01 WIB.

<sup>41</sup> Nurul Huda dan Zulihar, *loc.cit.*, h. 188.

Tabel 2.1

Tabel Ekspor-Import Indonesia ke China 2000-2006 (USD 000)

Year	Petroleum & Natural Gas				Non Petroleum & Natural Gas				Total Volume	
	Exports	%	Imports	%	Exports	%	Imports	%	Exports	Imports
2000	14,367	23.13	6,019	17.96	47,757	76.87	27,495	82.04	62,124	33,515
2001	12,636	22.44	5,472	17.67	43,685	77.56	25,490	82.33	56,321	50,962
2002	12,113	21.19	6,526	20.86	45,064	78.81	24,763	79.14	57,159	31,289
2003	13,651	21.83	7,630	23.06	48,876	78.17	25,490	76.94	62,527	33,086
2004	15,645	21.86	11,732	25.22	55,939	78.14	34,792	74.78	71,585	46,525
2005	19,231	22.13	17,457	28.2	66,428	77.87	40,243	71.8	85,660	57,701
2006	21,188	21.04	18,975	31.07	79,502	78.96	42,103	68.93	79,502	61,078

Sumber: Badan Pusat Statistik

Walaupun secara diplomatik Indonesia lebih terbuka terhadap China baik secara budaya dan anti diskriminasi terhadap kaum Tionghoa, surplus Indonesia pada tahun 2000 mengalami penurunan kembali menjadi US\$ 745 juta bahkan tahun 2001 mengalami penurunan yang sangat signifikan mencapai US\$ 357 juta.<sup>42</sup> Trend Penurunan surplus perdagangan dengan China akan membahayakan keseimbangan neraca perdagangan Indonesia karena pada saat itu Indonesia tergantung pada surplus perdagangan untuk menjaga posisi neraca perdagangan saat itu.

Perdagangan yang dilakukan Indonesia-China baik pada industri migas maupun non migas selama periode 2000-2006, Indonesia mengalami surplus perdagangan yang pasang surut. Pada tahun 2003, Indonesia menikmati surplus sebesar US\$ 29,441 ribu tetapi nilai surplus tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2006 surplus perdagangan Indonesia terhadap China sebesar US\$ 18,424 ribu. Import migas Indonesia dari China mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu dari US\$ 6,019 Ribu pada tahun 2000 menjadi US\$ 18,975 ribu pada tahun 2006 yang mengalami kenaikan kurang lebih 300%. Sedangkan untuk impor non migas kondisi sebaliknya terjadi yaitu terjadi penurunan dari periode 2000 sampai dengan 2002 setelah itu sejak tahun 2003 hingga 2006 mengalami kenaikan. Perkembangan Ekspor non migas selama periode 2000-2006 hanya satu periode ekspor Indonesia ke China yang mengalami penurunan yaitu tahun 2001 dengan nilai US\$ 43,685 ribu sedangkan sebelumnya tahun 2000 bernilai US\$

<sup>42</sup> Imron Husin, *loc.cit.*, hal. 3

47,757 ribu periode selanjutnya ekspor non migas Indonesia ke China terus mengalami peningkatan hingga tahun 2006.<sup>43</sup>

Tidak hanya perdagangan yang menjadi target China dalam kerjasama dengan Indonesia. Banyak investasi yang ditanam pihak China di Indonesia dimana ada sekitar 800 investor China yang berinvestasi dengan nilai mencapai US\$ 2 milyar setara dengan dua kali lipat investasi Indonesia di China.<sup>44</sup> Kebijakan yang berorientasi pada China tetap dilakukan Presiden Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Presiden Gusdur pada Juli 2001. Selama kunjungan kenegaraan tahun 2002 ke China, Presiden Megawati telah berhasil meningkatkan kerjasama bilateral di semua sektor terutama energi dan pertanian.<sup>45</sup> Upaya Megawati merupakan fitur kunci yang membawa misi penjualan gas alam (LNG) ke provinsi Guangdong China yang akhirnya menghasilkan kesepakatan Indonesia mensuplai gas LNG ke China, serta terjadi kesepakatan Petro China mengakuisisi ladang minyak Devon Energy dan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) menguasai beberapa aset minyak dan gas Indonesia.<sup>46</sup> Perdagangan bilateral pada tahun 2002 meningkat hingga US\$ 8 juta dan investasi kumulatif China di Indonesia meningkat 25 kali menjadi US\$ 8,8 juta hingga akhir tahun 2003.<sup>47</sup> Tahun 2002 merupakan tahun ASEAN dan China menandatangani kesepakatan kerjasama perdagangan bebas yang dimulai dengan program *Early Harvest Program* (EHP). Pada masa pelaksanaan tahap awal ACFTA atau EHP, ekspor Indonesia ke China meningkat hingga 232,20% dari tahun 2003 atau sekitar US\$ 12,6 juta sedangkan impor dari China meningkat hanya sebesar 38,67%.<sup>48</sup>

Pada tahun 2004, Indonesia kembali memiliki presiden baru yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang masih menerapkan kebijakan aktif menjalin kerjasama dengan China. Secara keseluruhan total volume perdagangan Indonesia dan China pada tahun 2004 terhitung menjadi US\$ 13,47 milyar atau meningkat

---

<sup>43</sup> Nurul Huda dan Zulihar, *loc.cit.*, h. 189.

<sup>44</sup> Anthony L. Smith, *loc.cit.*, hal. 5.

<sup>45</sup> "China Pledges \$400m to Indonesia," diakses dari BBC News, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1891007.stm>, March 24, 2002, diakses pada 10 April 2012, pukul 13.40 WIB.

<sup>46</sup> Hadi Soesastro, "China-Indonesia Relations and the Implications for the United States," *USINDO Report*, November 7, 2003.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Daniel Pambudi dan Alexander C. Chandra, *loc.cit.*, (Jakarta: Institute for Global Justice, 2006), h. 37.

sebesar 31,8 persen dari tahun sebelumnya.<sup>49</sup> Total volume perdagangan melonjak hingga US\$ 16,8 juta pada tahun 2005.<sup>50</sup> Menalaah lebih lanjut pertumbuhan perdagangan dari 2003 tersebut dapat dikatakan terpengaruh akan kerjasama *Early Harvest Program*, yaitu tahap awal dari kerangka kesepakatan kerjasama ASEAN dan China dimana China memberikan akses mudah dengan membebaskan atau menurunkan tarif pertanian ASEAN masuk ke China.

Indonesia dan China menyadari bahwa satu sama lain merupakan mitra ekonomi yang potensial. Dari perspektif Indonesia, penduduk China yang mencapai 1,2 milyar jiwa merupakan potensi ekonomi yang sangat potensial untuk digali lebih dalam. Namun di sisi lain, kekhawatiran pemerintah Indonesia dengan masuknya China ke dalam WTO pada tahun 2001 terkait dengan peningkatan daya saing China di pasar dunia yang dapat menjadi pesaing bagi ekspor Indonesia. Meskipun ada peningkatan angka perdagangan, perdagangan bilateral Indonesia-China masih relatif kecil. Melihat dari sisi keunggulan komperatif yang dimiliki dapat dikatakan relatif sama sehingga ekonomi Indonesia dan China tidak bersifat komplementer tetapi cenderung bersaing. China sendiri tentu juga melihat faktor populasi yang besar Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi ekspor produk mereka namun China juga melihat sumber daya alam yang melimpah di Indonesia sebagai kekuatan atau amunisi tambahan untuk mencapai tujuannya menjadi kekuatan dunia melalui jalan damai.<sup>51</sup>

Berbagai strategi dilancarkan untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan China dimana Pada tahun 2005, Presiden China Hu Jintao mengunjungi Jakarta pada bulan April terkait dengan perayaan hari peringatan Konferensi Asia Afrika ke-50 di Bandung. Pada pertemuan tersebut, Presiden Hu Jintao dan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono sepakat untuk mengeluarkan satu pernyataan bersama mengenai Pembentukan Kemitraan Strategis antara

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> "China, Indonesia Agree to Intensify Economic Cooperation," *Xinhua News Agency*, Diakses dari: <http://english.sina.com/China/1/2006/1006/91073.html>, diakses pada 11 April 2012, pukul 19.56 WIB.

<sup>51</sup> Wang Jiang Yu, "Legal and Policy Considerations of China-ASEAN FTA: The Impact on the Multilateral Trading System, dalam H.K Leong and S.C.Y Ku, eds., *China and Southeast Asia: Gobar Changes and Regional Challenges*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies and Center for Southeast Asian Studies, Sun Yatsen University, 2005), h. 53.

China dan Indonesia. Tidak hanya itu, China juga memberikan kesepakatan pinjaman dana sebesar US\$ 300 juta dalam bentuk kredit pembeli dan dukungan pengajaran bahasa China.<sup>52</sup> Dalam hubungan ekonomi pun hubungan China dan Indonesia semakin membaik, Penandatanganan kesepakatan *strategic partnership agreement* diharapkan mampu meningkatkan hubungan Indonesia dan China ke level yang lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan perdagangan antar kedua negara. Dalam artikel 2 *the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The People's Republic of China on Expanding and Deepening Bilateral Economic and Trade*, menyatakan<sup>53</sup>:

*Cooperation based on equality and mutual benefit and in line with market rules, the Parties shall actively encourage enterprises from both countries to expand bilateral trade volume, stabilize and promote trade between the two countries in large commodities, large machinery & electronic products as well as high value-added products, improve trade quality and level, and continue to push forward deepened and sustained growth of trade between the two sides.*

Dalam perjanjian tersebut memfokuskan pada pertanian, infrastruktur, industri, pengembangan energi, perikanan, kawasan pengolahan industri dan proses ekspor, kesehatan dan medis, pariwisata termasuk promosi, pengembangan produk, keamanan produk, resolusi perdagangan dan bidang lainnya yang termasuk dalam perjanjian. Pelaksanaan perjanjian ini bagaimanapun masih sangat hati-hati dinilai oleh kedua belah pihak dalam menetapkan rencana strategis secara rinci.

Dalam perdagangan komoditas, Indonesia telah merasakan surplus perdagangan dengan China namun struktur perdagangan bilateral kini telah berubah dan hal ini menyebabkan berbagai kekhawatiran. Berbeda dengan ketika hubungan komersil dimulai, kini Indonesia yang hanya mampu mengekspor bahan baku dan produk olahan pertama seperti minyak mentah, bubur kertas, kayu gelondongan, dan minyak sawit. Sementara itu, impor Indonesia dari China sekarang merupakan produk olahan atau produk jadi seperti mesin, elektronik, tekstil dan motor. Produk-produk China mau tidak mau harus diakui akan

<sup>52</sup> "China and Indonesia seal strategic pact" diakses dari: [http://www.nytimes.com/2005/04/25/world/asia/25iht-Indonesia.html?\\_r=1](http://www.nytimes.com/2005/04/25/world/asia/25iht-Indonesia.html?_r=1), diakses pada 15 April 2012, pukul 24.05 WIB.

<sup>53</sup> Martina Angelika Purba, "The Rise of China Economic Power: China Growing Importance to Indonesian Economy," dalam *International Institute of Social Studies*, 2012, h. 20.



mengancam manufaktur lokal yang tergerus akan produk impor China. pertumbuhan China adalah nyata, disatu sisi mengesankan namun di sisi lainnya juga merupakan hal yang menakutkan. Hal ini terlihat dari industri dalam negeri seperti tekstil dan alas kaki yang terus menurun terutama akibat kompetisi dengan produk China. Senada dengan industri tekstil dan alas kaki, industri teknologi rendah juga akan mengalami hal serupa.

Komposisi komoditas perdagangan antara Indonesia dan China cenderung rapuh bagi Indonesia. ekspor China ke Indonesia dari *primary product* hingga produk berteknologi rendah, menengah hingga tinggi dengan proporsi yang seimbang jumlahnya. Hal ini berbeda dengan ekspor Indonesia ke China didominasi *primary product* dan rendah teknologi. Sebagian besar ekspor Indonesia ke China merupakan bahan baku. Komoditas ekspor unggulan Indonesia ke China dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu: (i) produk olahan pertama (minyak mentah, bensin, gas alam, minyak sayur, bahan kimia); (ii) produk pertanian (karet, kayu, ikan, kakao); (iii) produk industri padat karya seperti tekstil, serat rami, kertas dan karton; (iv) industri rendah tenaga kerja (perlengkapan telekomunikasi, alkohol, polimer, hidrokarbon dan carboxylic acid). Komoditas tersebut memenuhi 84% dari total US\$ 2,2 milyar ekspor Indonesia ke China pada tahun 2001.<sup>54</sup> Oleh karena itu, komoditas ekspor Indonesia ke China relatif terbatas dan bergantung pada fluktuasi harga internasional. Bagaimanapun juga, dalam jangka pendek masih ada kemungkinan Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke China terutama untuk beberapa komoditas ekspor utama dimana Indonesia memiliki daya saing yang tinggi. Cepatnya pertumbuhan ekonomi China berdasarkan investasi asing diharapkan mampu meningkatkan impor China dalam produk olahan khususnya dari Indonesia. kesempatan lainnya datang dari semakin terbukanya pasar China setelah masuknya China ke WTO.

Berbicara mengenai komoditas ekspor Indonesia ke China tentu tidak terlepas membahas pula impor Indonesia dari negeri berpenduduk terpadat di dunia tersebut. Pasar Indonesia sangat terbuka terhadap berbagai komoditas impor China termasuk dalam komoditas yang sama dengan ekspor Indonesia ke China,

---

<sup>54</sup> Imron Husin, *loc.cit.*, h. 8.

termasuk komoditas yang cukup unggul Indonesia seperti pertanian dan *primary product*. Indonesia ternyata mengimpor produk minyak dan minyak mentah dengan nilai 17% dari total impor Indonesia serta 15% untuk komoditas pertanian. Hal ini sungguh mengesankan melihat Indonesia termasuk negara kuat dalam pertanian bahkan dalam hal minyak bumi. Komoditas impor lainnya terdiri dari campuran produk medium dan tinggi teknologi. Dalam hal ini harus diakui Indonesia belum mampu berkompetisi dikarenakan keterbelakangan teknologi. Beberapa komoditas tersebut banyak beredar luas dalam pasar Indonesia seperti motor, permesinan dan perlengkapannya, alat komunikasi dan tentu saja tekstil dan produk tekstil.

Dalam hal tekstil, kompetisi dari China sangatlah kuat dan terus memberikan ancaman yang sangat berarti bagi produk dalam negeri. Pada tahun 2001, nilai ekspor tekstil China ke Indonesia telah menyamai nilai ekspor tekstil Indonesia ke China yaitu sekitar US\$ 100 juta.<sup>55</sup> Kondisi realita industri tekstil Indonesia tidak menjamin mampu berkompetisi dengan produk China, hal ini dilihat dari tingkat teknologi dan mesin yang digunakan oleh industri manufaktur tekstil Indonesia yang belum mengikuti perkembangan teknologi industri tekstil. Hal ini tentu akan semakin diperparah dengan diberlakukannya ASEAN-China FTA dengan skema penurunan tarif hingga 0 persen pada tahun 2010.

## **II.2 Dinamika hubungan ekonomi ASEAN-China dan Proses Kepakatan ASEAN-China FTA**

Hubungan formal ASEAN dan China dimulai pada tahun 1991 setelah menggandeng Indonesia dan Singapore dalam hubungan diplomatik pada tahun 1990 serta hubungan diplomatik dengan Brunei setahun kemudian.<sup>56</sup> Hubungan ekonomi negara-negara ASEAN dan China yang semakin erat turut memperbaiki iklim politik diantara mereka yang terus menunjukkan arah positif. Perkembangan hubungan ekonomi ASEAN dan China mulai terlihat sejak era 90an terlebih pasca krisis Asia 1997 dan masuknya China ke dalam WTO pada tahun 2001. Peran dan

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 10.

<sup>56</sup> Ratna shofi Inayati, "Tata Politik dan Ekonomi Regional ASEAN-China," dalam *Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret kerja Sama*, ed. Rahadian T. Akbar, (Jakarta: Pusat Penelitian Politik lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia, 2011), h. 128.

posisi China bak pahlawan dan musuh di lain sisi dengan kedua peristiwa tersebut dimana ASEAN memiliki perspektif tersendiri menilai tindakan pemerintah Beijing pada tindakan dan strateginya tersebut.

Krisis finansial yang menimpa kawasan Asia serta tekanan akibat pertumbuhan ekonomi China yang terus berlanjut telah mendorong ASEAN untuk lebih mengutamakan stabilitas ekonomi domestik dan pertumbuhan ekonomi daripada ancaman keamanan eksternal. Sejak akhir 90an, kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara pada umumnya berkaitan dengan dampak pertumbuhan ekonomi China yang mengancam negara di kawasan Asia Tenggara. Untuk mengurangi kekhawatiran tersebut, China secara aktif berusaha mengajukan berbagai proposal untuk memenuhi kebutuhan negara-negara ASEAN akan stabilitas finansial, perdagangan dan investasi dengan dalih merupakan kebutuhan nasional China untuk mempererat hubungan ekonomi Sino-ASEAN serta untuk memperkuat perekonomian negara-negara Asia Tenggara. Dengan menekankan saling menguntungkan, China menerapkan kebijakan yang bertujuan mengurangi kekhawatiran regional dengan meyakinkan dan membangkitkan optimisme di kalangan pemimpin ASEAN bahwa China yang semakin kuat namun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara sekaligus dapat pula mengurangi rasa ketidakpercayaan negara ASEAN terhadap negeri China tersebut.

Sebelum memasuki tahun 90an, dapat dikatakan belum tercipta hubungan resmi antara ASEAN sebagai sebuah kelompok negara dengan China walaupun memiliki hubungan resmi dengan beberapa negara ASEAN secara individual yang berbentuk hubungan diplomatik. Sejak akhir tahun 80an, pemerintah Beijing sangat aktif untuk menciptakan hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota ASEAN sebagai tujuan akhir memiliki hubungan resmi dengan seluruh negara berbasis ASEAN.<sup>57</sup> Setelah berhasil menggandeng negara-negara Asia Tenggara dalam hubungan bilateral, China gencar melancarkan strategi untuk bekerjasama secara regional dengan ASEAN maupun secara bilateral dengan ASEAN. Pertumbuhan ekonomi China yang cepat antara tahun 80an dan 90an

---

<sup>57</sup> Sheng Lijun, "China-ASEAN Free Trade Area: Origins, Developments and Strategic Motivations," dalam *ISEAS Working Paper: International Politics & Security Issues*, 2003, No. 1, h. 1.

membuat arus perdagangan dan investasi ke Asia Tenggara meningkat namun hal tersebut masih relatif kecil dibandingkan dengan arus perdagangan dan investasi Jepang, Korea, Taiwan, Amerika Serikat dan Eropa Barat.<sup>58</sup> Namun, ketika krisis Asia melanda kawasan Asia Tenggara, China semakin mendekatkan diri. Dapat dikatakan krisis Asia 1997 sebagai *turning point* yang semakin mengakrabkan ASEAN dan China setelah kekuasaan barat benar-benar tidak bersahabat dengan negara di kawasan Asia Tenggara pada saat krisis. China muncul bak pahlawan ketika negara-negara Asia Tenggara membutuhkan bantuan ekonomi pasca krisis finansial tersebut.



Source: Chinese Academy of International Trade and Economic Cooperation.

Perdagangan antara ASEAN dan China terus meningkat dengan cepat, pasca hubungan formal terjalin antara ASEAN dan China pada tahun 1991, pertumbuhan perdagangan antara kedua belah pihak dari tahun 1991 dengan total 20,64 persen dengan nilai sekitar US\$ 16 milyar hingga meningkat dua kali lipat

<sup>58</sup> Anne Booth, "China's Economic Relations with Indonesia: Threats and Opportunities," dalam *School of Oriental and African Studies*, University of London, Oktober 2011, h. 2.

dalam jangka waktu empat tahun dengan nilai 42,14% di tahun 1995.<sup>59</sup> Ketika tahun 2000 pun peningkatan perdagangan terjadi sangat signifikan dimana menyentuh angka US\$ 40 milyar (grafik 2.1). Pertumbuhan perdagangan ASEAN-Sino terus berlanjut dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 15% dari tahun 1995 dan terus meningkat hingga 31,7% pada tahun 2002 dengan nilai sekitar US\$ 54,77 milyar. Dengan jumlah sedemikian rupa, ASEAN telah menjadi mitra dagang kelima terbesar China dan China terbesar keenam ASEAN.<sup>60</sup>

Hubungan Bilateral ekonomi antara ASEAN dan China terus meningkat pada abad 21 terutama sejak tahun 2000. Pasca masuknya China ke dalam WTO menjadi dilemma tersendiri bagi ASEAN. Menarik melihat pasar China yang besar tentu menjadi peluang bagi ASEAN untuk dapat memperluas jaringan ekspor mereka namun di sisi lain produk China yang tidak bersifat komplementer tentu menjadi saingan yang cukup tangguh dalam kawasan ekspor ASEAN. Namun China pandai melancarkan strateginya terhadap ASEAN dengan proposal mengenai perdagangan bebas ASEAN dan China di awal abad 21 tersebut. *Booming* perdagangan antara negara-negara tersebut baik dalam perdagangan barang dan jasa, investasi, khususnya investasi China di beberapa negara tetangga juga meningkat. Kerjasama ekonomi terus ditingkatkan baik dalam bentuk kerjasama pariwisata dan kordinasi keuangan juga terus ditingkatkan. China telah menjadi sumber utama perdagangan dan investasi asing bagi negara-negara ASEAN dan salah satu sumber utama bantuan asing kepada negara-negara anggota baru ASEAN khususnya Myanmar, Kamboja dan Laos.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Chen Wen, "ASEAN-China Trade Relations: Origins, Progress and Prospect," dalam *ASEAN-China Economic Relations*, ed. Saw Swee-Hock, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007), h. 69.

<sup>60</sup> Sheng Lijun, "China-ASEAN Free Trade Area: Origins, Developments and Strategic Motivations," *loc.cit.*, h. 3.

<sup>61</sup> Shen Hongfang and Chen Linglan, "China-Southeast Asian Economic Relations in the 21st Century: Evolving Features and Future Challenges," dalam *International Journal of China studies*, January 2010, Vol. 1, No. 1, h. 25-45.

Tabel.2.2 Sektor yang Meningkat dalam Ekspor ASEAN-China 2000

	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore US\$million	Thailand	Vietnam	Total
<b>Increase in ASEAN exports to China:</b>							
Food	-5.57	-4.86	42.05	-1.27	129.56	-6.02	153.90
Vegetable oil	42.97	505.54	4.21	38.47	2.83	20.88	614.91
Other agric products	139.26	145.65	12.27	72.91	290.77	30.08	690.95
Extractive	55.91	25.72	52.18	18.86	9.89	12.28	174.83
Textiles & apparel	735.35	465.62	68.54	101.93	1,698.77	9.39	3,079.59
Chemicals	94.75	186.37	14.54	369.29	164.89	9.05	838.90
Motor Vehicles	287.91	618.62	5.03	755.72	60.11	150.29	1,877.67
Elec machinery	28.02	495.07	58.82	1,344.15	230.28	0.30	2,156.63
Other manufactures	1,281.84	773.63	77.34	948.33	323.73	44.50	3,449.36
Services	-4.34	-4.07	-4.17	-9.21	-3.06	-3.72	-28.58
Total	2,656.09	3,207.28	330.80	3,639.18	2,907.76	267.04	13,008.15
<b>Increase in China exports to ASEAN:</b>							
Food	58.75	163.54	82.93	117.12	115.82	31.96	570.12
Vegetable oil	42.39	1.64	0.67	6.09	10.67	0.10	61.56
Other agric products	31.08	11.47	14.47	80.36	40.32	5.00	182.70
Extractive	18.03	1.90	0.00	-0.68	13.54	0.23	33.03
Textiles & apparel	402.76	307.61	622.66	58.62	869.89	240.71	2,502.25
Chemicals	97.98	105.69	179.24	13.94	196.81	31.32	624.97
Motor Vehicles	74.44	45.67	173.97	54.82	357.69	50.78	757.37
Elec machinery	114.31	361.36	813.43	-12.15	794.09	80.26	2,151.31
Other manufactures	527.94	453.95	1,169.78	329.84	742.79	499.15	3,723.45
Services	3.92	3.50	0.01	-4.02	-1.46	5.31	7.26
Total	1,371.60	1,456.34	3,057.17	643.94	3,140.16	944.81	10,614.02

Source: ASEAN-China Expert Group (2001)

Komoditas ekspor antara China dan ASEAN khususnya ASEAN-6 dapat dikatakan memiliki keunggulan komperatif yang hampir sama. Komposisi perdagangan terus mengalami perubahan yang signifikan sejak tahun 90an dengan penurunan perdagangan komoditas primer dan peningkatan perdagangan manufaktur khususnya mesin dan alat elektronik. Di awal 90an, China mengekspor mesin dan alat elektronik, minyak dan bahan bakar, kapas dan tembakau. Selain itu, komoditas utama lainnya terus meningkat di tahun 2001 seperti tekstil dan pakaian jadi, bahan logam dan produk logam, bahan kimia dan bahan bakar mineral. Sedangkan ASEAN mengekspor ke China berupa komoditas primer seperti minyak mentah dan bahan bakar, kayu, minyak sayur, bahan kimia dan alat elektronik pada awal perdagangan bilateral tahun 1991, namun memasuki abad 21, ekspor ASEAN telah mengalami perubahan ke produk manufaktur seperti mesin dan alat elektronik termasuk ekspor komponennya.<sup>62</sup> Komoditas ekspor lainnya seperti produk mineral, bahan kimia, plastik, bubur kertas dan

<sup>62</sup> Chia Siow Yue, "ASEAN-China Free Trade Area," *Working Paper*, dipresentasikan pada AEP Conference Hong Kong, 12-13 April 2004, h. 5.

kertas juga terus meningkat. Secara lebih detil, adapun ekspor utama tiap negara ASEAN-5 dan China terangkum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.3 China dan ASEAN-5 Top 5 ekspor**

Negara	Top 5 Ekspor
China	Tekstil dan produk tekstil, peralatan listrik dan mesin, barang-barang manufaktur , produk logam dan bahan dasar logam , sepatu.
Indonesia	Produk mineral, tekstil dan produk tekstil, kayu dan produk kayu, peralatan listrik dan mesin, barang antik dan kerajinan seni.
Malaysia	Peralatan listrik dan mesin, produk mineral, kayu dan produk kayu, minyak dan lemak, Plastik.
Philippines	Peralatan listrik dan mesin, tekstil dan produk tekstil, lemak dan minyak, perlengkapan makanan, logam dan produk logam
Singapore	Peralatan listrik dan mesin, produk mineral, bahan kimia, logam dan produk logam, Optik, alat musik
Thailand	Peralatan listrik dan mesin, tekstil dan produk tekstil, perlengkapan makanan, Plastik, sayur dan buah

Source: *China Customs Statistics Yearbook* (various issues).<sup>63</sup>

Dengan semakin lengketnya hubungan ASEAN dan China, jalinan hubungan ekonomi antar kedua negara terus dipererat melalui suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN-China yang meliberalisasi semua sektor perdagangan. Dari sebuah ide yang diajukan Perdana Menteri China Zhu Rongji pada tahun 2000 untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan integrasi sehingga dibutuhkan suatu bentuk area perdagangan bebas antara China dan ASEAN menjadi pemikiran ASEAN yang kemudian menjadi sebuah proposal dalam pertemuan kepala negara ASEAN dan China di Brunei pada tahun 2001 yang akhirnya menjadi sebuah kesepakatan kerjasama yang menyepakati pelaksanaan ASEAN-China Free Trade Area pada tahun 2010.<sup>64</sup>

### II.2.1 Proses Terbentuknya ACFTA

Pasca krisis finansial 1997, ASEAN menyadari perlunya kawasan yang lebih stabil sehingga kerjasama ekonomi dengan negara lain khususnya kawasan terdekat Asia Timur menjadi pilihan yang tepat. Dengan kerangka ASEAN+3,

<sup>63</sup> Jiang Yang, "China's Foreign Economic Policy Making and Cooperation with Asean: a Case Study of The Asean-China Free Trade Agreement," *Tesis*, Department of Political Science, National University Of Singapore ,2004, h. 27.

<sup>64</sup> Chen Wen,*op.cit.*, h. 72.

ASEAN menjalin kerjasama yang kuat dengan negara-negara seperti China, Jepang dan Korea Selatan. Dengan semakin meningkatnya perekonomian China, pemerintah China pun mulai mereformasi perekonomian dan mulai membuka diri dengan masuk ke World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001. Untuk memperkuat posisinya di kawasan, China menggandeng ASEAN dalam berbagai kerjasama. Hal ini juga dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara akan ancaman dampak dari pertumbuhan China. China aktif mengajukan proposal untuk memenuhi kebutuhan negara-negara ASEAN akan stabilitas keuangan, perdagangan dan investasi yang bertujuan untuk mengurangi kekhawatiran ASEAN serta merupakan salah satu kepentingan China untuk menjaga hubungan ekonomi China-ASEAN. Salah satu proposal yang diajukan adalah kerjasama perdagangan yang lebih intensif antara ASEAN dan China yang tertuang dalam skema ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) sebagai respon atas krisis ekonomi Asia tahun 1997.<sup>65</sup>

ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) merupakan perdagangan bebas yang dibentuk oleh negara-negara berkembang. Blok perdagangan ini telah menimbulkan berbagai prediksi dari model mimpi neoliberal dari keajaiban pertumbuhan Asia hingga bentuk idealis dari model regionalisme atau bentuk alternatif perdagangan selatan-selatan antara negara-negara berkembang.<sup>66</sup> ACFTA merupakan perjanjian yang paling cepat terbentuk dari seluruh negosiasi FTA yang dilakukan China. Perdagangan bebas ASEAN-China akan menjadi kawasan perdagangan global terbesar ketiga setelah Uni Eropa dan NAFTA. Walaupun demikian, masih ada kekhawatiran apakah ACFTA yang beranggotakan negara-negara berkembang dengan struktur ekonomi akan berhasil dan efektif dalam mendorong integrasi ekonomi regional.<sup>67</sup>

Kerjasama ASEAN-China *Free Trade Area* pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri China Zhu Rongji dalam ASEAN+3 Meeting di Singapura pada November 2000 dan pada ASEAN-China *Economic Cooperation Meeting*

---

<sup>65</sup> Mandala Sukarto Purba, "Towards Regionalism Through The ASEAN - China Free Trade Area: Prospects and Challenges," *Tesis*, The Faculty of Law, The University of The Western Cape, May 2006, h. 15.

<sup>66</sup> Natividad Y. Bernardino, "The ASEAN-China Free Trade Area: Issues and Prospects," *Regional Workshop Paper*, Asia Pacific Network on Food Security, Manila, 3-9 November 2004, h. 3.

<sup>67</sup> *Ibid.* h. 5.



pada Agustus 2001.<sup>68</sup> Usulan perjanjian ini juga dikemukakan oleh pemerintah Singapura, sementara negara-negara ASEAN lainnya menentang pembentukan ACFTA tersebut. Mereka cenderung lebih mendukung pembentukan FTA yang mencakup wilayah yang lebih luas termasuk Jepang dan Korea Selatan. Namun kedua negara tersebut saat itu belum siap.

Pada tahun 2001, China mengusulkan adanya perdagangan bebas antara ASEAN dan China dimana pada waktu itu China mengusulkan suatu kawasan perdagangan bebas dengan ASEAN dalam konsep *The China-ASEAN Free Trade Area* yang ditargetkan akan terwujud pada tahun 2010 untuk 6 anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam) dan tahun 2015 untuk 4 anggota baru ASEAN (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam).<sup>69</sup> Dalam membentuk ACFTA, para kepala negara anggota ASEAN dan China bertemu untuk membahas pembentukan perdagangan bebas pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.

Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA, para kepala negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* antara ASEAN dan China di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 November 2002. Indonesia telah meratifikasi *Framework Agreement ASEAN-China FTA* melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004. Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diumumkan sejak ditandatanganinya *Trade in Goods Agreement* dan *Dispute Settlement Mechanism Agreement* pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos. Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007. Sedangkan Persetujuan Investasi ASEAN-China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.<sup>70</sup> Secara runut, proses pembentukan ACFTA terangkum dalam tabel 2.4 berikut:

---

<sup>68</sup> Ratna Shofi Inayati, *op.cit.*, h. 145.

<sup>69</sup> Natividad Y. Bernardino, *loc.cit.*, h. 1.

<sup>70</sup>Diakses dari: <http://www.aseansec.org/64.htm>, diakses pada 24 Maret 2012, pukul 16.25 WIB.

Tabel 2.4 Timeline pembentukan ACFTA

Tanggal	Kegiatan	Tempat
6 Nov 2001	China dan anggota ASEAN memulai negosiasi pembentukan ACFTA	Brunei Darussalam
4 Nov 2002	Penandatanganan <i>Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation</i> antara ASEAN dan China	Phnom Penh, Kamboja
1 Jan 2004	Pelaksanaan Early Harvest Program (EHP), penurunan tarif pada produk tertentu dalam jangka waktu 3 tahun dengan tarif 0 persen mulai 1 januari 2006.	
29 Nov 2004	Penandatanganan <i>The China-ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (DSM) dan the Agreement on Trade in Goods</i>	KTT-10 China-ASEAN Vientiane, Laos
July 2005	Implementasi <i>agreement on Trade in Goods under Framework Agreement on ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation.</i>	
Januari 2007	Penandatanganan <i>agreement on Trade in Services between China and ASEAN</i>	KTT-12 China-ASEAN Cebu, Filipina
15 Agust 2009	Penandatanganan <i>the Investment Agreement ASEAN-China</i>	Bangkok, Thailand
1 Jan 2010	Implementasi penuh ACFTA	

Sumber: ASEAN Sekretariat

Pembentukan perdagangan bebas ASEAN-China yang tertuang dalam isi pembukaan dari kesepakatan ACFTA menyiratkan beberapa faktor penyebab terjadinya kesepakatan ACFTA<sup>71</sup> yaitu:

- a. Adanya hambatan-hambatan ekonomi antar negara dan berkeinginan memperdalam hubungan ekonomi diantara para pihak
- b. Berkeinginan untuk mendapatkan biaya-biaya yang lebih rendah
- c. Meningkatkan perdagangan dan investasi intraregional
- d. Meningkatkan efisiensi ekonomi
- e. Menciptakan suatu pasar yang besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar bagi pelaku usaha dari para pihak

<sup>71</sup> "Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia tenggara dan RRC," ( Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2003), h. 1.

f. Meningkatkan daya tarik para pihak dalam modal dan kemampuan.

Kesepakatan ACFTA mencakup tiga hal yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa dan investasi. Dalam kesepakatan ACFTA ini memuat tujuan terbentuknya perdagangan bebas tersebut dalam pasal satu<sup>72</sup> yaitu:

- a) Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi diantara para pihak.
- b) Meliberalisasikan secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu rezim investasi yang transparan, liberal dan mudah.
- c) Menggali bidang-bidang baru dan langkah-langkah pengembangan yang tepat untuk kerjasama ekonomi yang lebih erat diantara para pihak
- d) Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari anggota ASEAN yang baru dan menjembatani perbedaan pembangunan diantara para pihak.

Untuk mencapai tujuan dari kesepakatan ACFTA, langkah-langkah kerjasama ekonomi menyeluruh yang dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun disepakati oleh negara-negara peserta ACFTA. Adapun langkah-langkah yang diambil sebagai berikut<sup>73</sup>:

- a. Penghapusan secara progresif hambatan-hambatan tarif dan non tarif dalam semua perdagangan barang-barang.
- b. Liberalisasi perdagangan barang dan jasa secara progresif dengan cakupan sektor yang signifikan
- c. Pendirian rezim investasi yang terbuka dan berdaya saing yang memfasilitasi dan mendorong investasi dalam perdagangan bebas ASEAN-China
- d. Ketentuan perlakuan khusus dan berbeda serta fleksibilitas untuk negara-negara anggota ASEAN baru
- e. Ketentuan fleksibilitas bagi para pihak dalam negosiasi ASEAN-China FTA untuk menanggulangi bidang-bidang yang sensitive dalam sektor-sektor barang, jasa dan investasi dimana fleksibilitas akan dinegosiasikan dan disepakati bersama berdasarkan prinsip timbal-balik dan saling menguntungkan.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*, h. 2-3.

- f. Pembentukan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan investasi yang efektif termasuk tapi tidak terbatas pada penyederhanaan prosedur kepabeanan dan pengembangan peraturan pengakuan yang saling menguntungkan
- g. Perluasan kerjasama ekonomi dalam bidang-bidang yang mungkin disepakati bersama diantara para pihak yang akan melengkapi pendalaman hubungan perdagangan dan investasi antara para pihak dan perumusan rencana-rencana aksi dari sektor-sektor yang telah disepakati
- h. Pembentukan mekanisme yang tepat untuk maksud efektivitas bagi implementasi persetujuan ini.

Dalam kesepakatan ini semua sektor turut berperan termasuk sektor bisnis. Setiap negara membutuhkan promosi dan fasilitas atas kerjasama mereka lebih jauh dan menggunakan kesempatan-kesempatan bisnis yang lebih besar berdasarkan apa yang disepakati dalam ACFTA. Tidak bisa dipungkiri adanya perbedaan tingkat pembangunan ekonomi khususnya anggota baru ASEAN sehingga fleksibilitas mutlak diperlukan.

### **II.2.1.1 Tahapan penurunan dan penghapusan tarif**

Pelaksanaan kesepakatan ACFTA tidak diterapkan secara bersamaan namun memiliki tahapan-tahapan dalam implementasinya. Proses penurunan atau penghapusan tarif bea masuk dilakukan dengan pendekatan bilateral, dimana setiap negara menjadwalkan penurunan atau penghapusan tarif dan menyusun produknya masing-masing. Sehingga dalam implementasinya akan terjadi perbedaan tarif maupun cakupan produknya. Tahapan pelaksanaan program penurunan dan penghapusan tarif bea masuk terbagi menjadi 3, yaitu<sup>74</sup>:

#### **1. Early Harvest Program (EHP)**

*The Early Harvest Programme (EHP)*, tujuannya adalah mempercepat implementasi penurunan tarif produk dimana program penurunan tarif bea masuk ini dilakukan secara bertahap dan secara efektif dimulai pada 1 Januari 2004 untuk produk EHP dan menjadi 0% pada 1 Januari 2006.<sup>75</sup> EHP memfokuskan

<sup>74</sup> Sulistyio Widayanto, "Negosiasi untuk Mengamankan Kepentingan Nasional di Bidang Perdagangan," *Komite Perdagangan Internasional*, 2007, No. 43, h. 25.

<sup>75</sup> Ann Pimentel-Prenio, Majah-Leah V. Ravago and Erlinda Medalla, "THE AFTA-CEPT and the ASEAN-China Early Harvest Program: An Assessment of Potential Short-run Impact," *MPRA*

pada hasil pertanian baik produk segar maupun hasil olahan kecuali produk sensitif dari anggota perjanjian. Tarif dalam mekanisme EHP terangkum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.5 Jadwal Penurunan Tarif EHP**

<b>Tarif MFN juli 2003</b>	<b>Not later than 1 Jan 2004</b>	<b>Not later than 1 Jan 2005</b>	<b>Not later than 1 Jan 2006</b>
Higher than 15 %	10%	5%	0%
5%-15%	5%	0%	0%
Less than 5%	0%	0%	0%

Sumber: *ASEAN Secretariat*

Produk-produk Indonesia yang masuk dalam skema penurunan tarif meliputi: Chapter 01 s.d 08: Binatang hidup, ikan, produk olahan susu, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan. Kesepakatan Bilateral (Produk Spesifik) antara lain kopi, minyak kelapa/CPO, Coklat, Barang dari karet, dan perabotan.<sup>76</sup>

## 2. Normal Track

Pada tahap ini termasuk dalam perdagangan barang yang penurunan tarif bea masuk dimulai tanggal 20 Juli 2005, yang menjadi 0% pada tahun 2010 bagi ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk CLMV. Adapun penurunan tarif tertera dalam tabel 2.6 berikut:

*Paper*, 22 January 2011, No. 28330, Diakses dari: <http://mpr.ub.uni-muenchen.de/28330/>. Diakses pada 24 Januari 2012, pukul 03.57 WIB.

<sup>76</sup> Diakses dari: [www.ditjenkpi.depdag.go.id](http://www.ditjenkpi.depdag.go.id), diakses 23 Februari 2012, pukul 15.35 WIB.

Tabel 2.6 Penurunan Tarif Normal Track

X: Applied MFN Tariff Rate	ACFTA Preferential Tariff Rate (Not later than January 1)			
	2005	2007	2009	2010
$X \geq 20\%$	20	12	5	0
$15\% \leq X < 20\%$	15	8	5	0
$10\% \leq X < 15\%$	10	8	5	0
$5\% < X < 10\%$	5	5	0	0
$X \leq 5\%$	Standstill	Standstill	0	0

Source: ACFTA; MFN is Most Favored Nation; The first date of implementetions shall be July 1, 2005.

### 3. Sensitive Track

Tahap perdagangan barang yang akan dilakukan penurunan tarif mulai tahun 2012, dengan penjadwalan bahwa maksimum tarif bea masuk pada tahun 2012 adalah 20% dan dilanjutkan dengan penghapusan bertahap yang akan menjadi 0-5% mulai tahun 2018. Produk Indonesia yang masuk kategori tersebut yaitu 304 Produk (HS 6 digit) antara lain: tas kulit, dompet kulit, sepatu sport, sepatu kasual, sepatu kulit, Kacamata, alat musik tiup, alat musik petik, alat musik gesek, boneka, alat olah raga, alat tulis, besi dan baja, suku cadang, alat angkut glokasida dan alkaloid nabati, senyawa organik, antibiotik, kaca, barang-barang plastik.<sup>77</sup>

Produk-produk *Highly Sensitive* akan dilakukan penurunan tarif bea masuk pada tahun 2015, dengan maksimum tarif bea masuk pada tahun 2015 sebesar 50%.<sup>78</sup> Produk-produk Indonesia yang masuk kategori ini adalah produk HSL sebesar 47 Produk (HS 6 digit), yang antara lain terdiri dari: Produk Pertanian, seperti: Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; dan Produk *Ceramic Tableware*.<sup>79</sup>

Untuk mendapatkan preferensi penurunan tarif dengan menggunakan ketiga skenario tersebut disepakati Pengaturan Surat Keterangan Asal Barang (SKA) atau Rules of Origin (ROO) dengan ketentuan kandungan lokal ASEAN

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Natividad Y. Bernardino, *loc.cit.*, h. 2.

<sup>79</sup> "Dinamika Perdagangan Bebas ASEAN," diakses dari: [www.bsn.go.id/files/.../genapsnibuku/BAB\\_1](http://www.bsn.go.id/files/.../genapsnibuku/BAB_1), di akses pada 1 Januari 2012, pukul 09.00 WITA.

China FTA sebesar 40% yang secara operasional menggunakan SKA Form E.<sup>80</sup> Penurunan dan penghapusan tarif bea masuk dalam Perdagangan Bebas ASEAN-China dilakukan melalui proses secara bertahap atas seluruh produk, hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kepentingan perlindungan terhadap produk Indonesia yang dianggap belum mampu untuk bersaing dengan produk negara peserta FTA.

Di dalam kerangka Agreement ASEAN-China *Comprehensive Economic cooperation*, China mengurangi tarif impor bagi produk ASEAN beberapa tahun sebelum negara-negara ASEAN memberlakukan hal yang sama dan membuka pasar mereka bagi produk ekspor China. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ASEAN keuntungan ekspor terhadap produk China dan memberikan kesempatan bagi produsen ASEAN agar lebih efisien dan produktif serta berharap China dapat menjadi importir utama bagi produk-produk ASEAN. FTA ASEAN-China tersebut merupakan suatu perkembangan yang besar karena kedua wilayah tersebut mencakup populasi penduduk yang besar 1,7 miliar dengan GDP gabungan sebesar US\$ 2 triliun.<sup>81</sup> China merupakan mitra terbesar ke-6 bagi ASEAN di bidang perdagangan dengan volume perdagangan sebesar 5% dari total perdagangan ASEAN, sedangkan ASEAN merupakan mitra dagang terbesar ke-5 bagi China.<sup>82</sup>

### II.3 Kesiapan Indonesia Menghadapi ACFTA

Dalam menyepakati suatu perjanjian perdagangan bebas tentunya ada kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh setiap negara termasuk Indonesia. Kesepakatan ASEAN-China FTA tentunya harus memberikan manfaat bagi Indonesia guna memenuhi kepentingan yang ingin dicapai. Optimis dan pesimis mewarnai pemikiran masyarakat mengenai implementasi perdagangan bebas ini. Pelaksanaan kesepakatan perdagangan ACFTA ditenggarai akan bermakna besar bagi kepentingan geostrategik dan ekonomis Indonesia dan Asia Tenggara secara

<sup>80</sup> Firman Mutakin dan Aziza Rahmaniari Salam, "Dampak Penerapan ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) Bagi Perdagangan Indonesia," *Economic Review*, Desember 2009, No. 218, h. 7.

<sup>81</sup> Kevin G. Cai, "The ASEAN-China Free Trade Agreement and East Asian Regional Grouping," *Contemporary Southeast Asia*, December 2003, Vol. 25, No. 3, h. 387-404.

<sup>82</sup> Ratna Shofi Inayati, *op.cit.*, h. 146.

keseluruhan melihat pertumbuhan perekonomian China yang relatif pesat waktu itu menjadikannya salah satu aktor politik dan ekonomi yang patut diperhitungkan Indonesia dan ASEAN.<sup>83</sup> China yang menunjukkan kesan bersahabat dengan keinginan menjalin kerjasama dengan ASEAN semakin mempertegas keinginan China atas perubahan *image* China di mata negara-negara ASEAN. Tentu dibalik hubungan internasional ada kepentingan China yang dibawa dalam penjalinan kerjasama dengan ASEAN.

Beberapa kajian telah membahas peluang dan hambatan bagi pemerintah Indonesia menghadapi ACFTA. Dalam skema liberalisasi perdagangan barang, normal track dimulai tahun 2005 sehingga terjadi penurunan tarif terhadap produk-produk China yang masuk ke Indonesia begitu pula sebaliknya. Sebelum berlakunya kesepakatan ASEAN-China FTA, peredaran barang-barang China telah marak di wilayah Indonesia yang banyak dilakukan secara ilegal namun harus diakui konsumen menyukainya karena penampilan lebih menarik dan harga yang lebih murah. Walaupun demikian, pemerintah Indonesia memiliki peluang yang baik dalam perdagangan bebas ini jika dapat dimanfaatkan dengan baik. Menurut pemerintah ada setidaknya ada tiga peluang yang akan diraih, antara lain<sup>84</sup>: (1) penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan non tarif di China membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan ke negara yang penduduknya terbesar dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. (2) penciptaan rezim investasi yang kompetitif dan terbuka membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari China. (3) peningkatan kerjasama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas membantu Indonesia melakukan peningkatan pembangunan kapasitas, transfer teknologi, dan kapabilitas manajerial. Peluang tersebut tentu optimal jika didukung dengan kebijakan dan strategi yang tepat sasaran serta mendukung penuh kemajuan industri dalam negeri. Selama proses penurunan

---

<sup>83</sup> Alexander C Chandra, "Dilema Indonesia dalam ACFTA," diakses dari: <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/18/02352497/dilema.Indonesia.dalam.acfta>, diakses pada 29 Maret 2012, pukul 23.23 WIB.

<sup>84</sup> Latif Adam, "ACFTA Dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia China," diakses dari: <http://inspirasiablog.wordpress.com/2010/03/19/acfta-dalam-perspektif-hubungan-dagang-Indonesia-China/>, diakses pada 30 Maret 2012, pukul 23.43 WIB.



normal track sebelum implementasi ACFTA 2010, terlihat pemerintah hanya membuat kebijakan namun sasaran yang ingin dicapai jauh dari realita.

Indonesia masih dihadapkan pada lemahnya penguasaan teknologi, masih rendahnya kualitas SDM, tingginya tingkat suku bunga perbankan, dan disorganisasi struktur yang kian menyebabkan daya saing produk Indonesia, khususnya manufaktur, kian menurun. Dalam *World Competitiveness Yearbook* 2006-2008, daya saing Indonesia turun ke peringkat 51 dari 55 negara. Sementara dari *World Economic Forum*, daya saing Indonesia menduduki peringkat ke-54, di bawah negara-negara lain dalam kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Invansi produk China merupakan tantangan utama dari pemberlakuan ACFTA. Untuk mengurangi dampaknya, pola industrialisasi dan perdagangan produk industri atau manufaktur harus didasarkan pemenuhan kebutuhan domestik. Pada hakikatnya, FTA akan bermanfaat bagi suatu negara karena memberi efisiensi biaya perpindahan barang melalui proses integrasi jalur ekonomi negara dalam suatu kawasan. Namun, FTA mempunyai prasyarat tersedianya infrastruktur cukup. Infrastruktur masih menjadi wacana. Krisis listrik menjadi salah satu cermin belum menariknya Indonesia sebagai tempat menanamkan investasi di bidang infrastruktur. Juga biaya tinggi dalam tata niaga produk industri manufaktur Indonesia karena infrastruktur nasional yang buruk belum bisa dikurangi.

Pemenang Nobel 2008 Joseph Stiglitz mengatakan<sup>85</sup>, acuan utama pembukaan perdagangan bebas adalah kesiapan industri domestik. Dengan daya saing Indonesia yang masih rendah, bahkan di bawah negara-negara tetangga di ASEAN, tentu akan menjadi bumerang jika Indonesia ikut ACFTA yang segera diberlakukan. Akan amat bijaksana jika dalam kondisi sulit bersaing seperti ini, Indonesia membatasi masuknya produk asing dengan berusaha memenuhi kebutuhan sendiri lebih dulu. Kemandirian ekonomi suatu negara tidak lepas dari perencanaan yang baik terhadap kemampuan produksi domestik guna pemenuhan pasar domestik selain produksi keperluan ekspor berbahan baku lokal. Jika ini

---

<sup>85</sup> Aris Yunanto, "Januari 2010, China "Serbu" Indonesia," diakses dari <http://forum.detik.com/januari-2010-China-serbu-indonesia-t130700.html>, diakses pada 3 Juni 2012, pukul 12.05 WIB.

terjadi, pemanfaatan potensi lokal untuk domestik dan ekspor dapat optimal dan memberi manfaat perekonomian maksimal.

Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia melihat peluang yang akan didapat dari ACFTA terutama dari tahap awal *Early Harvest Program* yang mendukung ekspor pertanian Indonesia ke China. Pada tahun 2004, pemerintah melalui pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan bahwa ACFTA tidak mengancam industri lokal namun akan menciptakan peluang yang besar bagi ekspor produk Indonesia ke China.<sup>86</sup> Lalu jika melihat dari perdagangan barang apakah produk Indonesia mampu menunjukkan keunggulan kompetitifnya yang dapat menyaingi produk China. Tahap awal ACFTA, pemerintah Indonesia optimis akan meraih hasil positif dari perdagangan bebas ASEAN dan China baik dari pernyataan presiden di atas serta dukungan dari Menteri Perdagangan pada saat itu Dr. Mari Elka Pangestu yang menekankan bahwa implementasi ACFTA akan memperkuat perdagangan bilateral serta investasi antar kawasan, yang memperkuat *strategic partnership* antara Indonesia dan China.<sup>87</sup>

Pemerintah Indonesia seharusnya mampu menghadapi tantangan ACFTA melihat setiap era pemerintahan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Seharusnya dengan adanya rancangan tersebut dapat menjadi tolak ukur kemampuan Indonesia khususnya dalam peningkatan daya saing industri. Pemerintah Indonesia memiliki arah kebijakan pembangunan industri nasional mengacu kepada agenda dan prioritas pembangunan nasional Kabinet Indonesia Bersatu, yang dijabarkan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009. Dalam kerangka tersebut, maka visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia untuk menjadi sebuah negara industri tangguh di dunia dengan visi antara lain: menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional; menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat; menjadi wahana untuk memajukan

---

<sup>86</sup> Ivan Lim dan Philipp Kauppert, "Facing a Political Lock-In Situation with the ACFTA Which options for Indonesia?," *Freidrich-Ebert-Stiftung Indonesia.*, March 2010, h. 3.

<sup>87</sup> *Ibid.*

kemampuan teknologi nasional; menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat; dan menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat.

Indonesia juga memiliki tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu (1) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri; (2) Meningkatkan ekspor Indonesia dan pemberdayaan pasar dalam negeri; (3) Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian; (4) Mendukung perkembangan sektor infrastruktur; (5) Meningkatkan kemampuan teknologi; (6) Meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk; dan (7) Meningkatkan penyebaran industri.<sup>88</sup> Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Kementerian Perindustrian mengarahkan industri pada penguatan daya saing, pendalaman rantai pengolahan di dalam negeri serta dengan mendorong tumbuhnya pola jejaring (*networking*) industri dalam format klaster yang sesuai baik pada kelompok industri prioritas masa depan, yaitu: industri agro, industri alat angkut, industri telematika, maupun penguatan basis industri manufaktur, serta industri kecil-menengah tertentu.

Dalam jangka menengah, fokus pembangunan industri adalah penguatan dan penumbuhan klaster-klaster industri inti yang berjumlah sepuluh kelompok industri, yaitu: industri makanan dan minuman, industri pengolahan hasil laut, industri tekstil dan produk tekstil, industri alas kaki, industri kelapa sawit, industri barang kayu (termasuk rotan), industri karet dan barang karet, industri pulp dan kertas, industri mesin listrik dan peralatannya, serta industri petrokimia. Pengembangan sepuluh klaster industri inti dilakukan secara komprehensif dan integratif, yang didukung secara simultan dengan pengembangan industri terkait (*related industries*) dan industri penunjang (*supporting industries*).<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Fahmi Idris, "Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Nasional," Diakses dari: [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=215&Itemid=76](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=76). Di akses pada 22 Februari 2012, diakses 10.10 WIB.

<sup>89</sup> *Ibid.*

Dalam rangka ACFTA, beberapa strategi awal telah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia dengan serangkaian kebijakan dalam rangka menghadapi implementasi ACFTA tahun 2010 terutama dalam liberalisasi perdagangan barang, secara umum strategi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut<sup>90</sup>:

1. Meningkatkan efektivitas pengamanan pasar dalam negeri dari penyelundupan dan pengawasan peredaran barang dalam negeri melalui peningkatan pemberlakuan sejumlah instrumen yang sesuai dengan disiplin perjanjian internasional, seperti standar mutu, HaKI dan perlindungan konsumen, serta mencegah dumping dan lain-lain.
2. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penerbitan dan pemanfaatan dokumen surat keterangan asal (SKA) untuk ekspor dan impor.
3. Melakukan penguatan pasar ekspor, seperti pusat promosi perdagangan
4. Peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri.
5. Penanganan isu domestik lainnya, seperti membenahan tata ruang dan pemanfaatan lahan, infrastuktur dan energi, perluasan akses pembiayaan, perbaikan pelayanan publik, dan lain-lain.

Manis memang melihat sederetan strategi yang dipersiapkan oleh pemerintah namun tetap terlihat sangat normatif. Jika melihat ke lapangan apakah strategi itu berhasil masih menjadi dilema. Kondisi nyata terlihat masih marak masuknya barang-barang selundupan yang bebas dari pengamatan atau sengaja tidak diamati oleh pihak-pihak bea cukai. Dalam pelaksanaan strategi promosi ekspor yang dilakukan pemerintah tidak menjangkau kalangan yang seharusnya. Dengan strategi peningkatan ekspor tanpa *action plan* yang jelas tentu tidak akan bermanfaat. Adanya gedung Sarinah, SMESCO yang menjual aneka produk dalam negeri di setiap daerah di Indonesia masih kalah pamor dengan ITC maupun mall-mall yang ada.

Tidak jauh berbeda dengan promosi penggunaan produk dalam negeri. Apa mudahnya seruan penggunaan produk dalam negeri tanpa melihat bagaimana perkembangan produk itu sendiri. Memang kebijakan penggunaan batik setiap

---

<sup>90</sup> Ibnu Purna, Hamidi dan Prima, "ACFTA sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang Kompetitif," Diakses dari: [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=4375&Itemid=29](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4375&Itemid=29), di akses pada 25 Maret 2012, pukul 23.23 WIB.

Jumat itu berhasil namun tidak hanya batik produk Indonesia. Mudah-mudahan peredaran produk-produk China dengan harga yang relatif murah tentu peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri masih menjadi sekedar seruan jika produk Indonesia kurang inovasi dan relatif lebih mahal dengan produk negeri Tirai Bambu tersebut. kendala-kendala eksternal industri seperti infrastruktur dan kebutuhan energi setidaknya menjadi kunci keberhasilan industri dan produksi produk yang berdaya saing. Sehingga peran pemerintah sangat penting dalam penyediaan fasilitas bagi industri sehingga efisiensi dalam produksi mampu tercapai dan kompetisi harga bukan lagi masalah menghadapi produk China tersebut.

Dalam rangka mengantisipasi dampak implementasi ACFTA terhadap perekonomian nasional, pemerintah juga secara umum telah merumuskan dan menerapkan sepuluh kebijakan, yang meliputi<sup>91</sup>:

1. Mengevaluasi dan merevisi semua Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah kadaluwarsa dan menerapkannya secara wajib dengan terlebih dahulu menotifikasikan ke WTO.
2. Mengefektifkan fungsi Komite Anti Dumping dan menangani setiap kasus dugaan praktek dumping dan pemberian subsidi secara langsung oleh negara mitra dagang.
3. Mengefektifkan fungsi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dalam menanggulangi lonjakan barang impor di pasar dalam negeri.
4. Meningkatkan lobi pemerintah untuk mengamankan ekspor Indonesia antar lain dari ancaman dumping dan subsidi oleh Negara mitra dagang.
5. Mengakselerasi penerapan dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Ekonomi 2008-2009.
6. Melakukan harmonisasi tarif bea masuk (BM) pos tarif untuk produk hulu dan hilir, sehingga diharapkan akan memacu investasi dan daya saing.
7. Mengefektifkan tugas dan fungsi aparat kepabeanan, termasuk mengkaji kemungkinan penerapan jalur merah bagi produk yang rawan penyelundupan produk ilegal.

---

<sup>91</sup> BSN, *SNI Penguat Daya Saing Bangsa*, (Jakarta: Badan Standardisasi Nasional, 2010), h. 13.

8. Membatasi/melarang ekspor bahan baku mentah untuk mencukupi kebutuhan energi bagi industri dalam negeri sehingga dapat mendorong tumbuhnya industri pengolahan ditingkat hulu sekaligus memperkuat daya saing industri lokal.
9. Mempertajam kebijakan tentang fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di bidang Usaha Tertentu dan/atau di daerah tertentu.
10. Melanjutkan kebijakan Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) No 56 Tahun 2008 yang mengatur pembatasan pintu masuk pelabuhan untuk lima produk tertentu yaitu alas kaki, barang elektronik, mainan anak-anak, garmen serta makanan dan minuman.

Strategi dan kebijakan yang dirumuskan pemerintah Indonesia memang terkesan matang namun mentah dalam implementasinya. Setiap departemen memiliki rancangan strategi yang wah namun sayangnya masih sekedar rancangan yang belum terlaksana dengan baik. Pembentukan klaster-klaster industri tentu akan efektif jika dari industri hulu dan hilir mampu terintegrasi dengan baik. Namun kendala infrastruktur, terbatasnya sumber energi dan kurang terkoneksi antar industri tentu akan memperlambat serta membuat industri menjadi over biaya produksi sehingga mempengaruhi nilai atau harga produk industri tersebut. Pemerintah kurang persiapan sangat jelas terlihat tanpa adanya *blueprint* yang nyata bagaimana pemerintah telah bersiap menghadapi perdagangan bebas ASEAN-China tersebut. Kesan terburu-buru juga terlihat dari kurang sosialisasi pemerintah terhadap ACFTA bagi masyarakat sehingga ketika memasuki tahun 2010 pemerintah dan berbagai asosiasi pengusaha dan industri baru mulai panik. Berbagai demo dan usulan penundaan terkait FTA ini marak terdengar. Wajar gelagat panik ini terlihat karena selama proses penurunan tarif saja, Indonesia harus mengalami defisit perdagangan dan tentu berpengaruh terhadap jumlah tenaga kerja. Melihat hasil sebelum pelaksanaan ACFTA tahun 2010 menunjukkan masih kurang optimal strategi dan kebijakan Indonesia yang dapat dilihat dari neraca perdagangan Indonesia-China dari awal skema ACFTA tahun 2004 hingga 2009 yang menunjukkan perdagangan Indonesia kearah defisit padahal masih ada tarif yang dikenakan bagi produk China yang masuk ke Indonesia. Tidak dapat dipungkiri sektor migas merupakan sektor utama

Indonesia yang menunjang terkatrolnya neraca perdagangan Indonesia. di sisi lain Sektor non-migas mengalami defisit hingga 4,71 Milyar pada 2009. Secara keseluruhan pun Indonesia mengalami defisit dalam neraca perdagangan yang dapat ditunjukkan dari tabel berikut.

**Tabel 2.7**

**Neraca Perdagangan Indonesia Cina Tahun 2004-2009**

No	Tahun	Ekspor ke Cina (USD Juta)	Impor dari Cina (USD Juta)	Neraca (USD Juta)
1	2004	4.604	4.101	503
2	2005	6.662	5.842	820
3	2006	8.343	6.636	1.707
4	2007	9.675	8.557	1.118
5	2008	11.636	15.247	-3.661
6	2009	11.499	14.002	-2.502

Sumber: Badan Pusat Statistik

Neraca perdagangan Indonesia-China menunjukkan bahwa sejak tahun 2004 produk China sudah masuk ke Indonesia. Bahkan sebelumnya produk-produk China tersebut sudah masuk, namun dalam jumlah tidak terlalu banyak. Kondisi ekspor dan impor tahun 2004 sampai 2009 dapat dilihat pada Tabel 2.8. Pada Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama periode 2004 sampai 2007 Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan China. Namun pada tahun 2008 sampai 2009 mengalami defisit. Defisit disebabkan peran impor dari China meningkat pesat.

China merupakan negara yang sedang berjaya. Produknya merambah hampir ke seluruh dunia. Produk yang murah menjadi poin plus bagi negara berpenduduk terpadat tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang pesat pun membuat China menjadi Aktor paling penting di kawasan Asia. China memang mempunyai dukungan yang besar terhadap industri dalam negerinya sehingga dapat menguasai pasar dunia. Kemudahan dalam memberikan pinjaman bank dengan bunga yang rendah mendorong lahirnya produk-produk yang merambah negara-negara lain dengan harga relatif murah. Dukungan infrastruktur juga sangat diperhatikan bagi perluasan perdagangan. Selain itu kemudahan izin usaha juga diterapkan. Kemudahan-kemudahan seperti di China tersebut sampai saat ini

belum ditemui di Indonesia. Inilah yang memberikan kekhawatiran tersendiri atas dampak ACFTA di dalam negeri. Produk dalam negeri dinilai belum dapat bersaing dengan produk-produk dari China karena biaya produksi di dalam negeri masih tinggi dan menyebabkan harga jualnya jauh di atas produk-produk China. Penerapan ACFTA tentu akan menyebabkan berubahnya peta perdagangan antara Indonesia, negara-negara ASEAN, dan China.

Pada tabel 2.7 menunjukkan bahwa perdagangan Indonesia menjelang liberalisasi penuh 2010 terus mengalami defisit. Program penurunan tarif Normal Track 2 periode tahun 2007-2009 dimana tarif terus diturunkan dari periode sebelumnya menunjukkan daya saing Indonesia menurun. Secara keseluruhan dari tahun 2000-2009 terjadi dinamika dalam neraca perdagangan Indonesia-China. Hal ini tentu terkait dengan strategi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi ACFTA selama tiga tahap penurunan tarif dalam kerangka ACFTA. langkah-langkah apa yang dilakukan Indonesia selama berlangsungnya Normal Track dalam rangka liberalisasi perdagangan barang setelah penandatanganan ACFTA tahun 2004 hingga 2009 sebelum liberalisasi penuh dengan tarif 0 persen yang dimulai 1 Januari 2010 tentu memiliki arti penting bagi kelangsungan industri dalam negeri baik peningkatan daya saing maupun menjaga produk nasional Indonesia mampu berjaya di negaranya maupun mancanegara.

Kekhawatiran masyarakat Indonesia tentu beralasan melihat neraca perdagangan Indonesia-China yang cenderung defisit sebelum liberalisasi penuh ACFTA 2010 sehingga menimbulkan kekhawatiran produk Indonesia semakin digempur produk impor China setelah penerapan tarif 0 persen pada tahun 2010. Peran pemerintah sebagai garda terdepan dengan persiapan strategi dan kebijakan menjadi sangat krusial menanggapi dampak yang akan terjadi dari implementasi kesepakatan ASEAN-China FTA. Peluang yang selama ini diperkirakan ternyata masih menyisakan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan dan strategi pemerintah mendukung industri lokal mampu bersaing dengan produk China. Jika dari awal perjanjian, Indonesia akan mengalami kerugian seharusnya pemerintah lebih keras dalam negosiasi atau mempertahankan kepentingan nasional terutama industri domestik khususnya UKM. Kasus Thailand dengan tegas menolak perjanjian ASEAN-Korea Selatan FTA dan tidak ikut menandatangani karena



Korsel menolak membuka pasar bebasnya yang sudah pasti merugikan produk dalam negeri Thailand.<sup>92</sup>

Terlihat indikasi yang cukup kuat bahwa pemerintah tidak mempersiapkan diri secara matang untuk meraih peluang positif dari pemberlakuan ACFTA. Ini salah satunya tercermin dari ketidakmampuan pemerintah mendorong peningkatan daya saing yang sebenarnya merupakan prasyarat utama untuk meraih manfaat dari pemberlakuan ACFTA. minimnya infrastruktur, bunga kredit yang relatif tinggi, birokrasi yang panjang, masih maraknya pungutan liar, dan peraturan yang tidak pro-bisnis adalah beberapa bukti pemerintah tidak mampu menciptakan *necessary condition* untuk mendorong peningkatan daya saing beragam sektor ekonomi.<sup>93</sup> Tanpa adanya peningkatan daya saing, kebijakan untuk melibatkan Indonesia dalam ACFTA hanya merupakan *blunder* yang justru bisa berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Tidak mengherankan bila banyak kalangan bersuara keras memaksa pemerintah meninjau kembali keterlibatan Indonesia didalam perdagangan bebas ASEAN-China tersebut.

### II.3.1 Industri Tekstil dan Produk tekstil Indonesia

Kalangan Industri sangat merasakan kekhawatiran menjelang implementasi ACFTA tahun 2010. Beberapa industri diprediksi akan menuai dampak negatif dari perdagangan bebas dengan tarif 0 persen ini termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia. Banyak kalangan mengidentikkan industri TPT sebagai *sunset industry* yaitu industri yang telah melewati masa puncak kapasitas ekonomisnya dan cenderung mengalami penurunan dalam kemampuan produksinya. Namun pemikiran tersebut tidak sepenuhnya benar melihat industri TPT merupakan industri padat karya yang masuk dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Industri TPT nasional memiliki struktur industri yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir (*up stream, mid stream, dan down stream*) dan memiliki keterkaitan yang sangat erat antara satu industri dengan industri lainnya. Di tingkat hulu Indonesia memiliki industri serat yang terdiri dari industri serat alam, serat buatan dan benang filamen dan industri pemintalan serta pencelupan.

<sup>92</sup> Ratna Shofi Inayati, *op.cit.*, h. 154.

<sup>93</sup> Latif Adam, *loc.cit.*

Sementara daya serap industri ini terhadap tenaga kerja juga cukup besar, mencapai 1,84 juta tenaga kerja pada tahun 2006 dan total investasi industri ini mencapai Rp. 135,65 triliun. Hingga 2006, Indonesia telah memiliki 26 perusahaan industri serat dengan total kapasitas terpasang 1,077 ribu ton. Sekitar 70% dari hasil industri serat ini diserap oleh industri pemintalan di dalam negeri. Sedangkan sisanya diekspor ke luar negeri. Saat ini Indonesia merupakan produsen serat buatan ketujuh terbesar dunia yang memasok 10% kebutuhan serat rayon dunia.

Sementara itu, jumlah industri pemintalan mencapai 204 perusahaan dengan kapasitas terpasang 2,4 juta ton dan jumlah mesin 7.803.241 unit pada 2006. Dari jumlah mesin tersebut, sebanyak 64% di antaranya telah berusia di atas 20 tahun. Ini menyebabkan industri ini tidak mampu memenuhi permintaan pasar dalam negeri maupun luar negeri secara optimal. Sekitar separuh dari hasil produksi industri pemintalan dikonsumsi di dalam negeri, dan sisanya diekspor ke luar negeri. Kondisi yang relatif sama juga terlihat pada industri pertenunan, perajutan, pencelupan dan *finishing*. Jumlah perusahaan yang berjumlah 1,044 perusahaan dengan total kapasitas produksi 1,78 juta ton. Dari 248.957 unit mesin tenun yang ada, sekitar 66 persen di antaranya telah berusia di atas 20 tahun, dan 26 persen di atas 10 tahun. Kondisi mesin rajut dan mesin *finishing* jauh lebih memprihatinkan. Jumlah mesin rajut yang berusia di atas 20 tahun mencapai 84 persen dari jumlah mesin 41.312 unit. Sementara pada mesin *finishing*, jumlah mesin yang berusia di atas 20 tahun jumlahnya mencapai 93 persen dari 349 unit mesin yang ada. Karena kemampuan mesin *finishing*nya yang rendah, ekspor di sub-sektor ini didominasi oleh kain mentah. Pasar utama dari hasil industri tenun adalah negara-negara di Eropa dan Timur Tengah.

Di tingkat hilir, terdapat industri garmen yang jumlahnya mencapai 897 perusahaan dengan total kapasitas terpasang 754 ribu ton. Sekitar 88% dari hasil industri garmen diekspor ke luar negeri dan 12 persen untuk pasar domestik. Kebanyakan ekspor garmen dilakukan oleh perusahaan garmen berskala besar, sementara pelaku industri garmen kecil dan menengah lebih berorientasi ke pangsa pasar dalam negeri. Tak ketinggalan, juga patut disebut industri *fashion*, yang merupakan bagian unik dari industri TPT karena sarat akan sentuhan seni.

Dalam *fashion*, terjalin muatan kreativitas, sebagai *intellectual property*, dengan produk-produk yang dihasilkan oleh sektor industri TPT. *Fashion* adalah industri kreatif yang keluar dari sektor industri TPT.

Industri TPT berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan berkontribusi terhadap ekspor nonmigas. Industri TPT (tekstil dan produk tekstil) merupakan industri yang tak bisa diabaikan peranannya. Kapasitas menyerap tenaga kerja masih terbilang tinggi dimana pada tahun 2006 menjadi 1,19 juta orang. Tak berlebihan bila ada yang menyebut industri ini sebagai primadona ekspor nonmigas dan penyedia lapangan kerja Indonesia. Dalam RPJM (Rencana Pembangunan jangka Menengah) tahun 2004-2009 Pemerintah menyiapkan strategi dalam mendukung industri tekstil dan produk tekstil pada antara lain:

- Melaksanakan restrukturisasi dan modernisasi permesinan ITPT.
- Menetapkan kebijakan pengamanan suplai energi dan diversifikasi energi.
- Menghilangkan hambatan importasi kapas.
- Menetapkan ketentuan-ketentuan atau kebijakan untuk menanggulangi praktik perdagangan ilegal
- Memperluas pasar ke non pasar tradisional melalui misi dagang
- Mengamankan HaKI
- Mengembangkan produk tekstil “high fashion”
- Menyusun dan menerapkan SNI (Standar Nasional Indonesia)
- Melakukan revitalisasi UPT UKM TPT.

Dalam kurun waktu 2004-2009, strategi kebijakan pemerintah belum berjalan optimal. Restrukturisasi mesin TPT baru berjalan tahun 2007 dimana pemerintah hanya bisa memberi insentif 10% dan masih dikenakan biaya impor mesin 5%. Di awal program tersebut banyak perusahaan industri yang mendaftar namun perkembangan tahun berikutnya terus menurun. Permasalahan yang tak pernah kunjung selesai mengenai energi masih menjadi tantangan pemerintah pada periode ini dimana dengan suplai energi yang tidak merata harus dibebankan dengan kenaikan tarif dasar listrik. Dengan semakin mahal pendukung industri tentu akan menurunkan daya saing industri TPT melihat produk impor China telah banyak beredar di pasaran termasuk secara ilegal. Penerapan SNI ternyata minim

implementasi karena maraknya produk ilegal yang mampu memasuki pasar Indonesia sehingga pada masa ACFTA 2010 penguatan SNI mutlak diperlukan.

Dengan kurangnya dukungan kebijakan pemerintah, kendati memberi kontribusi devisa yang sangat berarti bagi neraca perdagangan Indonesia, sektor ini justru terseok-seok dalam memasok kebutuhan TPT dalam negeri. Dari catatan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), arus impor produk TPT terus menanjak dari tahun ke tahun. Impor TPT China di tahun 2006 mencapai US\$ 262 juta. Lonjakan impor TPT dari China, terjadi di tahun 2008 di mana nilai impor TPT China melejit ke angka US\$ 1,034 milyar dibandingkan dengan impor pada 2007 yang hanya mencapai US\$ 348 juta. Pada tahun 2009, impor meningkat lagi sebesar 11% menjadi US\$ 1,144 milyar dibandingkan dengan kondisi 2008. Tahun 2010, impor ini juga diperkirakan akan meningkat, apalagi dengan adanya penghapusan tarif sejumlah produk TPT.

Peningkatan angka impor produk TPT asal China sudah pasti berpengaruh besar terhadap kinerja industri TPT domestik, yang sebagian besar merupakan industri kecil dan menengah. Industri TPT nasional masih dihantui berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut di antaranya adalah biaya energi yang mahal dan sering mengalami kekurangan pasokan, tingkat upah yang dinilai relatif tinggi, sedikitnya dukungan pembiayaan dari perbankan, infrastruktur pelabuhan yang belum kondusif, mesin-mesin pertekstilan yang sebagian besar sudah sangat tua, dan maraknya produk impor ilegal terutama dari China. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan Industri TPT Indonesia berjalan dengan kondisi yang kurang begitu sehat dan sangat rentan terhadap serbuan produk impor TPT China, yang sudah sangat agresif masuk ke pasar domestik jauh sebelum ACFTA diberlakukan.

Terkait dengan maraknya produk TPT impor ilegal yang beredar di pasar dalam negeri, patut dilakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat. Sekalipun telah diberlakukan penghapusan tarif bea masuk atas produk-produk di sektor industri TPT, namun belum seluruh produk di sektor TPT terkena tarif bea masuk (BM) 0%. Beberapa produk garmen, misalnya, masih dikenakan tarif bea masuk sekitar 15 persen di tahun 2010 ini dan baru akan dihapuskan secara bertahap pada 2012 dan 2015. Produk-produk yang masih dikenakan tarif bea masuk ini

berpotensi diimpor secara ilegal. Produk TPT impor ilegal yang masuk tercatat sangat besar mencapai US\$ 2,4189 milyar di tahun 2009 dan pada tahun 2010 ini diperkirakan naik menjadi US\$ 7,56 miliar. Untuk itu, diperlukan pemantauan dan pengawasan ekstra ketat atas produk-produk TPT yang masih diberlakukan tarif bea masuk agar tidak diselundupkan secara ilegal bersama-sama dengan produk-produk TPT yang telah dihapuskan tarif bea masuknya melalui pemberlakuan kesepakatan ACFTA.

Dengan defisit perdagangan yang dialami Indonesia dan gempuran tekstil China menjadi tantangan yang sangat besar bagi industri tekstil begitupula dengan pemerintah untuk lebih merumuskan kebijakan maupun strategi yang lebih efektif agar produk TPT Indonesia tidak mejadi prioritas kedua setelah produk China. Dukungan pemerintah merupakan suatu keharusan melihat tidak hanya efek perdagangan namun juga berimbas pada tenaga kerja mengingat industri TPT dikategorikan industri padat karya.

Dalam kerangka ACFTA, liberalisasi perdagangan barang dalam skema normal track dimulai tahun 2005. Selama masa normal track disesuaikan penurunan tarif hingga mencapai 0 persen pada tahun 2010. Sektor tekstil dan produk tekstil *Keunggulan komparatif* (CA) yang rendah untuk tekstil dan produk tekstil (TPT) selama delapan tahun terakhir memberikan opsi ancaman bagi industri TPT di Indonesia dalam menghadapi ACFTA. Berdasarkan kalkulasi *Institute for Development of Economics and Finance Indonesia* (Indef) misalnya, pada 2008 CA TPT hanya sebesar 1,81%. Pada 2007 dan 2006 pun tidak jauh berbeda, hanya 1,9% dan 2,03%. Sektor TPT juga menjadi penyumbang eksportir terbesar jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.<sup>94</sup> Tercatat terdapat 187 eksportir yang melakukan ekspor ke luar negeri. Berdasarkan data BPS, indeks pertumbuhan produksi TPT juga mencatat pertumbuhan fluktuatif selama tiga tahun terakhir (2006-2008), yang secara berurutan sebesar 6,04%, 11,17%, dan 3,38%. Atas dasar ini, tampaknya pemerintah perlu meratifikasi kebijakan terkait penentuan standar tarif dan bea dumping yang diterapkan bagi produk-produk hasil industri TPT.

---

<sup>94</sup> Jati Andrianto, Aditya Perdana Putra dan Fadjar Adrianto, *loc.cit.*, h. 25.

Gejala deindustrialisasi yang mencuat dalam perekonomian nasional Indonesia sejak pergantian milenium yang lalu kini sesungguhnya telah sampai pada perwujudannya secara sangat konkret. Pada 2004, Bank Dunia melansir berita bahwa sejak 2003 daya saing Indonesia dalam pengumpulan industri antar-bangsa memperlihatkan adanya paradoks. Di satu sisi, terjadi peningkatan daya saing komoditas Indonesia di pasar dunia. Tetapi di lain sisi, industri tekstil dan sepatu di Indonesia banyak yang gulung tikar.<sup>95</sup> Dua industri ini merupakan salah satu indikator penentu kemampuan Indonesia menembus pasar ekspor. Berdasarkan fakta ini tak bisa dielakkan munculnya kenyataan, bahwa Indonesia benar-benar dihadapkan dengan problema pergeseran orientasi ekspor, dari yang sebelumnya bertumpu pada manufaktur menjadi terfokus pada komoditas primer.

Melihat gejala tersebut, sebenarnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengamankan sektor industri ini. Dalam kerangka ACFTA, industri TPT mendapat tantangan dari produk China. Sebelum implementasi perdagangan bebas ini, masyarakat Indonesia telah banyak menikmati produk-produk China yang didapat secara ilegal. Produk-produk pakaian jadi China telah lama beredar di kawasan perdagangan Indonesia seperti Tanah Abang dan Mangga Dua.<sup>96</sup> Jangankan Indonesia, Amerika saja kalang kabut menghadapi tekstil China ini. Seandainya Amerika menghambat ekspor produk tekstil China, hal tersebut mengakibatkan produk China semakin mengalir deras ke mana saja, termasuk Indonesia. Dengan sistem distribusi yang solid, produk tekstil China menjadi ancaman terbesar bagi Indonesia. Ketika normal track dimulai tahun 2005 dengan penurunan tarif hingga 40%, pertumbuhan ekspor China ke Indonesia yang mencapai 51% pada tahun 2005 dari tahun 2004.<sup>97</sup> Hal ini tentu menjadi kewaspadaan bagi industri TPT serta tanggapan cepat dari pemerintah untuk membenahi strategi kebijakannya selama ini.

Melihat posisi Indonesia, sulit untuk dikatakan mampu bersaing dengan China hingga implementasi ACFTA 2010. Saat ini saja dari awal produksi mereka

<sup>95</sup>Anwari WMK, "Titik Nadir Deindustrialisasi," diakses dari: [http://www.lp3es.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=135&Itemid=2](http://www.lp3es.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=2) , diakses pada 1 April 2012, pukul 16.05 WIB.

<sup>96</sup>"Ekspor Tekstil Bisa Capai Kondisi Terburuk," diakses dari: <http://www.disperindag-jabar.go.id/?pilih=lihat&id=1111>, diakses pada 2 April 2012, pukul 23.45 WIB.

<sup>97</sup>*Ibid.*

sudah kalah bersaing, dalam hal pemberian fasilitas. Pemerintah China, misalnya, memberikan suku bunga pinjaman kepada industri TPT mereka sebesar 5,31%. Sementara di Indonesia suku bunga pinjaman masih berkisar 16% hingga 20% per bulan, tergantung hasil lobi, koneksi, dan keyakinan penilai bank tersebut. Namun yang jelas posisinya sudah jauh berbeda.<sup>98</sup>

## **II.4 Perbandingan Kesiapan Thailand menghadapi ACFTA**

### **II.4.1 Hubungan Ekonomi Thailand-China**

Thailand memulai hubungan perdagangan dengan China pada tahun 1978 setelah restorasi hubungan diplomatic antara kedua negara pada tahun 1975. Perjanjian perdagangan antara Thailand dan China ditandatangani pada 31 Maret 1978 yang kemudian terbentuklah *The Thailand-China Joint Trade Committee*. Kerjasama ini meliputi ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata yang tertuang dalam pembaharuan perjanjian kerjasama antara Thailand dan China yang ditandatangani pada 16 April 1998. Hubungan perdagangan Thailand dan China terus meningkat sejak tahun 1991. Total perdagangan antara kedua negara dari tahun 1991 hingga 2002 meningkat 31 persen dan terus meningkat sejak China memasuki WTO pada tahun 2001. Namun perkembangan selanjutnya, dengan liberalisasi China pasca memasuki WTO impor produk China melebihi ekspor Thailand.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Banu Astono, "Liberalisasi Pasar TPT, Jalan Sutra bagi China," diakses dari: <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0312/18/ekonomi/753036.htm>, diakses pada 1 April 2012, pukul 13.00 WIB.

<sup>99</sup> Sompop Manarungsan, "Thailand-China Cooperation on Trade, Investment and ODA," *Working Paper*, dipresentasikan pada Konferensi Thailand ODA Report, 2008, h. 34.

Tabel 2.8 Perdagangan Thailand-China 2006-2008

Value : Million U.S. Dollar

	2006	2007	2008	Growth 2007/08 (%)
Total Trade Value	25,331.95	31,071.65	36,246.70	16.66
Export from Thailand to China	11,727.95	14,846.75	16,190.84	9.05
Import into Thailand from China	13,604.00	16,224.90	20,055.86	23.61
Trade Balance for Thailand	-1,876.05	-1,378.15	-3,865.02	180.45

Sumber: Kementerian Perdagangan Thailand.

Total ekspor Thailand ke China meningkat dari 11,8 milyar Dollar pada tahun 2006 menjadi 16,2 milyar Dollar dimana pertumbuhan impor pun meningkat dari 13,6 milyar Dollar menjadi 20,1 milyar Dollar. Dengan demikian, defisit perdagangan tetap dialami pihak Thailand. Pada awal hubungan perdagangan, ekspor Thailand cenderung merupakan komoditas pertanian, namun sejak tahun 1997 mengalami diversifikasi pada produk industri dan komoditas dasar. Pada tahun 2006-2008 produk manufaktur memberikan kontribusi hingga 70,26 persen dari total ekspor Thailand ke China pada tahun 2008. Lima Produk utama ekspor Thailand ke China merupakan computer dan komponennya, karet, minyak, plastic dan produk kimia. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.9. Melihat produk-produk China yang diimpor Thailand pada tahun 2008 lebih berupa investasi, barang mentah dan produk konsumsi.



Tabel.2.9 Ekspor Thailand ke China 2006-2008

Unit : Million U.S. Dollar

Items	2006	2007	2008	Growth (%) 08/07
Computer and Components	2,473.87	3,955.35	4,821.81	21.91
Rubber	1,354.37	1,591.48	1,937.52	21.74
Finished Oil	352.72	666.06	1,185.06	77.92
Plastic Pellets	909.9	994.83	1,075.26	8.08
Chemical Products	1,181.30	1,293.40	817.07	-36.83
Integrated Circuit	654.48	871.15	781.73	-10.26
Crude Oil	556.82	539.59	569.09	5.47
Rubber Products	282.79	345.31	480.27	39.09
Tapioca	529.83	471.52	339.3	-28.04
Wood Products	253.99	268.28	288.38	7.49
Sub- Total	8,550.08	10,996.98	12,295.49	11.81
Other's	3,177.87	3,849.77	3,895.35	1.18
Grand Total	11,727.95	14,846.75	16,190.84	9.05

Source : Department of Export Promotion, Ministry of Commerce

Dengan perubahan komposisi produk ekspor dari pertanian menjadi barang manufaktur tentu menandakan kemajuan Thailand dalam mengembangkan industrinya. Thailand mampu mengubah citra negara pertanian menjadi negara industri melalui pengembangan industri elektronik khususnya computer dan komponennya hingga mampu penetrasi ke pasar China. Tidak berlebihan jika Thailand mempercepat kesepakatan FTA dengan China karena kesiapan industri untuk berkompetisi serta didukung dengan strategi yang terencana.

#### II.4.2 Strategi Kebijakan Pemerintah Thailand menghadapi FTA

Thailand mengikuti berbagai macam perjanjian perdagangan bebas tentu memiliki strategi perdagangan dengan pertimbangan: untuk mengembangkan pasar, menjadi partner dagang China dan india serta bekerjasama dengan negara diluar kawasan. Dengan strategi perdagangan tersebut Thailand menjalani

kesepakatan kerjasam dengan Australian, New Zealand, India dan ACFTA.<sup>100</sup> Dalam perkembangan perdagangan bebas, pemerintah Thailand menyiapkan sejumlah kebijakan terkait dengan pelaksanaan FTA. Kebijakan dikaji untuk memastikan bahwa kepentingan nasional dan keuntungan bagi rakyat dan serta bisnis Thailand. Strategi kebijakan tersebut ialah<sup>101</sup>:

1. Dalam pembentukan FTA, pemerintah membentuk *working group* yang terdiri dari badan negosiasi yang nantinya terlibat dalam negosiasi pembentukan FTA seperti *steering committee* negosiasi perdagangan internasional, termasuk ahli sektor public dan swasta untuk mengkoordinasikan dan menyajikan *think-tank* dalam permasalahan FTA, dan *supporting committee* yang mengawasi implementasi, menegakkan serta restrukturisasi proses perekonomian Thailand.
2. Meningkatkan infrastruktur guna memfasilitasi perdagangan khususnya transportasi baik darat, laut maupun udara, mengembangkan informasi dan data yang digunakan untuk memperhatikan kondisi pasar dan perdagangan baru.
3. Memperkuat sektor UKM dan akar perekonomian melalui penelitian dan pengembangan, pelatihan dan pemasaran guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing internasional masyarakat, produk dan perekonomian Thailand.
4. Mempromosikan perdagangan dan hubungan perekonomian antara Thailand dan partner dengan membentuk *joint business councils* atau *working committee*, kunjungan resmi, pameran dagang dan sebagainya.
5. Mempromosikan produktivitas modern dan inovatif melalui pelatihan dan investasi melalui ilmu pengetahuan, keahlian dan pertumbuhan *entrepreneurship*. Membentuk jaringan keamanan sosial seperti pelatihan kerja, meningkatkan sistem pendidikan dan sistem sosial serta kesehatan.
6. Melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Thailand dibandingkan dengan pemerintah Indonesia, kebijakan Thailand lebih bersifat mengajak

<sup>100</sup> Sally Razeen, "Free trade agreements and Prospects for Regional Integration in East Asia," *Asian Economic Policy Review*, 2006, Vol.1, No.2, h. 306-321.

<sup>101</sup> Nattinan Pongjityingyong, "Study of the Effect of China Thailand FTA on Thailand's Fruits and Vegetables Sector, *Tesis*, International Affairs Ming Chuan University, 2007, h. 78.

seluruh elemen berpartisipasi. Kebijakan perdagangan dan industri Indonesia memang menyesuaikan dengan kepentingan nasional namun kebijakan Indonesia tidak memperlihatkan antar kementerian memiliki pandangan yang sama. Thailand mempersiapkan diri baik dengan pensosialisasi dengan mengundang para *think tank* dan birokrat sesuai departemen dengan fungsi yang jelas. Ketika pemerintah Indonesia membuat kebijakan menghadapi FTA khususnya ACFTA terlihat sosialisasi yang kurang baik kalangan industri maupun internal pejabat pemerintah sendiri yang terkesan tidak saling terkoordinir.

Thailand dinilai lebih siap dalam menghadapi perdagangan bebas dalam skema ACFTA melalui pengembangan daya saing. Thailand menyadari bahwa tanpa persiapan matang mustahil mampu bersaing dengan China yang secara ekonomi mempunyai kemampuan memproduksi barang murah dan didukung SDM yang berkualitas. Thailand sejak tahun 2005 telah menjalankan *dual track economy Policy* yaitu pemberian insentif pengurangan pajak untuk mendorong investasi dan industrialisasi terutama pada perusahaan multinasional. Secara simultan insentif juga diberikan kepada kegiatan usaha domestik yang mengembangkan produk lokal unggulan dalam rangka menggenjot daya saing produk domestik Thailand. Di bidang pembangunan SDM, Thailand telah menyiapkan kebijakan pengembangan teknologi informasi melalui cetak biru "Towards Social Equity and Prosperity: Thailand IT Policy into the 21<sup>st</sup> Century." Rencana tersebut mencakup penyeimbangan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Thailand dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur IT, termasuk daerah pedesaan. Tujuan kebijakan tersebut salah satunya untuk meningkatkan kualitas daya saing masyarakat Thailand.

## BAB III

### STRATEGI KEBIJAKAN DAN DAMPAK ACFTA DALAM PERDAGANGAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL INDONESIA

#### III.1 Strategi Kebijakan Indonesia Menghadapi ACFTA dalam Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil

Sejak Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan China pada awal Januari 2010 lalu, menjadi keharusan bahwa Indonesia harus siap dengan segala konsekuensi yang akan datang setelah perjanjian ini diberlakukan. Meski sekarang Indonesia dinilai sebagian kalangan masih kurang berperan besar dalam kerangka perdagangan ACFTA, Indonesia harus mempersiapkan berbagai strategi mengatasi dampak memaksimalkan ACFTA untuk kepentingan negara. Hal ini penting supaya Indonesia tidak hanya menjadi perahan negara lain dan bisa menjadi aktor ekonomi yang diperhitungkan dalam level Asia Tenggara. Mengingat kondisi dan perkembangan perdagangan internasional yang sangat kompetitif akhir-akhir ini, Indonesia pun dituntut untuk mampu bersaing dengan negara lain.

Pada dasarnya sebuah perjanjian bebas dilakukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Teori perdagangan bebas mencerminkan sifat saling menguntungkan bagi pelaku kebijakan tersebut. Begitupula yang diharapkan pemerintah Indonesia dalam melakukan liberalisasi perdagangan dengan menjalin kerjasama dengan China dalam wadah ASEAN yang menghasilkan kesepakatan ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA). Peran pemerintah tidak dapat diabaikan dalam pembentukan strategi kebijakan untuk mendukung sektor-sektor perdagangan baik industri dan penunjangnya. Pemerintah Indonesia menyadari hal tersebut dengan berbagai bentuk strategi kebijakan yang tercipta dalam sektor perdagangan dan industri. Namun, ketika menghadapi ACFTA ini, kesiapan pemerintah di uji dimana harus diakui Indonesia tidak memiliki strategi khusus dalam menjalani perdagangan bebas ini.

Ketika pertama kali disepakati pada tahun 2004 dalam bentuk kerangka kerjasama, ACFTA yang diimplementasikan pada tahun 2010 tentu harus sudah

dipikirkan bagaimana keberlangsungannya sejak tahun 2004. Pemerintah memiliki waktu 5 tahun untuk mempersiapkan diri baik dengan industri yang telah mampu berdaya saing dan pengamanan pasar domestik dari serbuan produk impor. Namun kesan terlambat untuk mempersiapkan diri tercermin dari awal pelaksanaan ACFTA ini. Banyaknya sektor industri yang menyatakan belum siap ketika akan menghadapi perdagangan bebas ASEAN-China dengan tarif hingga 0 persen pada tahun 2010 terutama industri tekstil dan produk tekstil serta baja. Untuk menjaga kelangsungan industri nasional dan mengamankan produk nasional dalam pasar domestik tertuang dalam strategi kebijakan RPJMN Indonesia. Namun strategi kebijakan tersebut tidak serta merta semua berhasil dilaksanakan dalam menghadapi ACFTA kurun waktu 2010 hingga 2011.

Terkait dalam pelaksanaan ACFTA, kementerian perdagangan dan kementerian industri memiliki peran yang sangat signifikan dalam menata kemampuan Indonesia untuk mampu memanfaatkan keuntungan dari ACFTA dan meminimalisir dampak negatif dari perdagangan bebas tersebut. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya baik kementerian Industri dan kementerian perdagangan memiliki Rencana Strategis yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang ternyata belum mampu meningkatkan perdagangan Indonesia khususnya tekstil dan produk tekstil karena terus mengalami defisit terhadap China.

Melihat strategi dan kebijakan yang dirumuskan pemerintah mengenai ACFTA secara umum menggambarkan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk-produk nasional di pasar ekspor sekaligus menahan laju agresivitas produk-produk China masuk ke pasar domestik. Dengan demikian, konteks penulisan ini, strategi kebijakan dalam perdagangan TPT difokuskan pada pengamanan produk dalam negeri dan peningkatan daya saing industri guna mengantisipasi banjirnya produk China di pasar domestik Indonesia serta meningkatkan ekspor TPT dalam kerangka ACFTA.

Kementerian Industri dan Kementerian keuangan pada tahun 2009 menyepakati untuk renegotiasi terhadap 228 pos tarif dimodifikasi pemerintah yang selanjutnya akan dinegosiasi dengan pemerintah China guna digeser pemberlakuannya pada tahun 2012 dan sebagian 2015, sebagai gantinya Indonesia

mengkompensasi sektor dimana industri dalam negeri sudah bisa bersaing. Hal ini mencerminkan ketidaksiapan Indonesia dalam ACFTA dan memperlihatkan lemahnya *bargaining power* Indonesia saat penundaan 228 pos tarif tersebut batal terlaksana ketika perundingan yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dengan Menteri Perdagangan China Chen Deming di Yogyakarta, pada 3 April 2010. Dengan demikian, kebijakan yang bersifat non tarif dan peningkatan daya saing menjadi prioritas kementerian Industri dalam mengatasi dampak ACFTA.<sup>102</sup>

### **III.1.1 Pengamanan Pasar Domestik**

#### **III.1.1.1 Penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI)**

Kebijakan non tarif disiapkan salah satunya dengan penerapan atau penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam mengamankan produk impor yang masuk ke Indonesia. Produk China merupakan tantangan terbesar bagi industri Indonesia, termasuk industri tekstil dan produk tekstil. Produk-produk China dijual dengan tingkat harga lebih murah baik dibandingkan dengan produk impor lain maupun produk lokal dan telah beredar luas hingga pelosok tanah air.

Kehadiran produk-produk ini menciptakan kegelisahan banyak kalangan yang merasa khawatir bahwa produk-produk China akan memarginalkan industri domestik seperti elektronik, pakaian, tekstil, tas, sepatu, mainan anak, sandal, sepatu, jamu, makanan, minuman, produk pertanian, produk perikanan dan peternakan. Para pelaku industri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dinilai akan kian terdesak ke pinggir arena persaingan sebagaimana menghasilkan produk-produk dengan konsentrasi pasar dalam negeri.

Pemberlakuan ACFTA telah menghadapkan Indonesia pada dua isu utama, yakni: (1) bagaimana memperkuat dan meningkatkan daya saing produk-produk nasional di pasar ekspor ASEAN sekaligus menahan laju agresivitas produk-produk China masuk ke pasar domestik, dan (2) mencegah beredarnya produk-produk China yang membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat yang

<sup>102</sup>Deperin Tempuh Tiga Kebijakan Hadapi ACFTA”, diakses dari: <http://beritadaerah.com/berita/sulawesi/18704>, diakses pada 30 April 2012, pukul 23.50 WIB.

menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk tersebut. Salah satu solusi yang dapat dilakukan dalam merespon kedua isu tersebut adalah penerapan SNI.

Pemerintah gencar menyebutkan SNI sebagai langkah mengantisipasi melonjaknya produk impor memenuhi pasar domestik. SNI digunakan sebagai langkah pengamanan ketika barang-barang impor memasuki wilayah Indonesia guna mencegah barang-barang impor yang tidak sesuai standar masuk ke dalam pasar domestik. Upaya peningkatan pengawasan barang beredar, khususnya dari impor, perlu dilakukan. Peningkatan itu banyak terbukti dari barang impor yang tidak memenuhi standar dan membahayakan konsumen.<sup>103</sup>

Badan Standar Nasional (BSN) telah menetapkan 2.058 SNI atau sekitar 30% dari total 6.839 SNI yang dirancang untuk 20 sektor industri utama Indonesia dengan perincian dalam tabel 3.1. Dari 2.058 SNI yang ditetapkan pada 20 sektor tersebut, memang belum semuanya dapat diterapkan akibat berbagai kendala, utamanya ketersediaan infrastruktur dalam penerapan standar. Ada beberapa SNI yang tidak dapat diterapkan karena belum tersedianya laboratorium uji atau tiadanya Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang terakreditasi. Pada tabel 3.1 memperlihatkan bahwa tekstil dan produk tekstil termasuk sektor terbanyak kedua dengan jumlah 266 SNI yang diharapkan dapat menerapkan standar nasional setelah sektor makanan dan minuman dengan 440 SNI.

---

<sup>103</sup> Andrian, "Dampak Implementasi CAFTA: 9 Sektor Industri Perlu Perhatian," diakses dari: <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=276466>, diakses pada 27 Mei 2012, pukul 13.20 WIB.

Tabel. 3.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) pada 20 Sektor Industri

No.	INDUSTRI	TOTAL SNI
1.	Alas kaki	47
2.	Aluminium	49
3.	Baja	141
4.	Elektronika dan Kelistrikan	159
5.	Mainan anak	4
6.	Makanan dan minuman	440
7.	Mesin dan perkakas	156
8.	Pertanian dan Industri Hasil Pertanian	121
9.	Petrokimia	108
10.	Plastik	79
11.	Tekstil dan produk tekstil	266
12.	Alat Kesehatan	133
13.	Benang dan kain	142
14.	Furnitur	30
15.	Hortikultura	113
16.	Kosmetik	30
17.	Pengolahan Kakao	10
18.	Serat Sintesis	14
19.	Kaca Lembaran	1
20.	Ban	15
TOTAL		2.058

Sumber: Badan Standardisasi Nasional (2010).

Dalam sektor tekstil dan produk tekstil, memasuki tahun 2010, industri TPT Indonesia dihadapkan pada tantangan yang cukup serius. Bea masuk 0% dari China berdasarkan perjanjian ACFTA yang telah ditandatangani tahun 2005, mau tidak mau akan memberikan dampak serius bagi pasar domestik. Lonjakan ini membuktikan bahwa sebelum pemberlakuan CAFTA produk TPT China sudah sangat kompetitif. Faktor pendukung utama daya saing produk TPT China adalah insentif pemerintah mereka dalam bentuk fasilitas *export VAT rebate* (subsidi pajak) yang sejak tahun 2009 ditingkatkan menjadi sebesar 16% untuk industri TPT. Tingkat daya saing TPT China akan lebih kuat lagi dengan adanya penghapusan tarif bea masuk dari 5% menjadi 0% di tahun 2010 pada saat pemberlakuan ACFTA. Diperkirakan industri TPT nasional yang berorientasi pada pasar domestik, yang umumnya terdiri dari industri TPT menengah dan kecil, akan mendapat tekanan berat dalam bersaing dengan produk TPT China di tingkat pasar dalam negeri. Dengan kondisi demikian, Badan Standar Nasional memprioritaskan sektor TPT dalam penerapan SNI.



Merujuk pada kesepakatan ACFTA, terdapat 359 pos tarif (HS) komoditi pada sektor industri TPT yang relevan dengan kesepakatan tarif ACFTA, dengan klasifikasi 224 pos tarif (HS) masuk kategori *normal track* dan 135 pos tarif (HS) masuk kategori *sensitive list*. Jadi, ada 224 komoditi TPT telah harus berlaku tarif bea masuk sebesar 0%. Tidak ada satupun komoditi dalam sektor industri TPT masuk ke dalam kategori *high sensitive list*. Dari hasil identifikasi SNI yang telah ditetapkan oleh BSN, terdapat 266 SNI ditetapkan berlaku untuk sektor industri TPT. Dilihat dari keseluruhan total dari SNI yang telah ditetapkan BSN, persentase SNI sektor industri TPT adalah 4% dari total 6.839 SNI. Kenyataan dari 266 SNI tersebut hanya 62 SNI yang terkait ACFTA namun SNI tersebut ternyata butuh banyak revisi, sekitar 31 SNI.

Pelaksanaan kebijakan pengamanan melalui penerapan SNI ternyata tidak menjadi kebijakan yang menjamin produk lokal akan menjadi raja di negeri sendiri. Banjir impor produk China masih akan tetap terjadi melihat China telah membeli 653 jenis SNI dalam kategori elektronik, tekstil dan alas kaki, produk pertanian dan beberapa produk lainnya sehingga produk-produk tersebut dapat dengan bebas masuk ke Indonesia karena telah memiliki standar yang diterima pemerintah Indonesia. Pembelian SNI tersebut dilakukan pada November 2010 dengan membayar sejumlah uang yang disetorkan ke kas negara namun jumlahnya belum dapat dikonfirmasi. Tidak hanya itu, China telah mengajukan untuk membeli 6779 jenis SNI produk lainnya sehingga produk China akan mudah dikirim ke Indonesia.<sup>104</sup> Berbeda dengan standardisasi China yang sudah memulai program standardisasi sejak lima tahun yang lalu dan tidak ada jual-beli Standar Nasional Indonesia (SNI)<sup>105</sup> seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia sehingga pengamanan pasar dalam negeri mampu terjaga dalam pasar produk domestiknya.

Melihat hal tersebut, tentu menambah kekhawatiran produk-produk China akan sangat mudah ditemukan di Indonesia. Kementerian industri dan perdagangan belum memiliki strategi kebijakan yang mampu secara efektif

---

<sup>104</sup> "ASEAN-China Free Trade Area Affects Indonesian Industries," diakses dari <http://newsdawn.blogspot.com/2011/04/asean-china-free-trade-area-affects.html>, diakses pada 27 April 2012, pukul 09.15 WIB.

<sup>105</sup> "Daya Saing Lokal Melemah," *Koran Jakarta*, Senin 25 April 2011, h. 15.

menghadapi gempuran produk impor khususnya dari China. Langkah pemberian ijin pembelian Standar Nasional Indonesia semakin memberikan peluang produk China untuk menikmati pasar domestik Indonesia yang memang membutuhkan barang murah. Dengan demikian langkah pengamanan produk lokal melalui SNI bukan jaminan produk TPT Indonesia mampu menjadi produk yang mumpuni dilihat konsumen lokal melihat produk China dengan harga murah masih banyak beredar di pasaran terlebih produk TPT lokal memang kurang inovatif.

Selain ijin pembelian SNI oleh China, pemerintah juga memberatkan pelaku industri nasional dengan pembebanan biaya sertifikasi SNI. Menurut ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat bahwa Pengurusan sertifikasi SNI memang membutuhkan biaya yang besar. Tiap tahapan pengurusan sertifikat tersebut, pelaku industri harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Untuk memperoleh sertifikasi produk bertanda SNI pada produk tekstil, perusahaan menghabiskan dana mencapai Rp 14,2 juta dengan rincian mulai untuk pendaftaran Rp 100.000, *assesment* Rp 500.000, audit lapangan Rp 7 juta, biaya sertifikat Rp 100.000, dan biaya tim teknis sebesar Rp 4 juta. Sedangkan biaya sertifikasi mencapai Rp1,5 juta, dan pengambilan contoh produk Rp 1 juta. Masih ada lagi biaya pengujian yang tergantung kepada jumlah contoh yang akan diambil dan dilakukan setiap enam bulan sekali. Setelah sertifikasi SNI, perusahaan yang memiliki sertifikat harus mengeluarkan biaya rutin berupa pengawasan Sistem Manajemen Mutu sebesar Rp5,5 juta per tahun. Selain itu, pelaku usaha juga harus menambah pengeluaran dengan biaya perpanjangan masa sertifikat sebesar Rp 8,7 juta.<sup>106</sup> Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sertifikat SNI ternyata ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Dengan demikian, di tengah serbuan tekstil impor dari China, pelaku usaha tekstil dan produk tekstil (TPT) dikenakan biaya yang besar untuk mendapatkan SNI sehingga prosedur tersebut akan menurunkan daya saing industri dalam negeri.

Besarnya biaya prosedural SNI membuat pemerintah mengambil kebijakan melalui Kementerian Perindustrian untuk memfasilitasi dan menanggung biaya penerbitan standar nasional Indonesia (SNI) bagi 10 produk tekstil industri kecil

---

<sup>106</sup> Ajeng Ritzki Pitakasari, "Pengusaha: Biaya Sertifikasi SNI Turunkan Daya Saing," diakses dari: <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/12/04/02/m1ue1h-pengusaha-biaya-sertifikasi-sni-turunkan-daya-saing>, diakses pada 28 Mei 2012, pukul 21.00 WIB.

dan menengah di empat wilayah yaitu lima di Jawa Barat, dua di Jawa Timur, dua di Jawa Tengah, dan satu di Bali.<sup>107</sup> Pemilihan sektor TPT terlebih dahulu karena sektor ini yang paling banyak diserbu produk impor bersama dengan mainan anak-anak.

ACFTA tidak dapat dihadapi dengan regulasi-regulasi standar yang serampangan atau dengan prinsip menolak barang-barang mitra kerjasama dengan menggunakan strategi pemanfaatan standar. Indonesia terikat dengan kaidah-kaidah yang kalau dilanggar, akan menerima balasan dari negara mitra dagang, yang pada akhirnya akan menimbulkan perang standar. Yang dapat dilakukan adalah membidik potensi-potensi industri nasional yang besar untuk menerapkan suatu standar yang diakui sehingga dapat bersaing dengan produk yang berasal dari negara manapun.

Faktor penting yang menjadi bagian dari penerapan standar (SNI) adalah kesanggupan dan kesiapan sektor industri selaku pihak yang bertindak untuk menerapkan standar dalam memproduksi barang. Oleh karenanya, penerapan standar, apalagi yang bersifat perintah, harus mempertimbangkan kesanggupan sektor industri untuk menerapkan persyaratan yang ditetapkan oleh standar yang bersangkutan. Perlu dihindari penetapan suatu standar di luar kemampuan industri untuk menerapkannya karena akan merugikan industri nasional sendiri dimana industri menjadi tidak mampu memenuhi standar yang diwajibkan, sehingga produk-produk yang dihasilkannya tidak diterima di pasar karena tidak memenuhi standar yang diwajibkan.

### **III.1.1.2 Promosi penggunaan produk dalam negeri**

Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah sebuah kebijakan dan program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah dengan satu tujuan agar penggunaan produk buatan dalam negeri meningkat. Dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri diharapkan beberapa hal dapat dicapai, yakni 1) investasi dan produksi meningkat dan bilamana ini terjadi maka

---

<sup>107</sup>“Kemenperin Tanggung SNI 10 Produk Tekstil,” diakses dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3219/Kemenperin-Tanggung-SNI-10-Produk-Tekstil>, diakses pada 30 Mei 2012, pukul 02.05 WIB.

efisiensi dari produksi nasional akan tercipta karena skala produksi dapat optimal. 2) impor berkurang maka penggunaan devisa-pun akan berkurang. Ini implikasi yang paling utama diharapkan terjadi dan bilamana ini menjadi sebuah kenyataan, pertumbuhan ekonomi domestik akan tumbuh tanpa banyak bergantung kepada faktor eksternal.

Kebijakan dan program P3DN juga dapat mengamankan pasar domestik dari serbuan barang impor tentunya dengan semakin mencintai penggunaan produk dalam negeri. Namun dengan semakin banyaknya produk impor yang variatif semakin menjauhkan produk lokal dari jangkauan masyarakat Indonesia. Salah satu strategi promosi penggunaan produk dalam negeri adalah dengan menggelar pameran industri secara berkala dengan demikian semakin mendekatkan produk lokal dengan masyarakat dimana masyarakat dapat melihat maupun membeli hasil industri nasional. Strategi ini pula dilakukan pemerintah dengan mengadakan pameran industri setiap tahunnya.

Promosi penggunaan produksi dalam negeri merupakan strategi pengamanan pasar domestik dari serbuan produk impor dengan banyaknya perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2009 mengenai promosi penggunaan produk dalam negeri. Untuk itu, pemerintah menggalakkan program kampanye 100 persen Cinta Indonesia.

Pemerintah memiliki beberapa fasilitas yang dapat menggenjot program promosi penggunaan produk dalam negeri seperti Plasa Pameran Industri dan Gedung SMESCO tower. Sesuai dengan tujuannya sebagai fasilitas atau tempat yang berfungsi memamerkan hasil karya produk lokal sehingga bagaimana memanfaatkannya merupakan peran pemerintah untuk semakin gencar mengkampanyekan cinta produk Indonesia dengan berbagai pameran hasil industri nasional. Sayangnya pemanfaatan fasilitas dan banyaknya pameran digelar kurang menarik minat masyarakat luas terhadap pameran-pameran industri. Beberapa kegiatan pameran digelar selama implementasi ACFTA diantaranya: Pameran Indonesia Fashion World 2010 di Jakarta Convention Center yang berlangsung dari 25-29 Agustus 2010. Pameran tersebut ini mengambil tema *Eco Friendly Fashion, Go Green with Fashion* dan akan diikuti

oleh pelaku industri tekstil dan garmen, desainer dan perancang mode nasional, distro, pengrajin kain adat, produsen kosmetik dan kecantikan serta aksesoris dan sekolah mode.

Kementerian industri mengadakan Pameran Produk Industri Aneka di Plaza Pameran Industri 23-26 November 2010. Berbagai hasil industri nasional di pameran termasuk produk tekstil. Penyelenggaraan pameran ini mempunyai arti penting dan strategis yaitu untuk menunjukkan bahwa industri fashion tidak bisa diartikan sebagai pakaian dan aksesoris semata, tetapi harus dilihat dari sisi yang lebih luas yaitu keterkaitannya dengan peran industri pemintalan, perajutan, pertununan, dan finishing yang memiliki kontribusi dalam menghasilkan bahan baku produk fashion berkualitas tinggi. Pameran juga dilaksanakan Kadin bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Energi DKI dan Ditjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian menggelar pameran produk industri kecil dan menengah (IKM) dengan nama Jakarta IKM Expo 2010 di Plaza Pameran kantor Kementerian Perindustrian di Jakarta pada 8-10 Desember 2010.

Pameran Jakarta IKM Expo 2010 diikuti 56 peserta dari produsen IKM unggulan binaan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta bertema Meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui gelar produk IKM. berbagai produk yang akan meramaikan Jakarta IKM Expo meliputi garmen, produk tekstil, makanan dan minuman olahan, kerajinan, industri plastik dan kemasan, industri kulit dan alas kaki, serta industri elektrik dan elektronik, industri kreatif, dan furnitur. Pameran tersebut merupakan bagian dari wujud pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian dan Energi DKI dan Kadin Jaya dalam pembinaan, pengembangan, informasi, perdataan dan kemitraan usaha bidang perindustrian dan energi. Pameran yang sekaligus menjadi gelar produk IKM itu dapat menjadi sarana yang baik untuk mempromosikan hasil karya produk IKM sebagai upaya meningkatkan transaksi dari pembeli, mempertemukan antara produsen dan pembeli serta membudayakan penggunaan produk dalam negeri.

Selain dengan menggunakan sarana promosi berupa pameran yang telah disebutkan beberapa di atas, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang atau

jasa pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan masing-masing guna memaksimalkan penggunaan barang atau jasa produk dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta penggunaan penyedia barang dan jasa nasional dan memberikan preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri dan penyedia jasa pemborongan nasional kepada perusahaan penyedia barang atau jasa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam rangka mendorong diterapkannya optimalisasi penggunaan produk dalam negeri, Menteri Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Barang/Jasa Produk Dalam Negeri.<sup>108</sup> Sesuai pedoman tersebut Menteri akan melakukan penilaian dan memberikan peringkat setiap tahun kepada Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Perangkat Daerah, BI, BHMN, BUMN, BUMD, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terhadap penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Maksud dari pemberian penghargaan P3DN ini adalah memberikan apresiasi dan penghargaan pemerintah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian, BUMN/BUMD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah berprestasi dalam melaksanakan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintahan mendukung penggunaan produk dalam negeri sehingga dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam instansi pemerintah dan tujuan memasyarakatkan penggunaan produk dalam negeri dapat terlaksana yang dimulai dari abdi negara tersebut sebagai contoh nyata. Secara tidak langsung, program ini akan memacu dunia usaha nasional untuk selalu meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta mutu produknya guna meraih kepercayaan konsumen dalam negeri, mendorong tumbuhnya produk-produk baru dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memperkuat basis produksi nasional agar mampu bersaing di pasar dalam negeri dan menjadi prioritas bagi belanja pemerintah, membangun kesadaran serta menciptakan pemahaman bahwa

---

<sup>108</sup>“Pedoman Pemberian Penghargaan P3DN,” Diakses dari [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id), diakses pada 6 Juni 2012, pukul 15.08 WIB.

industri dalam negeri telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, memberikan teladan bagi masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri, dan membangun kecintaan bangsa Indonesia terhadap produk dalam negeri.

Program nasional P3DN memang sangat baik namun implementasinya kurang maksimal. Pemerintah mencanangkan berbagai *tagline* yang cinta produk lokal seperti Aku Cinta Indonesia, Aku Bangga Menggunakan Produk Dalam Negeri dan lain-lain. Namun apakah makna tersebut jika industri nasional tidak berbenah. Produk TPT khususnya batik merupakan salah satu konten kebijakan pemerintah untuk mencintai produk nasional. Pemerintah mencanangkan penggunaan batik setiap hari Jumat. Perlu diketahui, program tersebut belum maksimal meningkatkan produk TPT karena produk TPT nasional tidak hanya batik sehingga bagaimana industri TPT Indonesia mampu berinovasi dan kreatif sebagai modal utama merebut kembali pasar domestik dari produk-produk impor tentunya ditunjang dengan harga yang relatif murah sehingga peran pemerintah kembali menjadi pendukung daya saing industri mengurangi beban biaya ekonomi tinggi yang selama ini menjadi kendala pertumbuhan industri.

Dalam konteks ekonomi, P3DN tidak hanya bicara tentang mengefektifkan belanja negara dan pengendalian impor, tetapi pada saat yang bersamaan harus mampu mengarahkan belanja konsumsi masyarakat, belanja investasi dan penguatan ekspor. Itulah gambaran secara menyeluruh dan utuh tentang makna strategis yang terkandung dalam nilai misi nasional P3DN. Jadi bukan sekedar cinta, bangga dan seruan tentang penggunaan produk nasional. P3DN adalah tatanan nilai yang harus menjadi *mainstream* pembangunan ekonomi bangsa saat ini dan di masa depan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih menyeluruh, berkualitas dan berkelanjutan.

### **III.1.2 Peningkatan daya saing industri**

Pemerintah menyadari daya saing merupakan hal penting yang harus dimiliki dalam suatu perjanjian bebas. Banyaknya keluhan dari industri selama ini terkait dengan daya saing industri Indonesia yang lemah dibandingkan dengan China. Dalam meningkatkan daya saing, implementasi kebijakan peningkatan industri terkait dengan kebijakan pemerintah dalam membenahan infrastruktur,

perbankan, energi dan teknologi menjadi sorotan penting karena dalam industri kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap daya saing industri termasuk industri TPT. Kebijakan Pemerintah dalam strategi peningkatan daya saing terkait dengan restrukturisasi mesin, pengamanan suplai energi dan pembenahan infrastruktur. Dengan kebijakan yang pro industri akan mengurangi ekonomi biaya tinggi yang dihadapi industri TPT.

### III.1.2.1 Restrukturisasi permesinan

Industri tekstil dan produk tekstil merupakan salah satu industri yang di prioritaskan untuk dikembangkan karena memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional yaitu sebagai penyumbang devisa negara, menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar, dan sebagai industri yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sandang nasional. Hal ini dapat ditunjukkan melalui perolehan surplus ekspor terhadap impor selama satu dasawarsa terakhir, bahkan saat krisis ekonomi melanda dunia, ITPT Nasional masih dapat mempertahankan surplus perdagangannya dengan nilai tidak kurang dari US\$ 5 milyar, penyerapan tenaga kerja 1,34 juta jiwa, capaian TKDN hingga 63% dan berkontribusi memenuhi kebutuhan domestik sebesar 46%.<sup>109</sup> Namun, performa ekspor-impor TPT Nasional yang cukup baik itu belum dapat menjadi jaminan bahwa ke depan industri TPT masih tetap dapat bersaing, mengingat kinerja ekspor selama lima tahun terakhir cenderung melambat, akibat dari kompleksitas berbagai faktor yang dihadapi industri TPT. Sementara industri TPT Nasional memiliki cukup banyak faktor yang potensial berpengaruh melemahkan daya saing, baik faktor internal maupun faktor eksternal, yang perlu segera diselesaikan dengan program kerja yang konkrit, implementatif, terarah, dan sinergis.

Salah satu permasalahan yang dihadapi industri TPT adalah kondisi permesinan yang teknologinya sudah usang dan perlu diremajakan, belum tersedianya industri permesinan tekstil di dalam negeri yang mengakibatkan ketergantungan dengan mesin impor sehingga industri mengalami kendala dalam

---

<sup>109</sup>Biro Umum dan Humas Kemenperin, "Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Revitalisasi," Siaran Pers Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian 21 Juli 2010, diakses dari: <http://www.kemenperin.go.id/artikel/60/Industri-Tekstil-Dan-Produk-Tekstil-Di-Revitalisasi>, diakses pada 5 Juni 2012, pukul 15.05 WIB.



impor mesin terkait besarnya dana yang dikeluarkan. Bertolak dari kondisi itulah, maka Kementerian Perindustrian mengambil langkah konkrit sebagai upaya peningkatan penguatan daya saing ITPT dengan memaksimalkan nilai tambah produk ITPT dalam negeri.

Di sektor hilir TPT, restrukturisasi permesinan sangatlah dibutuhkan sehingga bisa lebih efisien serta menghasilkan produk berkualitas tinggi. Sebagian besar permesinan TPT itu sudah berusia 15-20 tahun atau 3-4 generasi terbelakang dari teknologi terbaru, sehingga perlu ditingkatkan efisiensinya dan kualitas teknologi yang diterapkan dalam industri tersebut. Langkah restrukturisasi permesinan sebagai salah satu usaha meningkatkan kapasitas produksi TPT sebenarnya telah dijalankan pemerintah melalui kebijakan kementerian industri sejak 2007 dengan No.81/ILMTA/PER/3/2007 yang memberikan insentif untuk pembelian mesin tekstil modern guna meningkatkan daya saing sektor tekstil dan produk tekstil Indonesia.<sup>110</sup> Adapun mekanisme bentuk subsidi meliputi: Skema I, pemerintah memberikan rabat 11 persen dari harga pembelian mesin produksi sehingga perusahaan harus mampu untuk mengatur sistem keuangan mereka sendiri. Mekanisme awal ini memiliki anggaran Rp 175 Milyar atau 78 persen dari total dana. Skema II, menawarkan pinjaman lunak dengan bunga 8% per tahun dalam jangka waktu 5 tahun. Pinjaman ini untuk 75% dari harga pembelian dengan pemilik perusahaan memberikan kontribusi 25% sebagai uang muka. Setiap perusahaan dapat menerima bantuan maksimal Rp 5 milyar untuk setiap skema. Mengingat dalam skema I memberikan 11% dan skema II 75% maka mekanisme ini diperuntukkan untuk kebutuhan perusahaan yang berbeda-beda sehingga pembelian mesin pun dengan tipe yang berbeda. Kedua skema tersebut telah diumumkan dan disosialisasikan melalui lokakarya tingkat provinsi pada bulan Mei dan Juni 2007.

Kementerian Perindustrian sejak tahun 2007-2009 telah melakukan Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan, yang bertujuan untuk mendorong industri TPT melakukan peremajaan permesinannya dengan penyaluran dana program yang sebesar Rp.504,77 miliar, telah terjadi investasi swasta senilai Rp.4,90 triliun, penyerapan tenaga kerja sebanyak 46.902 orang, peningkatan

---

<sup>110</sup> Erin Thébaault-Weiser, *A Review of Select Policies of The Indonesian Ministry of Industry*, The United States Agency for International Development, Maret 2008, h. 24.

produksi 15-28%, penghematan energi 6-18% serta peningkatan produktivitas sekitar 7% hingga 17 %.<sup>111</sup>

Pada tahun 2010, selama periode pendaftaran mengikuti program yaitu 29 Maret-30 Juni 2010 telah terdaftar 202 industri TPT dengan perkiraan nilai investasi senilai Rp.2,33 triliun dengan bantuan senilai Rp.212,66 miliar atau 147% dari pagu yang tersedia. Dengan kata lain pada Tahun Anggaran 2010 terjadi defisit anggaran sebesar Rp.68,31 miliar, sehingga 91 industri TPT peserta Program terkategori *waiting list* dan Kementerian Perindustrian memandang program restrukturisasi mesin atau peralatan saja belumlah cukup untuk meningkatkan daya saing.

Restrukturisasi mesin TPT yang dikelola kementerian perindustrian masih belum optimal ketika diimplementasikan tahun 2007 melihat dana yang dialokasikan hanya menyerap kurang dari 50 persen. Selain itu, industri yang berkualifikasi lebih mengarah pada industri besar sedangkan dalam ACFTA khususnya bersaing dengan China industri berskala menengah dan kecil lebih terkena imbas.

Pada awal program restrukturisasi mesin di tahun 2007, Kemenperin menyiapkan dana Rp 255 miliar, lalu naik menjadi Rp 330 miliar di 2008. Namun, memasuki 2009, dana subsidi restrukturisasi mesin tekstil menyusut menjadi Rp 240 miliar dan di 2010 kembali turun menjadi Rp 150 miliar. Tahun 2011, Kemenperin malah hanya menganggarkan subsidi revitalisasi mesin untuk TPT sebesar Rp 140 miliar.<sup>112</sup> Tidak hanya itu, dalam program kebijakan restrukturisasi tersebut yang bertujuan agar produksi efisien industri TPT diberi insentif pembelian mesin tekstil dan produk tekstil sebesar 10 persen, namun masih dikenai lagi bea masuk mesin sebesar 5 persen. Hal ini menjadi sangat ironi melihat kondisi yang perlu bantuan harus kena pajak bea masuk impor mesin. Dengan demikian, beban TPT tetap saja berat dan Produk TPT Indonesia semakin

---

<sup>111</sup> Biro Umum dan Humas Kemenperin, *loc.cit.*

<sup>112</sup>Rizki Caturini, "Benahi industri lokal agar tak makin terjungkal," diakses dari: <http://lipsus.kontan.co.id/v2/acfta/benahi-industri-lokal-agar-tak-makin-terjungkal>, diakses pada 24 April 2012, pukul 19.57 WIB.

sulit menghadapi produk sejenis dari China.<sup>113</sup> Dengan semakin berkurangnya anggaran restrukturisasi mesin pada industri TPT semakin melemahkan daya saing industri.

### III.1.2.2 Infrastruktur

Infrastruktur memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Semakin baik keadaan infrastruktur, semakin baik pula pengaruhnya terhadap keadaan ekonomi. Infrastruktur merupakan urat nadi perekonomian, yang menentukan lancar atau tidaknya kegiatan perekonomian. Jika memiliki infrastruktur yang bagus, bisa dipastikan sebuah daerah memiliki keadaan ekonomi yang kuat. Sebaliknya, jika suatu daerah memiliki infrastruktur yang relatif jelek, keadaan ekonominya pun cenderung tidak begitu bagus.

Kebijakan infrastruktur dapat dijadikan strategi induk oleh pemerintah, yakni menjadi lokomotif pergerakan perekonomian. Strategi ini pernah dilakukan Amerika Serikat dan Eropa pada masa krisis tahun 1930-an. Atau, contoh kasus China yang saat ini melakukan kombinasi strategi kebijakan pengembangan infrastruktur, yang dipadukan dengan strategi daya saing ekspor. Sehingga, tidak salah jika pemerintah menggiatkan perhatian publik terhadap infrastruktur, sekaligus melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur. Namun, masalahnya adalah apakah implementasi strategi dan kebijakan tersebut bisa berjalan efektif di lapangan.

Infrastruktur merupakan penunjang penting dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia. Panjangnya akses yang dibutuhkan industri dalam pendistribusian produk karena infrastruktur yang masih kurang. Biaya transportasi menjadi lebih mahal karena akses jalan raya yang rusak ataupun ditempuh dengan sangat panjang. Pemerintah mencanangkan kebijakan perbaikan infrastruktur dalam strategi kebijakannya namun kenyataan dalam 10 tahun terakhir anggaran infrastruktur yang dialokasikan Pemerintah Indonesia relatif sangat kecil dan cenderung menurun dari 3,7% (1999), 3,6% (2003), 2,9% (2008) hingga hanya

---

<sup>113</sup>Erlangga Djumena, Produk China di Setiap Lini, diakses dari: <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/04/11/08161654/Produk.China.di.Setiap.Lini>, diakses pada 7 Mei 2012, pukul 01.00 WIB.

1,5% (2010),<sup>114</sup> tidak mengherankan bila infrastruktur menjadi salah satu kendala serius yang dihadapi sektor ekonomi untuk memperbaiki dan meningkatkan daya saingnya. Dengan infrastruktur transportasi dan energi yang buruk perusahaan industri kehilangan 4-6% dari total penjualan mereka sesuai hasil studi *World Bank* 2005.<sup>115</sup>

Kebijakan pemerintah yang hanya menganggarkan dana yang terus menurun bagaimana iklim pro industri yang mampu meningkatkan daya saing. Hal berbeda terlihat dari pemerintahan China yang memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menciptakan lingkungan yang pro-bisnis. Misalnya, untuk membangun dan menjaga kualitas infrastruktur, dalam sepuluh tahun terakhir, anggaran infrastruktur sebagai rasio terhadap Produk Domestik Bruto China selalu berada dikisaran 7,5 persen – 10 persen. Bandingkan dengan Indonesia yang tidak pernah lebih dari 5 persen. Padahal untuk memenangkan persaingan dengan China, penyediaan infrastruktur adalah hal yang paling utama, karena infrastruktur yang buruk menyebabkan *high cost economy*. Selama lima tahun periode pemerintahan Presiden SBY Indonesia hanya membangun jalan tol sepanjang 120 km, sedang China telah membangun jalan tol sepanjang ribuan kilometer, kira-kira 5.000-15.000 km setahun.<sup>116</sup>

Pada aspek logistik, masih tingginya biaya logistik merupakan salah satu faktor utama penyebab ekonomi biaya tinggi. Berdasarkan survei Indeks kinerja logistik yang dilakukan oleh Bank Dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-43 dan pada tahun 2010 menurun drastis ke peringkat 75 lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, China, Thailand, dan India. Penyebab utamanya adalah biaya logistik domestik di Indonesia yang masih sangat tinggi, dimana peringkatnya adalah 92, jauh lebih buruk dibandingkan Vietnam dan Filipina yang menduduki peringkat 17 dan 19.

Sementara menurut laporan *Doing Business* 2011 waktu yang diperlukan untuk mengimpor barang dari luar negeri mencapai 27 hari, jauh lebih lama bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia 14 hari,

---

<sup>114</sup> Latif Adam, "ACFTA dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia-China," *Inspirasi*, 2010, Vol. 2, No. 2, h. 8-9.

<sup>115</sup> Latif Adam dan Siwage Dharma Negara, *loc.cit.*, h. 1.

<sup>116</sup> Sofyan Wanadi "ACFTA, Tantangan Ekonomi Indonesia," *Veritas Dei, Reformed Center for Religion and Society*, Juni 2010, Vol. II, Tahun I, h. 6.

Thailand 13 hari, Philipina 16 hari, bahkan Vietnam hanya memerlukan waktu 21 hari. Begitu juga waktu yang diperlukan untuk memulai suatu usaha di Indonesia memerlukan 47 hari dengan melalui 9 prosedur, yang di bawah kinerja beberapa negara ASEAN lainnya, seperti di Malaysia 17 hari dengan 9 prosedur, Thailand 32 hari dengan 7 prosedur, dan Indonesia sedikit di atas Vietnam yang masih memerlukan waktu 50 hari dengan 11 prosedur. Pelayanan di pelabuhan juga masih memerlukan waktu yang relatif lama. Menurut kajian JICA (2004) waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pemasukan barang di pelabuhan Tanjung Priok rata-rata mencapai 7 hari, lebih lama dari proses kepabeanan yang memerlukan waktu 5,5 hari, sementara itu di Singapura hanya 1 hari, USA dan Jerman 2 hari, dan Jepang 3,1 hari. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya peringkat logistik Indonesia adalah masalah infrastruktur, kompetensi logistik, dan ketepatan waktu.<sup>117</sup> Kondisi logistik turut mempengaruhi waktu dan biaya melakukan ekspor. Mahalnya biaya logistik dalam negeri di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh tingginya biaya transportasi darat dan laut, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor lain yang terkait dengan regulasi, SDM, proses dan manajemen logistik yang belum efisien, dan kurangnya profesionalisme pelaku dan penyedia jasa logistik nasional sehingga menyebabkan belum efisiennya perusahaan jasa pengiriman barang dalam negeri.

Waktu diperlukan di Indonesia untuk melakukan ekspor termasuk lebih lama dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Disamping itu, biaya ekspor per kontainer juga masih cukup tinggi dibandingkan dengan negara tetangga sebagai akibat dari sistem logistik yang belum efisien. Penyebab utama tingginya biaya ekspor per kontainer adalah biaya transportasi kargo, belum efisiennya manajemen di pelabuhan serta rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur. Selain itu, adanya pungutan-pungutan tidak resmi mengakibatkan semakin tingginya biaya logistik di Indonesia.

Upaya mengejar ketertinggalan dalam pengembangan logistik memerlukan lompatan dan terobosan agar daya saing Indonesia dapat mengimbangi perkembangan daya saing negara-negara lain, karena negara lain di saat yang

---

<sup>117</sup>”Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI periode 2010–2014,” diakses dari: [www.kemendag.go.id/files/publikasi/link\\_khusus/2005/20051210renstra-2005.pdf](http://www.kemendag.go.id/files/publikasi/link_khusus/2005/20051210renstra-2005.pdf), diakses pada 4 April 2012, pukul 23.00 WIB, h. 41.

sama juga melakukan pembenahan terhadap sistem logistiknya. Secara makro, lompatan yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan konsep wilayah depan dan wilayah dalam dengan menjadikan pelabuhan hub internasional menjadi Logistik Port. Secara mikro adalah (a) pengembangan pelabuhan *short-sea shipping* di wilayah, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Kawasan Indonesia Timur sebagai alternatif pengembangan infrastruktur jalan raya, dan (b) pengembangan pendukung logistik di wilayah laut dalam untuk menunjang aktivitas eksploitasi kekayaan laut Indonesia.

### III.1.2.3 Distribusi Energi dan Listrik

Distribusi energi seperti batu bara dan gas yang dibutuhkan industri merupakan kendala yang sering terjadi. Seperti yang telah diulas sebelumnya, seringnya pemadaman listrik membuat kinerja industri tidak efektif begitu pula dengan sektor industri TPT. Tidak hanya listrik, bahan bakar seperti gas dan batu bara pun sulit didapat industri hal ini dikarenakan pemerintah lebih mengutamakan ekspor bahan mentah termasuk batu bara dan gas sehingga untuk kebutuhan konsumsi domestik menjadi tidak terpenuhi.<sup>118</sup> Jumlah suplai gas sering berfluktuasi, kadang berkurang, kadang berlebih dan bahkan kerap terhenti sama sekali. Akibatnya, banyak perusahaan yang terpaksa mengalihkan sumber pasokan mereka ke batubara yang lebih boros dan tidak hemat lingkungan. Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga gas untuk Industri nasional ternyata dinilai sebagai langkah salah untuk melakukan efisiensi dan meningkatkan pendapatan negara. Pasalnya selama ini kerugian negara dalam penanganan gas justru didapat dari nilai jual gas yang jauh dari harga kewajaran dan kuota ekspor gas yang justru lebih besar ke luar negeri sementara kuota untuk konsumsi industri nasional sangat minim.

Ketergantungan Indonesia terhadap migas masih sangat tinggi. Pada tahun 2011, sebanyak 10 asosiasi industri mengaku hanya mendapat pasokan gas setengah dari kebutuhan mereka. Dari sekitar 1.500 juta kaki kubik per hari gas

---

<sup>118</sup>Ana Shofiana S, "Kebijakan Ekspor Gas Rugikan Industri DN," diakses dari <http://www.centroone.com/news/2012/05/1s/kebijakan-ekspor-gas-rugikan-industri-dn/>, diakses pada 4 Juni 2012, 1 Mei 2012, pukul 20.00 WIB.

yang diperlukan, hanya terdapat pasokan sebesar 800 juta kaki kubik perhari.<sup>119</sup> Permasalahan tersebut juga didukung oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat. Kelangkaan gas merupakan masalah yang serius dan berdampak terhadap pertumbuhan industri dimasa mendatang. Gas terus diekspor ke negara-negara lain, mereka berkecukupan sedangkan negara kita sendiri kekurangan, terutama di sektor industri.

Pemerintah Indonesia melalui kementerian Industri pada tahun 2010-2014 memiliki strategi peningkatan daya saing melalui kebijakan untuk mengamankan suplai energi dan diversifikasi energi termasuk listrik bagi industri. Strategi mengamankan suplai energi diwarnai kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang diterapkan pada 1 Juli 2010. Kenaikan ini juga menjadi masalah yang cukup rumit bagi pengusaha tekstil karena berkaitan dengan perhitungan *cost* dan harga jual dengan *buyer*. Selama ini kontrak pesanan dilakukan tiga bulan sebelum produksi sehingga perhitungan harga jualnya masih menggunakan perhitungan sebelum kenaikan TDL. Hal ini akhirnya mengakibatkan turunnya marjin keuntungan yang diperoleh pengusaha tekstil karena tidak mungkin lagi menaikkan harga jualnya terhadap pembeli. Berdasarkan data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia pada Juni 2010, biaya produksi industri tekstil meningkat hingga 4,5% dimana komponen listrik menyumbang 30% dari keseluruhan biaya produksi tekstil.<sup>120</sup> Kenaikan TDL tersebut membuat sebagian industri mengeluhkan tingginya persentase kenaikan tersebut sehingga Pemerintah dan DPR memutuskan memberi batas maksimum kenaikan TDL bagi industri 18%.<sup>121</sup> Kebijakan ini digulirkan untuk membantu para pengusaha agar bisa bertahan di kala krisis ekonomi melanda.

Kementerian perindustrian guna meningkatkan suplai listrik telah memfasilitasi pembangunan PLTU Batubara skala kecil di 70 lokasi di luar Jawa Bali oleh PT. PLN yang dilaksanakan oleh *Engineering Procurement and Construction* (EPC) nasional sebagai *main contractor*, antara lain telah ditetapkan

---

<sup>119</sup>“Kebijakan Salah Kaprah, Gas Indonesia Ternyata 'Diobral' ke Luar Negeri,” diakses dari <http://www.seruu.com/energi--pertambangan/minyak--gas-bumi/artikel/kebijakan-salah-kaprah-gas-indonesia-ternyata-diobral-ke-luar-negeri>, diakses pada 3 Juni 2012, pukul 13.45 WIB.

<sup>120</sup> Anna Ailsa Alethea, “Pengaruh “Kebijakan” Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Terhadap Inflasi di Indonesia,” diakses dari <http://dean2722.blogspot.com/2010/12/pengaruh-kebijakankenaikan-tarif-dasar.html>, diakses pada 2 Juni 2012, pukul 12.57 WIB

<sup>121</sup> Heru Pamuji, “Simalakama Capping Listrik,” *Gatra*, Nomor 11, 20 Januari 2011, h. 74.

bahwa *boiler* harus dipasok oleh industri dalam negeri. Selain itu, Indonesia telah mampu diproduksinya turbin dan pompa air untuk PLTU 100 MW, trafo 500 kV, *Gas Insulated Switchgear* (GIS) 500 kV di dalam negeri.<sup>122</sup>

Keberhasilan strategi pemerintah untuk diversifikasi energi menggunakan batu bara dan air untuk pembangkit listrik tenaga uap ternyata belum mampu mengatasi biaya ekonomi tinggi industri karena kebijakan *capping* yaitu batas maksimum kenaikan TDL bagi industri 18% dicabut dalam edaran kepada kalangan pengusaha, awal Januari 2011, PLN tidak lagi menerapkan kenaikan maksimum TDL (tarif dasar listrik) 18% pada pelanggan industri mulai 1 Januari 2011. Kebijakan pembatasan itu disebabkan industri yang sudah lama beroperasi ternyata tidak bisa menyesuaikan dengan kenaikan TDL, sesuai dengan Permen Nomor 7 Tahun 2010 pada pertengahan 2010. Namun industri baru tetap dikenai tarif listrik multiguna dan daya maksimum, yang membuat mereka menanggung biaya listrik dua hingga empat kali lipat dari tarif yang ditetapkan, sehingga terdapat disparitas harga antara industri baru dan lama.<sup>123</sup>

Protes keras datang dari sebagian pelaku industri yang harus menanggung kenaikan tarif listrik hingga 30% akibat pencabutan *capping* tersebut Mereka pun melobi pemerintah dan politisi untuk menggagalkan rencana pencabutan *capping* oleh PLN itu. Mereka menentang pencabutan *capping* itu karena membuat beban usaha semakin berat. Selain itu, pada 2011 ini pengusaha ingin kembali bersama pemerintah membahas Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2010 yang memberatkan industri. Sebab tarif listrik berdasarkan peraturan menteri itu, walaupun dengan kompensasi beban biaya dihapus, disinsentif daya maksimum plus tidak berlaku, tarif multiguna dicabut, kenyataannya biaya total tagihan listrik bagi industri justru naik cukup signifikan.

Dengan gempuran produk impor, industri tekstil dan produk tekstil masih terbebani dengan kenaikan listrik yang tentu mempengaruhi harga produk lokal dan hal ini semakin membuat produk nasional menjadi mahal sehingga memilih produk China yang lebih murah menjadi pilihan. Menyadari pentingnya listrik

<sup>122</sup>“Revitalisasi Permesinan Industri,” diakses dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/20/Revitalisasi-Permesinan-Industri>, diakses pada 14 April 2012, pukul 23.56 WIB.

<sup>123</sup> Heru Pamuji, *loc.cit.*, h. 76.



bagi industri nasional dan kenaikan TDL mengurangi daya saing sehingga membuat PLN dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencari *win-win solution* sepakat bahwa pembayaran tagihan listrik tidak lagi memakai capping 18 persen dengan menerima tawaran jalan tengah yang diajukan PLN bagi pengusaha yang berpotensi terganggu *cashflow* nya saat membayar tagihan listrik tanpa capping dengan membayar secara cicilan.<sup>124</sup>

Menanggapi kebijakan pencabutan *capping*, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat mengatakan industri tekstil telah sepakat untuk membayar tagihan listrik secara penuh sesuai dengan Permen ESDM No. 07/2010 tentang Tarif Tenaga Listrik (TTL) oleh PT PLN (Persero). Langkah tersebut untuk menghilangkan disparitas TTL antara industri baru dan lama. Hanya saja untuk menghindari terjadinya shock terhadap aliran dana perusahaan, asosiasi industri juga menyepakati usulan PLN untuk melakukan pembayaran secara mencicil. Perusahaan tekstil akan menunda sebagian pembayaran tagihan dan melungsurkannya untuk tagihan berikutnya.<sup>125</sup> Dengan kesepakatan itu diharapkan PLN dan industri dapat meningkatkan kinerja masing-masing perusahaan. Voltase harus stabil sehingga tidak merusak perangkat TPT, sehingga ada timbal balik.

Listrik dan energi merupakan faktor penting dalam menjalankan pola industrialisasi dan hal ini disadari betul oleh China. Hal yang bertolak belakang terjadi dalam perkembangan industri China dimana pemerintah China memilih untuk memprioritaskan penyediaan listrik murah. Listrik merupakan faktor penting untuk menciptakan daya saing dan menarik investasi. Karena itu dalam penyediaan listrik, China memilih memanfaatkan batu bara yang melimpah.

Sedangkan di Indonesia, rendahnya daya tarik industri manufaktur, antara lain akibat kegagalan PLN menjaga pasokan listrik dan tingkat harga. Tingginya biaya produksi terjadi karena PLN tidak mendapat dukungan pasokan energi murah baik batu bara maupun gas dari pemerintah. Padahal Indonesia memiliki

<sup>124</sup>Kartika Candra, “ APINDO Akui Sepakat Bayar Listrik Tanpa Capping,” diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2011/02/22/090315182/APINDO-Akui-Sepakat-Bayar-Listrik-Tanpa-Capping>, diakses pada 4 Juni 2012, pukul 14.35 WIB.

<sup>125</sup>TPT sepakat bayar listrik penuh - PLN tawarkan opsi pelunasan dengan skema cicilan,” diakses dari: <http://www.ekon.go.id/clipping/2011/02/14/12-13-14-februari-2011>, diakses pada 7 mei 2012, pukul 02.13 WIB.

kekayaan energi alam yang tidak kalah jika dibandingkan dengan China. Tetapi Indonesia lebih memilih menjadikan batu bara dan gas sebagai komoditas ekspor, bukan modal untuk membangun Industri.

### III.1.3 Penguatan Ekspor

Dalam membahas ACFTA memang isu utama adalah bagaimana mengamankan produk lokal dan peningkatan daya saing baik untuk berkompetisi dengan produk impor di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam konteks perdagangan bebas ASEAN-China, penguatan ekspor ditujukan untuk memanfaatkan pasar ASEAN dan China. Langkah strategis yang diambil pemerintah dengan penguatan peran perwakilan luar negeri baik atase perdagangan (ATDAG) dan pemanfaatan Indonesian Trade Promotion Center di luar negeri (ITPC).<sup>126</sup>

Dalam rangka meningkatkan ekspor dan penetrasi produk Indonesia di China, berbagai upaya pemerintah untuk membantu memasarkan produk-produk unggulan Indonesia terus dilakukan antara lain dengan mendirikan rumah promosi produk-produk unggulan Indonesia di Nanning. Namun, karena peran pemerintah kurang dilibatkan dalam setiap kegiatan bisnis untuk memasuki pasar China, maka terkesan ada kendala dan kurang dimanfaatkan serius. KBRI Beijing rutin mengadakan promosi antara lain di kota-kota strategis di wilayah China seperti di Beijing (2 kali), Shenzhen, Xiamen, Fuzhou, Nanning dan Nanjing.<sup>127</sup>

Pemanfaatan ITPC di luar negeri diharapkan mampu membawa misi kepentingan Indonesia dan Perwakilan perdagangan di luar negeri memiliki peran sebagai ujung tombak dan kunci penetrasi pasar melalui fungsi diplomasi perdagangan, fungsi pemasaran dan promosi, serta fungsi pengembangan citra. Memang kesan permasalahan dari implementasi ACFTA adalah membanjirnya produk China namun dengan strategi kebijakan dan *bargaining power* dalam

<sup>126</sup> Andri Gilang Nugraha, “Tantangan dan Peluang Serta Langkah-Langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh Asean-China *Free Trade Agreement* (ACFTA),” *Buletin KPI*, 2010, edisi-02, h. 6.

<sup>127</sup> Nusrina Yuliasuti, “Pasar China Belum Digarap Serius,” diakses dari: <http://jogja.antaranews.com/berita/299434/pasar-China-belum-digarap-serius>, diakses 10 Juni 2012, pukul 05.26 WIB.

penetrasi pasar China diharapkan dapat meningkatkan ekspor Indonesia khususnya hasil industri dan bukan barang mentah ataupun produk dengan *value added* rendah.

### **III.2 Dampak ASEAN-China FTA terhadap Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia**

Tahun 2010 merupakan awal pemberlakuan ACFTA atau *ASEAN-China Free Trade Area*. Pro dan kontra mengenai pemberlakuan ACFTA marak diperbincangkan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap ACFTA sebagai sebuah tantangan demi kemajuan Indonesia, namun sebagian lainnya menganggap ACFTA sebagai ancaman bagi perekonomian Indonesia khususnya sektor Industri. Berbagai demonstrasi terjadi di Indonesia menyambut pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN-China. Pengusaha dan buruh berdiri di sisi yang sama dalam melakukan penolakan atas implementasi kesepakatan tersebut. Keduanya sepakat menolak karena beratnya konsekuensi yang harus mereka tanggung sebagai akibat diberlakukannya ASEAN-China FTA, baik dari sisi industri maupun tenaga kerja.

ACFTA mulai berlaku pada 1 Januari 2010 dengan menggunakan prinsip perdagangan bebas. Perdagangan bebas tersebut didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan, yakni hambatan yang diberlakukan pemerintah dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Logika kesepakatan perdagangan bebas yang dibangun dengan China tersebut, tidak lebih dari upaya negara-negara maju dalam memperluas pangsa pasar produknya, yang mana disisi lain justru mematikan industri domestik negara berkembang. Di Tinjau secara teori kesepakatan ini akan bermakna besar bagi kepentingan geostrategis dan ekonomis Indonesia dan Asia Tenggara secara keseluruhan. Pertumbuhan perekonomian China yang relatif pesat pada saat itu menjadikan China salah satu aktor politik dan ekonomi yang patut diperhitungkan Indonesia dan ASEAN. Namun tidak sedikit pula yang menentang penerapan ACFTA karena dikhawatirkan bakal menghancurkan industri nasional. Dengan tarif bea masuk barang-barang dari China ke ASEAN, khususnya Indonesia menjadi 0%, tentu akan mengancam industri dalam negeri

dikarenakan produk China terkenal dengan harga murah. Terlebih itu semua, tentu bergantung pada jenis, karakter serta keunggulan komparatif masing-masing produk, usaha, dan jasa industri nasional.

Logika kesepakatan perdagangan bebas yang dibangun dengan China tersebut, pemerintah Indonesia melontarkan tiga alasan utama mengapa kesepakatan ACFTA ini diambil, yakni : Pertama, penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan nontarif di China membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan ke negara yang penduduknya terbesar dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Kedua, penciptaan rezim investasi yang kompetitif dan terbuka membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari China. Dan Ketiga, peningkatan kerja sama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas membantu Indonesia melakukan peningkatan pembangunan kapasitas, transfer teknologi dan kapasitas manajerial.

Fenomena perdagangan bebas tidak bisa dihindari dari suatu perekonomian suatu negara yang terbuka. Perdagangan bebas telah menciptakan sebuah akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Namun ketika memasuki tahun 2010 yaitu awal pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN-China, sejumlah kalangan, terutama kalangan pengusaha meminta pemberlakuannya ditunda sampai pengusaha domestik benar-benar siap menghadapi ACFTA. Penundaan tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran dari penerapan liberalisasi perdagangan tersebut akan menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dari sejumlah perusahaan karena produknya kalah bersaing di pasaran. Jika terjadi PHK besar-besaran maka tingkat pengangguran akan semakin tinggi begitupula dengan tingkat kemiskinan akan semakin tinggi pula. Melihat kinerja perdagangan Indonesia-China sebelum implementasi ACFTA cenderung defisit, wajar saja kekhawatiran tersebut muncul. Menurut Menteri perindustrian setidaknya ada lima sektor yang terancam dari pemberlakuan ACFTA yaitu elektronik, furnitur, besi, permesinan serta tekstil dan produk tekstil.<sup>128</sup> Dengan terancamnya industri tersebut mengindikasikan adanya kecenderungan

---

<sup>128</sup> Hery Lazuardi & Maria Y. Benyamin, "ACFTA hits 5 industrial sectors," diakses dari <http://www.lkdi.org/cms/id/2011/09/19/acfta-hits-5-industrial-sectors/>, diakses pada 30 April 2012, pukul 22.15 WIB.

deindustrialisasi sebagaimana ketidakmampuan industri bersaing yang mengakibatkan kemunduran bagi industri nasional. Jika dampak deindustrialisasi itu benar, maka bisa dipastikan kampanye pemerintahan SBY-Boediono untuk memerangi kemiskinan dan menekan angka pengangguran hanya tinggal wacana. Kementerian industri memprediksi dengan adanya ancaman deindustrialisasi itu berpotensi bagi terjadinya PHK massal terhadap 3 hingga 7,5 juta pekerja dalam sektor industri.<sup>129</sup>

Tekstil dan produk Tekstil Indonesia merupakan salah satu industri yang dikatakan terancam dengan diberlakukannya ACFTA. Industri Tekstil dan Produk tekstil merupakan salah satu industri yang berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia sehingga dengan pro dan kontra mewarnai awal pemberlakuan ASEAN-China FTA tersebut, mengetahui strategi kebijakan dan dampak ACFTA dalam perdagangan tekstil dan produk tekstil menjadi penting demi pertumbuhan perekonomian Indonesia dan industri secara khusus. Sebagaimana diketahui, sebagai salah satu industri padat karya pemberlakuan ACFTA tidak hanya berdampak pada produksi namun terkait pula dengan penyerapan tenaga kerja dari industri terkait. ACFTA sebagai sebuah perjanjian perdagangan tentunya memberikan dampak sebagai hasil sebuah perjanjian baik bersifat positif maupun negatif bagi perdagangan Indonesia tidak terkecuali dalam sektor tekstil dan produk tekstil. Pemerintah sebagai aktor terjadinya kesepakatan ini tentunya memiliki kebijakan menghadapi era perdagangan bebas ASEAN-China tersebut, guna meraih manfaat dari ACFTA sehingga melihat korelasi dampak dan strategi kebijakan Indonesia dapat digunakan untuk perkembangan pelaksanaan perdagangan bebas ini mengingat masa implementasinya masih panjang.

Selayaknya dua sisi mata uang, dibalik berdampak positif tentunya ada sisi lain yang berdampak negatif bagi pertumbuhan dan perdagangan dalam sektor tekstil dan produk tekstil. Sebagaimana yang marak dibicarakan ketika menyongsong implementasi ACFTA awal tahun 2010, tekstil dan produk tekstil (TPT) diperkirakan akan terancam dengan adanya perjanjian bebas ASEAN-China tersebut. Kekhawatiran muncul melihat neraca perdagangan Indonesia

---

<sup>129</sup> Launa dan Azman Fajar, "ACFTA dan Ancaman Kedaulatan," *Jurnal Sosial Demokrasi*, Februari - Juni 2010, Vol. 8, No.3, h. 13.

khususnya tekstil dan produk tekstil yang terus mengalami defisit hingga 2009. Tidak hanya itu, sebelum ACFTA diberlakukan, sektor tekstil dan produk tekstil sudah jauh-jauh hari kalah bersaing. Di tahun 2009 lalu saja, setidaknya sekitar 271 pabrik atau perusahaan tutup. Akibatnya 18.396 buruh yang bekerja di industri ini harus rela menjadi penganggur karena ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).<sup>130</sup> Dengan demikian, memasuki babak baru ACFTA tahun 2010 ini menjadi suatu tanda tanya besar apakah perdagangan tekstil dan produk tekstil Indonesia berpotensi mengarah pada deindustrialisasi dari implementasi perdagangan bebas ASEAN-China atau sebaliknya akan mengarah pada pertumbuhan perdagangan dan industri Indonesia yang ditandai dengan kemampuan ekspor memaksimalkan penetrasi pasar China serta peningkatan daya saing industri dan penyerapan tenaga kerja dalam sektor industri tekstil dan produk tekstil Indonesia.

### **III.2.1 Neraca Perdagangan TPT Indonesia ke China**

Sejak awal pembentukan ACFTA, pemerintah Indonesia meyakini akan memberikan banyak manfaat ataupun keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Dengan integrasi perekonomian yang meliputi sebanyak 1,8 miliar konsumen (1,29 miliar dari China dan 550 juta dari ASEAN)<sup>131</sup> tentu menjadi pasar besar bagi anggota FTA ASEAN-China tersebut. Dari sisi volume perdagangan, nilai perdagangan ACFTA yang mencapai US\$ 200 milyar merupakan blok perdagangan terbesar setelah Uni Eropa dan NAFTA.<sup>132</sup> Dengan kata lain, potensi pasar ACFTA seharusnya sungguh luar biasa.

Kawasan Perdagangan Bebas antara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan China secara signifikan menguntungkan ekonomi dan perdagangan intra-regional serta akan menjadi tonggak bagi hubungan ekonomi ASEAN-China di masa datang. Penghapusan hambatan perdagangan antara ASEAN dan China diharapkan akan dapat memperkecil biaya produksi melalui skala ekonomi,

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> Setyani Sri Haryanti, "Indonesia Harus Tingkatkan Daya Saing dalam CAFTA," diakses dari: [www.e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank/.../24-2011](http://www.e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank/.../24-2011) diakses pada 5 Mei 2012, pukul 03.19 WIB.

<sup>132</sup> Prof. Mudrajad Kuncoro, PhD, "Impian di Balik FTA Asean-Tiongkok," diakses dari: <http://lepmida.com/column.php?id=252>, diakses pada 28 Mei 2012, pukul 21.18 WIB.

peningkatan perdagangan intra regional dan meningkatnya efisiensi perekonomian Indonesia.

Dengan penurunan tarif hingga 0% dalam skema perdagangan bebas China dan ASEAN ini tentunya memberikan akses positif bagi Indonesia dengan peningkatan akses ke pasar konsumen terbesar di dunia, China. Demikian ACFTA berpotensi dengan populasinya yang sejumlah hampir 2 milyar, yang pada tahun 2008 memproduksi lebih dari US\$ 6.6 triliun dan mencatat transaksi perdagangan barang ke sesama anggota senilai sekitar US\$ 4.3 triliun.<sup>133</sup>

Perjanjian ASEAN-China yang mengumbar keuntungan bagi Indonesia tidak serta merta membuat Indonesia lega. Pasar yang besar tidak menjamin produk Indonesia mampu memenuhi pasar China. Sebelum diberlakukan ACFTA, perdagangan Indonesia ke China terus mengalami defisit. Trend positif surplus perdagangan Indonesia terhadap China terlihat dari tahun 2002 hingga 2007. Namun dari tahun 2008 mendadak sontak berbalik arah menjadi defisit bagi pihak Indonesia sebesar 3,6 miliar dollar AS. Menilik neraca setahun sebelumnya, Indonesia masih menikmati surplus sebesar 1,1 miliar dollar AS. Dalam perdagangan nonmigas defisit neraca perdagangan Indonesia dengan China meroket dari 1,3 miliar dollar AS pada tahun 2007 menjadi 9,2 miliar dollar AS pada tahun 2008, atau meningkat lebih dari 600 persen. Selama Januari-Oktober 2009, defisit sudah mencapai 3,9 miliar dollar AS.<sup>134</sup> Perbandingan neraca ekspor dan impor nonmigas antara Indonesia dan China selalu menunjukkan angka defisit, bahkan selama tahun 2009 China menjadi negara pemasok barang impor nonmigas terbesar dengan nilai 12,01 milyar dolar AS.<sup>135</sup>

**Tabel 3.2 Ekspor Impor China-Indonesia pada 20 Sektor Industri (2010)**

<sup>133</sup> Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia, Bank Indonesia, Maret 2010, h. 34

<sup>134</sup> Faisal Basri, "FTA ASEAN-China dan Deindustrialisasi," diakses dari <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/12/21/06350379/FTA.ASEANChina.dan.Deindustri.alisasi>, diakses pada 19 Mei 2012, pukul 21.49 WIB.

<sup>135</sup> "Pertanian Indonesia Terancam ACFTA: Hancur Diterpa Impor, Buntung karena Ekspor," Diakses dari: <http://www.spi.or.id/?p=1799/>, diakses pada 28 Februari 2011, pukul 23.45 WIB.

No.	INDUSTRI	EKPOR KE CHINA (US\$)	IMPOR DARI CHINA (US\$)	SURPLUS/ DEFISIT (US\$)
1.	Baja hilir	62.609.562	1.899.043.446	-1.836.433.884
2.	Pertanian & Industri Hasil Pertanian	3.174.142.962	1.439.130.175	1.735.012.787
3.	Petrokimia hulu	5.028.958.283	1.289.418.739	3.739.539.544
4.	Tekstil	195.345.155	959.163.899	-763.818.744
5.	Benang dan kain	56.519.318	507.627.736	-451.108.418
6.	Alumunium	7.204.237	289.699.066	-282.494.829
7.	Hortikultura	16.087.203	192.218.463	-176.131.260
8.	Mesin perkakas	1.251.463	173.764.456	-172.512.993
9.	Elektronika dan kelistrikan	1.342.152	139.076.003	-137.733.851
10.	Serat Sintesis	38.593.231	137.225.204	-98.631.973
11.	Furnitur	7.657.020	94.250.385	-86.593.365
12.	Mainan anak	6.836.788	89.571.912	-82.735.124
13.	Sepatu/alas kaki	64.366.024	89.041.635	-24.675.611
14.	Makanan minuman	4.094.599	68.926.209	-64.831.610
15.	Plastik	30.037.949	58.487.325	-28.449.376
16.	Ban	4.053.716	38.621.924	-34.568.208
17.	Kosmetik	479.283	32.297.383	-31.818.100
18.	Alat Kesehatan	1.008.602	25.434.468	-24.425.866
19.	Kaca Lembaran	4.234.064	10.409.685	-6.175.621
20.	Pengolahan Kakao	40.470.097	540.535	39.929.562
<b>TOTAL</b>		<b>8.745.291.708</b>	<b>7.533.948.648</b>	<b>1.211.343.060</b>

Sumber: Badan Standar Nasional

Dari transaksi perdagangan menurut tabel 3.2, menunjukkan produk-produk China sangat dominan, sehingga Indonesia mengalami defisit perdagangan. Dari sini terlihat bahwa ekspor China ke Indonesia sangat ditopang oleh produk-produk hasil industri, sementara ekspor Indonesia ke China lebih mengandalkan produk-produk yang berasal dari sumber daya alam.

Neraca perdagangan Indonesia dan China kembali mengalami ketidakseimbangan sejak 2010 ketika ACFTA mulai diterapkan. Menurut data Badan Pusat Statistik, hingga Maret 2011 nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China mencapai US\$ 3,6 miliar sementara impor dari China mencapai US\$ 5,3 miliar, sehingga Indonesia mengalami defisit perdagangan US\$ 1,7 miliar.<sup>136</sup> Dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, nilai ekspor Indonesia ke China memang meningkat US\$ 500 juta. Tetapi nilai impor dari China dalam periode

<sup>136</sup>Jafar M Sidik, "Diplomat Eropa: Jangan Salahkan Produk China," diakses dari: <http://www.antaraneews.com/berita/257228/diplomat-eropa-jangan-salahkan-produk-china>, diakses pada 18 Mei 2012, pukul 23.12 WIB.



yang sama, meningkat dua kali lipat nilai ekspor Indonesia ke China, yakni sekitar US\$ 1,1 miliar. Padahal, pada 2010 neraca perdagangan kedua negara sudah defisit sebesar US\$ 5,61 miliar dan pada 2009 juga defisit US\$ 4,57 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding periode sama 2009 yang sebesar US\$ 4,29 milyar.<sup>137</sup> Pertumbuhan ekspor yang lebih rendah daripada impor menunjukkan bahwa kemampuan penetrasi produk kawasan ASEAN dan China ke pasar Indonesia relatif lebih tinggi daripada kemampuan penetrasi produk Indonesia ke Kawasan ASEAN dan China.

Sebelum diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China, produk-produk asal China telah banyak membanjiri pasar Indonesia.<sup>138</sup> Dan setelah diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China, tentu semakin maraknya produk-produk asal China yang membanjiri pasar Indonesia. China sudah menjadi sumber utama impor Indonesia, yakni 17,2% dari total impor nonmigas. Sebaliknya, China hanya menyerap 8,7% dari keseluruhan ekspor nonmigas Indonesia.<sup>139</sup> Berarti, penetrasi barang-barang China ke pasar kita jauh lebih gencar daripada sebaliknya. Sementara itu, struktur barang yang diperdagangkan cenderung tak simetris. Komoditas primer mendominasi ekspor Indonesia ke China, sedangkan ekspor China ke Indonesia didominasi oleh produk-produk manufaktur yang sangat beragam. Tak pelak lagi, ancaman paling besar dihadapi oleh industri manufaktur Indonesia.

Sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dapat dikatakan mengalami masa-masa sulit selama implementasi ACFTA. Sebelum ACFTA diberlakukan saja, pasar dalam negeri sudah dibanjiri oleh produk-produk China. Data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa, banjir produk murah dari China menyebabkan pangsa pasar usaha tekstil dan produk terkait (TPT) domestik turun dari 57% pada 2005 menjadi 23% pada 2008.<sup>140</sup>

---

<sup>137</sup>“Evaluasi China-ASEAN Free trade area,” diakses dari: <http://swingingme.wordpress.com/2011/02/17/evaluasi-China-asean-free-trade-Area/> Diakses tanggal 1 Maret 2012, pukul 18.34 WIB.

<sup>138</sup> FR. Sunarman, “ACFTA Jadi boomerang: Sinergi Kebijakan Ekspor-Impor perlu dikembangkan,” diakses dari: [perpustakaan.bappenas.go.id/.../file?...ACFTA](http://perpustakaan.bappenas.go.id/.../file?...ACFTA), diakses pada 17 Mei 2012, pukul 23.27 WIB.

<sup>139</sup> Launa, “ACFTA: Menengok Jalan China,” *Jurnal Sosial Demokrasi*, 2010, Vol.8, No.3, h. 52.

<sup>140</sup> Edy Burmansyah, “ACFTA Dan Perlindungan Industri Nasional,” diakses dari: [http://www.theglobal-review.com/content\\_detail.php?lang=id&id=1569&type=4](http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=1569&type=4), diakses pada 17 Mei 2012, pukul 12.30 WIB.

Ekspor TPT pada periode 2011 terutama ditujukan ke Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Turki. Meskipun China belum masuk ke dalam lima besar negara tujuan utama, namun ekspor TPT ke China mengalami pertumbuhan yang signifikan, sebesar 53,9%. Hal ini berimplikasi pada kinerja ekspor TPT secara tahunan yang mengalami pertumbuhan lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Pada periode ini, ekspor TPT tumbuh 30,3% lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang tumbuh 26,1%.<sup>141</sup>

Pertumbuhan ekspor TPT Indonesia ke China belum mampu mengalahkan impor dari China dimana defisit perdagangan tetap terjadi dimana defisit produk garmen Indonesia terhadap China di 2010 sebesar US\$ 86 juta. Dan impor pakaian jadi di 2010 sebesar 100 juta dolar, sementara nilai ekspornya hanya US\$ 23 juta. Sedangkan, defisit perdagangan kain dengan China di 2010 lebih tinggi lagi, yaitu mencapai US\$ 950 juta. Indonesia hanya bisa ekspor kain ke China pada tahun 2010 senilai US\$ 50 juta, namun China mampu impor kain mencapai US\$ 1 miliar.<sup>142</sup>

Grafik 3.1



Sumber: Jurnal Sosial Demokrasi (2010)

Pada grafik 3.1, terlihat produk impor dari China yang mendominasi pasar di dalam negeri adalah mainan anak yang menguasai 73% dari total impor negara

<sup>141</sup> Kementerian Keuangan, "Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Realisasi Tw I," 2011, h. 18.

<sup>142</sup> Rizki Caturini, "Benahi industri lokal agar tak makin terjungkal," diakses dari: <http://lipsus.kontan.co.id/v2/acfta/benahi-industri-lokal-agar-tak-makin-terjungkal>, diakses pada 24 April 2012, pukul 16.23 WIB.

pengekspor lainnya. Posisi kedua ditempati produk mebel China dengan menguasai 54% dari total negara pengekspor lainnya.

Tidak hanya itu, produk elektronika menguasai 36%, tekstil dan produk tekstil (TPT) sebesar 33% dan permesinan sebesar 22%. Beberapa sektor industri seperti mebel, logam dan barang logam, mainan anak serta TPT cenderung mengalami peningkatan impor setiap bulannya sepanjang tahun 2010.<sup>143</sup> Dalam konteks perdagangan TPT secara khusus, jelas defisit perdagangan menghantam industri padat karya ini. walaupun mengalami pertumbuhan ekspor, nilai impor yang masuk lebih besar terutama TPT China. Murahanya produk China dan banyaknya permintaan dalam pasar lokal membuat permintaan produk China semakin besar dan impor semakin tinggi dan produk lokal mulai tergerus produk China. Pemerintah tidak bisa hanya melihat dari surplus perdagangan sektor migas disisi lain sektor industri dalam hal ini TPT terseok-seok dalam kawasan pasar domestik maupun intra ASEAN.

Dari neraca perdagangan dapat dikatakan ekspor Indonesia ke China memang meningkat namun tingkat impor dari China pun tidak kalah meningkat. Harus diakui, penetrasi China terhadap pasar domestik Indonesia lebih kuat ditunjang dengan harga murah dibanding produk lokal. Namun, Indonesia terus meningkatkan kerjasama dengan China khususnya dalam peningkatan perdagangan tekstil dan produk tekstil yang ditandai dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding on Textile Cooperation in Textile and Clothing* antara Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan *China Chamber of Commerce for Import & Export of Textiles (CCCT)*.

Kesepakatan ACFTA seharusnya menghasilkan penurunan harga dan pilihan yang lebih banyak bagi konsumen dan produsen Indonesia, menurunkan biaya dan mendukung integrasi Indonesia ke dalam jejaring produksi regional. Perdagangan Bebas dalam kerangka apapun, baik bilateral, regional maupun multilateral akan memberikan keuntungan yang maksimal bagi negara-negara yang memiliki daya saing lebih baik. Namun dalam jangka panjang perekonomian negara dilihat dari tingkat ekspor yang mampu melebihi nilai impor atau dengan kata lain surplus dalam perdagangan.

---

<sup>143</sup> *Ibid.*

Dari sudut pandang ekonomi, dapat dikatakan China dan ASEAN lebih sebagai kompetitor satu sama lain daripada bersifat komplementer. Padahal, salah satu tujuan untuk membentuk kawasan FTA adalah memanfaatkan komplementaritas yang ada. Sifat kompetitif dalam hubungan ASEAN-China ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ASEAN dan China bukan saling menjadi pasar ekspor utama. Bagi Indonesia sendiri, China bukanlah tujuan ekspor utama Indonesia karena berada di urutan keempat negara tujuan ekspor Indonesia setelah Eropa, Jepang dan Amerika. Baik China dan Indonesia masih berorientasi secara ekonomi terhadap negara-negara industri barat, seperti Eropa dan Amerika Serikat serta Jepang. Dengan demikian, Indonesia dan China masih dan akan saling berkompetisi untuk ekspor ke negara maju.

Kerugian yang diderita Indonesia dalam hubungan perdagangannya dengan China, jika ditilik dengan seksama bermula dari struktur perdagangan dan karakter kedua negara yang jauh berbeda. China adalah negara maju dan mampan secara ekonomi, sedangkan perekonomian Indonesia memiliki permasalahan yang jauh lebih kompleks. Ekspor Indonesia ke China didominasi oleh komoditas primer (barang mentah), sedangkan ekspor China didominasi produk-produk manufaktur.

Dalam konteks ACFTA, China hanya memanfaatkan Indonesia sebagai pasar dan pemasok bahan baku serta energi untuk mendukung industri yang sedang berjalan massif disana, dimana hasil produksi dari industri tersebut kemudian dijual kembali ke Indonesia. Ini menunjukkan posisi Indonesia tidak setara (*unequal*) dengan China dan berpotensi memperdalam ketidakseimbangan hubungan ekonomi atau bersifat asimetris antara keduanya. World Economic Forum dalam laporan Global Competitiveness 2009-2010 menyatakan dalam berbagai factor, Indonesia jauh kalah bersaing dari China. Dalam posisi yang *unequal*, perdagangan bebas ACFTA dapat memicu terjadinya proses percepatan deindustrialisasi di Indonesia. Walaupun perdagangan bebas menghapus hambatan tarif, perbedaan standarisasi produk yang mencolok membuat komoditas dari negara-negara berkembang tidak mudah untuk masuk ke pasar negara-negara maju. Sebaliknya, negara-negara maju seperti China yang memiliki standarisasi produk yang jauh lebih tinggi dengan sangat mudah bisa membanjiri

di negara berkembang seperti Indonesia. Akibatnya produk-produk China bebas masuk ke pasar Indonesia, sementara produk-produk Indonesia terhalang masuk ke pasar China. Menurut Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat,<sup>144</sup> sejatinya kesepakatan ACFTA ini akan menguntungkan, jika industri di dalam negeri sudah siap. Perbedaan terlihat dari industri di China yang sudah mampu berlari kencang dihadapkan dengan industri di dalam negeri yang baru belajar berjalan. Namun yang pasti, peluang memperluas pasar dan meningkatkan ekspor ke China tetap terbuka. Sayangnya, tidak seimbang dengan kecepatan arus impor produk-produk China. Apalagi, ketergantungan Indonesia terhadap impor produk bahan baku industri dari China sangatlah besar. Selain itu, Indonesia belum mampu melakukan penetrasi ke pasar China karena daya saing yang lemah dan kurangnya pelaku industri memanfaatkan jaringan pemerintah untuk memasuki pasar China. Menurut Duta Besar Indonesia untuk China dan Mongolia, Imron Cotan menyatakan bahwa potensi pasar China belum dimanfaatkan serius oleh para pelaku bisnis Indonesia dan belum banyak produk-produk Indonesia yang bisa masuk ke pasar-pasar China meski peluang dan potensinya sangat besar. Salah satu penyebabnya adalah para pelaku bisnis tersebut kerap berjalan sendiri tanpa menyertakan peran serta pemerintah sebagai fasilitator untuk lebih memudahkan peluang mereka menguasai pasar China.<sup>145</sup> Dengan demikian sosialisasi kepada pelaku bisnis harus terus digalakkan agar dapat mengerti kemudahan menggunakan fasilitator pemerintah. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa pelaku bisnis enggan menggunakan fasilitas negara karena dikhawatirkan akan sangat berbelit-belit melihat *image* birokrasi Indonesia saat ini terlalu panjang.

---

<sup>144</sup> Ishak H Pardosi, “Susahnya Menghapus Pesona Barang Murah Negeri Tirai Bambu,” diakses dari: [http://monitorindonesia.com/ekonomi/59-headline/883-susahya-menghapus\\_pesona\\_barang-murah-negeri-tirai-bambu.html](http://monitorindonesia.com/ekonomi/59-headline/883-susahya-menghapus_pesona_barang-murah-negeri-tirai-bambu.html), diakses pada 4 Juni 2012, pukul 15.35 WIB.

<sup>145</sup> Nusarina Yuliasuti, “Pasar China Belum Digarap Serius,” diakses dari: <http://jogja.antaranews.com/berita/299434/pasar-China-belum-digarap-serius>, diakses pada 10 Juni 2012, pukul 23.15 WIB.

### III.2.2 Banjirnya produk China di pasar nasional

Untuk industri tekstil dan produk tekstil secara khusus, ACFTA menjadi ancaman yang serius. Sebelum penerapan ACFTA, pemerintah memberlakukan bea masuk impor rata-rata 5 persen untuk produk dari China dan negara lain, industri TPT nasional sudah defisit sejak 2007 dan gejalanya terus meningkat.<sup>146</sup> Jika pemerintah menandatangani ACFTA yang membebaskan bea masuk impor, industri TPT secara signifikan akan mengalami dampaknya. Masuknya produk impor ke Indonesia telah dirasakan para pengusaha tekstil sejak tahun 2006. Produk impor telah membanjiri dan memberikan dampak yang cukup berarti, baik bagi pengusaha tekstil maupun konsumen. Produk-produk tersebut laku di pasar domestik karena faktor konsumsi masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap tekstil dan dipengaruhi gaya hidup masyarakat.

**Tabel.3.3**  
**Tarif Indonesia di ACFTA turun ke tingkat yang rendah pada tahun 2010, dengan pengecualian dari berbagai peralatan transportasi dan barang pertanian (tingkat tarif, persen)**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	11.9	10.5	9.6	9.4	9.4	6.9	6.8	6.8	6.7
Kimia	6.5	6.5	6.5	5.4	5.4	2.4	1.5	1.5	1.2
E. Machinery	6.8	6.8	6.8	4.6	4.6	2.1	0.5	0.5	0.4
Perikanan	4.7	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0
Kulit, Karet, Alas Kaki	8.7	8.7	8.7	7.3	7.3	4.3	3.5	3.5	3.0
Manufaktur Lainnya	7.3	7.3	7.3	5.5	5.5	2.2	0.6	0.6	0.2
Logam	9.8	8.9	8.9	6.5	6.5	3.2	1.7	1.7	1.3
Mineral	5.1	6.0	6.0	5.0	5.0	1.9	1.2	1.2	1.1
NE Machinery	2.6	2.6	2.6	2.0	2.0	0.8	0.3	0.3	0.2
Petroleum	5.0	3.2	3.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Tekstil & Garmen	10.8	10.8	10.8	7.6	7.6	4.3	1.6	1.6	1.1
Peralatan Transpor	28.7	28.7	28.7	18.8	18.9	18.5	18.4	18.4	18.1
Kayu, Pulp, Kertas, Meubel	4.7	4.7	4.7	4.3	4.3	1.1	0.4	0.4	0.0
<b>Rata-rata</b>	<b>9.9</b>	<b>9.6</b>	<b>9.5</b>	<b>6.4</b>	<b>6.4</b>	<b>3.8</b>	<b>2.9</b>	<b>2.9</b>	<b>2.6</b>

Sumber: Departemen Keuangan

Produk impor TPT beraneka ragam dari Jepang, Korea, India hingga Thailand. Namun segi harga, tetap China lebih murah sehingga dengan ekonomi masyarakat Indonesia yang cenderung menengah ke bawah pilihan harga tentu menjadi pertimbangan. Mengapa China mampu mendominasi, karena China

<sup>146</sup> Setyani Sri Haryanti, "loc.cit."

mempunyai produk ekspor yang sangat kompetitif dengan biaya produksi yang rendah. Dan dalam hal ini dipermudah dengan berkurangnya hambatan dalam hal tarif maupun non tarif yang merupakan bentuk kemudahan dari perdagangan bebas. Dikarenakan perdagangan bebas ASEAN-China ini, membolehkan produk-produk China masuk ke Indonesia tanpa hambatan baik tarif maupun non-tarif maka menyebabkan produk-produk China memasuki pasar Indonesia dengan bebas. Banyaknya produk-produk China yang masuk ke pasar Indonesia sehingga membuat produk-produk Indonesia kalah bersaing, apalagi terhadap produk yang sejenis. Dimana produk-produk China yang memasuki pasar Indonesia mempunyai kualitas dan harga tidak jauh berbeda dengan produk-produk lokal. Hal tersebut bisa disebabkan karena produktivitas tenaga kerja di China yang tinggi dan efisien serta ditunjang dengan upah yang rendah.

Peningkatan masuknya produk-produk China ke Indonesia, maka tidak mustahil pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari China ditunjang pula dengan rendahnya daya saing dari produk-produk serupa yang merupakan buatan dalam negeri.<sup>147</sup> Tony Prasetyantono seorang ekonom BNI menyatakan dengan dampak yang terjadi, dapat dikatakan bahwa dengan pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China lebih banyak biayanya daripada manfaatnya bagi Indonesia.<sup>148</sup>

Fakta bahwa pemberlakuan ACFTA telah mendorong semakin tingginya tingkat penetrasi produk kawasan ASEAN dan China ke pasar Indonesia mempertegas anggapan bahwa Indonesia belum siap bersaing dalam skema ACFTA. Memang, dalam kaitan dengan China, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa elemen pembentuk daya saing, seperti tingkat efisiensi, produktivitas, dan lingkungan bisnis di China relatif lebih baik daripada di Indonesia. Perbedaan kapasitas produksi pabrik antara Indonesia dan China sangat besar. Kapasitas terpasang produk tekstil di China 25 kali lebih besar ketimbang di Indonesia.<sup>149</sup> Kebutuhan tekstil yang sudah terpenuhi di negaranya, China

<sup>147</sup> Tulus Tambunan, *op.cit.*, h. 26.

<sup>148</sup>“Menggugat Perjanjian ASEAN-China,” diakses dari: [http://www.globaljust.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=385&Itemid=1](http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=1), pada 27 April 2012, pukul 00.15 WIB.

<sup>149</sup> Rizki Caturini, *loc.cit.*

lantas mencari pasar di luar negeri untuk menyalurkan produk tekstilnya yang terlampaui diproduksi sangat besar.

Di sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), serbuan produk-produk China berupa kain dan garmen sudah mulai dirasakan oleh pasar dalam negeri sejak awal berlakunya ACFTA. Ancaman ini dirasakan oleh industri tekstil besar maupun Industri Kecil Menengah karena masyarakat akan cenderung lebih memilih tekstil dari China yang harganya relatif murah. Selama ini produk kain dan garmen yang berasal dari China harganya lebih murah 15%-25% bila dibandingkan dengan produk dalam negeri. Selain itu, produk pakaian jadi impor asal China diakui sejumlah pedagang lebih diminati masyarakat karena kualitas dan modelnya yang lebih mengikuti tren. Namun demikian, ada pula faktor lain seperti selera masyarakat, corak, dan kualitas bahan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap pembelian produk China ini. Keunggulan tekstil China adalah pada bahan baku katun. Sedangkan pada produk tekstil sintetis, mereka justru mengimpor bahan baku dari Indonesia karena bahan baku tersebut banyak dan murah di Indonesia. Tetapi karena biaya produksi yang tinggi dan kondisi infrastruktur yang belum mendukung seperti kondisi jalan yang masih buruk atau tarif listrik yang masih tinggi menyebabkan harga produk kita masih lebih mahal dibandingkan dengan produk China.

Pemerintah China memiliki *action plan* yang jelas dalam mendukung sektor industrinya menjadi kunci utama berkembang pesat industrinya. Terkait dengan industri TPT, pemerintah China menyediakan dana yang cukup besar untuk membantu industri andalan ekspornya tersebut dengan melakukan restrukturisasi permesinan. Tidak mengherankan bahwa permesinan yang digunakan industri China sangat efisien dengan produktivitas yang tinggi. Permesinan yang digunakan industri TPT China mampu menghemat energi 17 persen lebih rendah dari yang digunakan industri TPT Indonesia.<sup>150</sup> Indonesia baru memulai program restrukturisasi mesin tahun 2007 sedangkan China sejak tahun 90an dan terus meningkatkan program mereka hingga saat ini.

China sangat unggul dalam memproduksi tekstil dan garmen, sementara industri TPT Indonesia masih belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi yang

---

<sup>150</sup> William Chongbo, "Indonesia Textile and Garment Industry: Challenges and Prospect," *Indonesian Quarterly*, 2005, Vol.33, No.3, h. 208-215.



mendera pada tahun 1997 dan sejak tahun 2010 harus menghadapi gempuran produk tekstil China. Tidak mengherankan jika pasar-pasar tekstil besar di Indonesia seperti Tanah Abang dan Mangga dua dipenuhi oleh tekstil dan produk tekstil buatan China, beredarnya batik China yang dikenal murah juga mewarnai pasar Indonesia. Tentu hal ini menjadi tantangan bagi produk batik Indonesia. Melihat tingkat ekonomi masyarakat Indonesia, terutama menengah ke bawah, faktor harga menjadi penting sehingga harga murah yang ditawarkan produk China akan lebih diminati masyarakat dan hal tersebut berdampak pada permintaan dan penjualan produk tanah air.

Jauh sebelum perjanjian itu terlaksana, pada kenyataannya tekstil China sudah mulai membanjiri pasar dalam negeri. Masuknya barang-barang tersebut ke Indonesia baik melalui impor legal dan impor ilegal. Penyelundupan tekstil tampaknya makin merajalela. Menurut asosiasi pertekstilan Indonesia (API), menjelang Lebaran 2009 sudah 200 kontainer berisi produk tekstil diselundupkan, sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp. 100 miliar. Bahkan, setelah itu ditemukan bahwa di pelabuhan China dan Singapura, sebanyak 197 kontainer tekstil ilegal siap diberangkatkan ke Indonesia.

Data berdasarkan hasil penyelidikan API yang dilansir belum lama itu tentu sangat memprihatinkan. Dengan gampang, gelombang demi gelombang tekstil selundupan menerjang pelabuhan Indonesia, untuk kemudian bertebaran di pasar domestik. Perkembangan ini jelas bisa menghancurkan produksi tekstil dalam negeri. Tidak hanya itu, modus penyelundupannya pun kian bervariasi, contohnya kasus penyelundupan tiga kontainer berisi tekstil yang baru-baru ini dibongkar pihak Bea dan Cukai Merak, Banten. Produk tekstil sebanyak 22 koli dan 97 rol dari Korea itu ternyata dicampur dengan barang yang dikatakan diimpor secara pribadi. Aparat Bea dan Cukai Merak mencurigai kedatangan tiga kontainer yang dikabarkan berisi barang-barang impor pribadi melalui agen berbendera PT Amin Sejahtera. Tiga kontainer yang diangkut kapal itu masuk melalui pelabuhan peti kemas milik PT Indah Kiat di Anyer, Banten.<sup>151</sup> Modus kasus penyelundupan tekstil melalui Surabaya berbeda dengan modus kasus

---

<sup>151</sup>“Modus Kloning Penyelundupan Tekstil Ilegal,” diakses dari: <http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2006/12/19/24464/%E2%80%9CmodusKloning%E2%80%9D-Penyelundupan-Tekstil-Ilegal>, diakses pada 4 Juni 2012, pukul 23.34 WIB.

penyelundupan di Merak. Sebanyak dua kontainer tekstil selundupan di Surabaya, contohnya, masuk dengan menggunakan fasilitas importir produk tekstil. Ini berarti, bahan tekstil tersebut dinilai boleh dibawa langsung dari pelabuhan ke pabrik si importir, karena akan diolah kembali untuk dijadikan produk tekstil siap jual. Ternyata, dua kontainer itu masing-masing dibawa ke pusat perdagangan pakaian di Cempaka Mas (Jakarta) dan ke Bandung.<sup>152</sup> Ini berarti bahan tekstil tadi bukan untuk diproduksi lagi, melainkan dijual langsung ke pasar.

Hasil survei yang dilakukan Asosiasi Pertekstilan Indonesia menunjukkan bahwa terjadi kecenderungan penurunan pangsa pasar domestik untuk produk-produk buatan dalam negeri. Hal itu disebabkan karena pedagang lebih suka menjual barang-barang impor asal China karena keuntungannya lebih besar. Hal ini ditengarai sebagai penyebab terjadinya penurunan produksi dan keuntungan industri dalam negeri. Di samping itu, produsen dalam negeri sebenarnya merasa mampu bersaing dengan produk impor asal China terutama didukung penerapan SNI yang konsisten dalam menjamin mutu produk beredar. Barang Indonesia sendiri dinilai lebih awet, kuat, tahan lama, dan harga sesuai kualitas. Namun, produk dalam negeri tidak inovatif dan variatif. Hal ini terlihat ketika EXPO perdagangan alas kaki dan Fashion Indonesia yang diadakan Kementerian Perindustrian di Jakarta Convention Center 16-19 Mei 2012 yang desainnya masih kurang inovatif dengan model yang kurang mampu bersaing di pasaran.<sup>153</sup> Ditjen Kerja Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Agus Tjahyana, mengungkapkan produk lokal bertolak belakang dengan produk China yang murah, bermanfaat, desain menarik namun sayangnya cepat rusak, dan tidak ada layanan purnajual.<sup>154</sup>

Sebagai konsumen yang rasional, masyarakat Indonesia juga meminati produk-produk dari China karena pertimbangan harga. Hal ini memang baik bagi konsumen. Dengan semakin banyaknya produk murah China yang membanjiri pasar Indonesia, maka konsumen akan semakin banyak opsi barang, akan

<sup>152</sup>“Penyelundupan Tekstil Kian Marak,” diakses dari <http://korantrans.wordpress.com/2009/11/page/4/>, diakses pada 4 Juni 2012, pukul 23. 56 WIB.

<sup>153</sup> Pendapat penulis setelah melihat langsung pameran tersebut di JCC tanggal 17 Mei 2012

<sup>154</sup>“Limbungnya Industri Nasional,” diakses dari [http://www.bsn.go.id/news\\_detail.php?news\\_id=2913](http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=2913), diakses pada 19 Mei 2012, pukul 23.27 WIB.

memangkas pengeluaran mereka, menambah pilihan, akan semakin banyak bagian pendapatan yang bisa untuk ditabung, dan pada akhirnya akan menambah tingkat kesejahteraan mereka. Namun, hal tersebut adalah dampak jangka pendeknya.

Dengan skema ACFTA, impor tekstil berdatangan terutama dari China dan Thailand. Masyarakat Indonesia memang memiliki banyak pilihan produk dari segi harga, kualitas dan model. Dengan semakin banyaknya kompetitor tentu produk lokal harus terus berbenah dalam menjaga kualitas, peningkatan inovasi serta menjaga kompetitif harga.

Secara keseluruhan, dampak positif ACFTA terhadap perdagangan TPT dari segi peningkatan ekspor dan peningkatan daya saing namun masih bersifat jangka panjang dalam pengoptimalan implementasinya. Dalam jangka pendek, masyarakat Indonesia memiliki banyak pilihan dalam produk tekstil yang disesuaikan dengan kemampuan belanja mereka sehingga mengurangi beban mereka jika dengan produk impor dengan harga murah mampu terjangkau oleh masyarakat. Namun dibalik semua dampak positif ada efek yang lebih besar melanda perekonomian Indonesia secara luas yaitu keterancaman akan deindustrialisasi dan meningkatnya angka pengangguran.

Murahnya produk tekstil China karena didukung dengan program restrukturisasi mesin TPT yang berkelanjutan serta kebijakan pemerintah yang pro industri sehingga tidak mengalami biaya ekonomi tinggi layaknya industri tanah air. Dari segi produk, tekstil China selain murah juga lebih inovatif dan mengikuti trend dunia walaupun secara kualitas kain yang digunakan tidak lebih baik dari produksi lokal. Walaupun kualitas tidak baik, model yang mumpuni membuat produk tekstil China tetap dicari, bahkan aksesnya semakin mudah. Produk pakaian jadi China memanfaatkan kecanggihan teknologi pula dalam distribusinya. Pemasaran melalui online merupakan salah satu caranya dengan menggunakan model sebagai peraga produknya. Tampak dalam foto model yang ditawarkan sangat *up to date* namun ketika barang sudah ditangan terlihat tidak bagus kainnya. Namun karena harga yang relatif murah dan model yang *up to date* produk China tetap diminati pasar domestik Indonesia.

Ketika perdagangan bebas diharapkan menghasilkan keuntungan bersama ternyata menjadi boomerang jika industri tidak siap. Pola perdagangan bebas yang

bersifat berkurangnya peran negara dalam perdagangan membuat Indonesia kelabakan menghadapi serbuan produk impor khususnya China dalam perjanjian perdagangan bebas ACFTA ini. Ketidaksiapan industri membuat peran pemerintah menjadi lebih besar dengan strategi kebijakan yang bersifat melindungi produk nasional. Dengan melaksanakan liberalisme dalam perdagangan bebas kesiapan industri domestik merupakan unsur penting melihat pespektif pasar bebas yang membatasi peran pemerintah namun dengan kasus Indonesia, industri sudah tidak siap maka pemerintah menjadi lebih berperan bagaimana mengatur kebijakan agar produk nasional dapat dilindungi dan meningkatkan daya saing.

Ketika serbuan impor produk China semakin banyak, dengan industri yang kurang berdaya saing tentunya peran pemerintah menjadi sangat penting. China mampu memaksimalkan manfaat daripada ACFTA dengan daya saing yang dimiliki serta peran pemerintah dengan kebijakan yang pro industri walaupun dengan sistem perekonomian terbuka, peran negara masih sangat dominan. Hal ini menjadi ironi ketika melihat pemerintah Indonesia yang belum mampu menata industrinya dengan strategi kebijakan yang dimiliki. Faktor biaya ekonomi tinggi merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan pemerintah jika ingin berkompetisi dengan produk impor khususnya China. Dengan strategi pemerintah yang memberikan akses kemudahan baik sistem birokrasi, infrastruktur, logistik yang murah, pengembangan bahan baku dan inovasi, dan memberantas pungutan liar tentunya meningkatkan daya saing produk lokal sehingga biaya dapat ditekan sehingga produk mampu lebih kompetitif dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik.

### **III.2.3 Industri nasional**

Setahun setelah ACFTA berjalan, hasilnya tidak sulit ditebak. Sebagian industri nasional mati secara perlahan-lahan akibat pengurangan produksi industri di dalam negeri. Kerja sama perdagangan bebas itu juga menyebabkan penurunan penjualan, keuntungan, hingga pengurangan tenaga kerja. Akhir Maret 2011 lalu, Menteri Perindustrian Mohamad Sulaiman Hidayat menyatakan sudah ada sembilan sektor industri yang terkena dampak ACFTA, Sembilan sektor tersebut antara lain industri tekstil dan produk tekstil (TPT), industri alas kaki (sepatu),

industri elektronik, industri mebel kayu dan rotan, industri mainan anak, industri permesinan, industri besi dan baja, industri makanan dan minuman, serta industri jamu dan kosmetik. Dampak itu ditandai dengan menurunnya produksi, penjualan, keuntungan, hingga pengurangan tenaga kerja. Secara terperinci, penurunan produksi sekitar 25-50%, penurunan penjualan di pasar domestik sebesar 10-25 %, penurunan keuntungan sebesar 10-25 persen, hingga pengurangan tenaga kerja antara 10-25%. Hanya empat bulan setelah penerapannya (Januari-April 2010), impor mainan anak-anak dari China meningkat 952 % dan impor tekstil meningkat 215% , impor dari China naik 45,86 % pada 2010.<sup>155</sup> periode tahun 2006-2008, hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sedikitnya 1650 industri mengalami kebangkrutan yang diikuti oleh PHK secara massal sekitar 140 ribu orang tenaga kerja. Sebuah angka yang tidak kecil dan belum pernah terjadi sejak krisis 1998.<sup>156</sup>

Permasalahan yang lebih riskan terlebih pada internal sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) sendiri dimana Keunggulan komparatif (CA) TPT Indonesia yang rendah untuk selama delapan tahun terakhir memberikan opsi ancaman bagi industri TPT di Indonesia dalam menghadapi ACFTA. Berdasarkan kalkulasi *Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (Indef)* misalnya, pada 2008 CA TPT hanya sebesar 1,81%. Pada 2007 dan 2006 pun tidak jauh berbeda, hanya 1,9% dan 2,03%.<sup>157</sup> Berdasarkan data BPS, indeks pertumbuhan produksi TPT juga mencatat pertumbuhan fluktuatif selama tiga tahun terakhir (2006-2008), yang secara berurutan sebesar 6,04%, 11,17%, dan 3,38%.

Dengan banyaknya masuk produk TPT China menyebabkan penurunan produksi TPT nasional sehingga mempengaruhi keberlangsungan industri TPT Indonesia. Pertumbuhan industri menunjukkan penurunan terus menerus selama 5

<sup>155</sup> Syamsul Hadi, Ph.D, "Perdagangan Bebas Akan Memberikan Keuntungan Maksimal Bagi Negara Yang Memiliki Daya Saing Lebih Baik," *tabloid diplomasi*, 15 juli-14 agustus 2011, No. 45 Tahun IV, h. 15.

<sup>156</sup> "ACFTA; Pemerintah Gagal Melindungi Rakyat," diakses dari: [http://www.igj.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=524&Itemid=165](http://www.igj.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=524&Itemid=165), diakses pada tanggal 23 Mei 2012, pukul 01.35 WIB.

<sup>157</sup> Jati Andrianto, Aditya Perdana Putra, dan Fadjar Adrianto," *loc.cit.*, h. 45.

tahun terakhir, dari sekitar 7,2% pada 2004, menjadi 5,86% pada 2005, 5.15% pada 2007 dan akhirnya hanya sekitar 3.9% pada 2009.<sup>158</sup>

Menteri Perindustrian, MS Hidayat<sup>159</sup> mengungkapkan, penandatanganan perjanjian perdagangan bebas di tengah kondisi industri yang masih lemah berpotensi mendorong munculnya ancaman arus barang impor yang makin luas. Peluang timbulnya risiko sangat besar mengingat daya saing industri dalam negeri masih sangat buruk. Kondisi tersebut disebabkan masih sangat buruknya daya saing industri dalam negeri adalah banyaknya kendala seperti fasilitas infrastruktur yang masih buruk, sistem perbankan yang belum mendukung pengembangan sektor riil (industri), tingginya harga dan terbatasnya pasokan bahan baku produksi industri. Jadi bisa juga dikatakan bahwa perdagangan bebas ASEAN-China berdampak pada rusaknya industri lokal di Indonesia karena kalah saing dengan China. jelas terlihat eksploitasi China terhadap Indonesia, karena memanfaatkan pasar Indonesia untuk mendistribusikan barang produksi China.

Dengan adanya ACFTA maka daya saing pun bertambah sehingga dapat menimbulkan persaingan yang kompetitif diantara para peserta ACFTA. Untuk itu pihak UKM pun mau tidak mau harus melakukan perubahan dari segi apapun baik itu dari segi produk, pemasaran, hingga teknologi. Dengan cara seperti itu membuat UKM dapat bersaing dengan produk-produk China yang kompetitif. Selain itu, bagi sebagian kalangan dunia usaha, khususnya untuk mereka yang memiliki usaha yang memiliki kualitas dan manajemen yang baik, ACFTA bisa dijadikan tantangan bagi pelaku dunia usaha yaitu bagaimana cara mereka bisa bersaing secara sehat dengan produk-produk dari China sehingga pelaku usaha akan semakin menjadikan pasar bebas ini menjadi semangat dan modal untuk memotivasi mereka untuk selalu meningkatkan kualitas dan harga produk mereka sehingga bisa terjangkau oleh konsumen.

Kemunculan industri TPT baru jauh lebih sedikit dibandingkan dengan industri yang keluar atau bangkrut sehingga jumlah pabrik terus mengalami

<sup>158</sup> Tri D. Pamenan, "Ada Kesalahan dalam Kebijakan Industri Nasional," diakses dari: <http://www.kpbn.co.id/news-4130-0-ada-kesalahan-dalam-kebijakan-industri-nasional.html>, diakses pada 20 Mei 2012, pukul 01.27 WIB.

<sup>159</sup> Pendapat ini dikemukakan MS Hidayat sewaktu menjabat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. diakses dari [http://www.globaljust.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=385&Itemid=1](http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=1), diakses pada 27 April 2012, pukul 23.12 WIB.

penurunan setelah krisis meskipun menengahnya lebih besar.<sup>160</sup> Tidak sedikit industri mengangkat bendera putih alias gulung tikar. Di Bandung, tepatnya di Jl. Moh. Toha dulunya ditempati oleh sekitar 50 pabrik. Saat ini, hanya tersisa tinggal 20-an pabrik.<sup>161</sup> Belum sampai lima tahun, sudah lebih dari setengah jumlah pabrik di kawasan tersebut tutup bangkrut. Selain bangkrut, terjadi peralihan fungsi, sejumlah industri beralih menjadi produsen perakitan, pengemasan, ataupun distributor. Mereka tak lagi memproduksi. Akibatnya, ribuan tenaga kerja terpaksa menganggur.

### III.2.3.1 tenaga kerja

Sektor industri manufaktur di Indonesia yang pernah menjadi tumpuan pembangunan perekonomian, selain sebagai penyerap tenaga kerja terbesar dan penyumbang devisa lewat kinerja ekspornya, kini terbilang menurun. Krisis global 1997 dan 2008 mempengaruhi ekspor Indonesia yang turun terkait menurunnya permintaan negara tujuan. Kini, sejak tahun 2010 implementasi ACFTA dimulai menjadi ancaman bagi industri TPT sebagai industri padat karya yang berdampak pula pada penyerapan tenaga kerja.

Industri tekstil dan produk tekstil merupakan industri padat karya seperti yang tertuang dalam *roadmap* industri Indonesia. Sesuai dengan pengklasifikasian sebagai industri padat karya tentunya diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja. Banyaknya produk China yang lebih inovatif dibandingkan produk lokal membuat produk lokal kalah bersaing di pasaran sehingga berkurangnya produksi TPT dikarenakan penjualan dan permintaan yang menurun tentunya akan mempengaruhi kinerja industri. Dengan menurunnya permintaan dan penjualan beban industri menjadi lebih besar sehingga tenaga kerja yang dikorbankan. Banyaknya industri yang bangkrut tentu pemutusan hubungan kerja tidak bisa terelakkan. Sebagai catatan, sebelum ACFTA diberlakukan, sektor tekstil dan produk tekstil Indonesia sudah jauh-jauh hari kalah bersaing. Di tahun 2009 lalu

<sup>160</sup> Pernyataan Faisal basri dalam dialog yang diadakan jurnal sosial demokrasi yang termuat dalam *Jurnal Sosial Demokrasi*, Februari - Juni 2010, Vol. 8, No.3, h. 76.

<sup>161</sup> “Industri Tekstil Indonesia Masih Bersaing dengan China,” diakses dari <http://www.businessnews.co.id/featured/industri-tekstil-indonesia-masih-bersaing-dengan-China.php>, diakses pada 17 Mei 2012, pukul 23.00 WIB.

saja, setidaknya sekitar 271 pabrik atau perusahaan tutup. Akibatnya 18.396 buruh yang bekerja di industri ini harus rela menjadi penganggur karena ter-PHK.<sup>162</sup>

Menurut data Kementerian Perindustrian, industri TPT telah menyerap tenaga kerja terbesar di sektor industri manufaktur yaitu 10,6% dari total tenaga kerja industri manufaktur yang sebanyak 12,62 juta orang. Artinya, industri TPT menyerap sekitar 1,33 juta tenaga kerja di 2009.<sup>163</sup> Jumlah industri tekstil dari kelas industri kecil hingga besar bisa mencapai 2.000, jika setiap industri tekstil mampu menyerap 12-50 orang tenaga kerja, maka bisa dibayangkan kehancuran industri karena akan banyak pengusaha yang beralih dari produsen tekstil menjadi pedagang. Hal ini sekaligus berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja karena beralih menjadi pedagang.<sup>164</sup> Memang peralihan menjadi pedagang tidak berdampak buruk bagi sektor tenaga kerja, namun hal tersebut mengancam keberadaan industri nasional karena semakin menurun pabrik-pabrik lokal sehingga mengancam terjadi deindustrialisasi.

Dalam sektor tekstil dan produk tekstil, buruh merupakan keunggulan komparatif industri TPT sebagai salah satu industri padat karya. Peningkatan upah minimum memang demi kesejahteraan masyarakat dimana untuk wilayah Jakarta, UMP sudah naik tiga kali lipat selama 1997 - 2002, atau 50% lebih tinggi dari upah sebelum krisis. Walaupun dengan peningkatan tersebut nominal pendapatan buruh Indonesia tak jauh beda dengan negara pesaingnya, namun permasalahannya dilihat dari tingkat produktivitasnya yang lebih rendah. Produktivitas pekerja China lebih efektif dimana seorang pekerja dapat memproduksi kemeja dua kali lebih banyak dalam satu jam dibandingkan dengan Indonesia. Melihat hal tersebut, *gap* tenaga kerja Indonesia dengan produktivitas tenaga kerja China justru semakin melebar. Pada 1996, produktivitas tenaga kerja Indonesia adalah 70,1 persen dari produktivitas tenaga kerja China, sedangkan pada 2009 menurun menjadi hanya 65,7 persen.<sup>165</sup> Berdasarkan laporan *The Global Competitiveness*

<sup>162</sup> Launa dan Azman Fajar, "loc.cit.", h. 13.

<sup>163</sup> Rizki Caturini, loc.cit.

<sup>164</sup> Hidayatullah Muttaqin, "Bunuh Diri Ekonomi Indonesia," <http://www.jurnal.ekonomi.org/bunuh-diri-ekonomi-indonesia/>, diakses pada 12 April 2012, pukul 18.56 WIB.

<sup>165</sup> Latif Adam, "Surplus Yang Tergerus," diakses dari: [http://www.ekonomi.lipi.go.id/informasi/berita/berita\\_detil2.asp?Vnomer=467](http://www.ekonomi.lipi.go.id/informasi/berita/berita_detil2.asp?Vnomer=467), diakses pada 10 Mei 2012, pukul 05.25 WIB.



*Report 2009-2010*, efisiensi tenaga kerja China menduduki peringkat 32 dari 133 negara. Sementara Indonesia berada di peringkat 75 jauh di bawah China.

Terpangkasnya peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional karena perannya digantikan impor dampaknya juga menimpa penyediaan lapangan kerja. Tentu ini sangat memberatkan para pekerja dan pendatang baru dunia kerja. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 2 juta orang sedangkan pada periode Agustus 2009 jumlah pengangguran terbuka mencapai 8,96 juta orang.<sup>166</sup>

Harga tekstil dan produk tekstil (TPT) China lebih murah antara 15% hingga 25%. Menurut Ade Sudrajat Usman, selisih 5% saja sudah membuat industri lokal kelabakan apalagi perbedaannya besar.<sup>167</sup> Hal yang sangat memungkinkan bagi pengusaha lokal untuk bertahan hidup adalah pilihan pragmatis dengan banting setir dari produsen tekstil menjadi importir tekstil China atau setidaknya pedagang tekstil. Sederhananya dengan pemikiran, untuk apa memproduksi tekstil bila kalah bersaing, lebih baik impor lebih murah dan tidak perlu repot-repot jika diproduksi sendiri dan menanggung biaya besar produk kalah saing. Dengan beralihnya produsen menjadi importer ataupun pedagang dapat berakibat pada berkurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga banyak timbul pengangguran. Selain itu, menurut Muhaimain Iskandar, penerapan ACFTA akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan, dengan maraknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Permasalahan lain timbul terkait pelanggaran antara permintaan izin untuk tenaga kerja asing dan kenyataan di lapangan, sehingga menyebabkan berkurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.<sup>168</sup> Penggunaan TKA biasanya bersamaan dengan masuknya investasi asing ke suatu negara. Sebelum implementasi ACFTA pekerja asing China telah banyak bekerja di Indonesia, pada tahun 2008 sebanyak 11.458 orang.<sup>169</sup> Dengan semakin banyak tenaga asing akibat investasi asing memang memberikan dampak positif dengan *transfer of knowledge* yang dapat

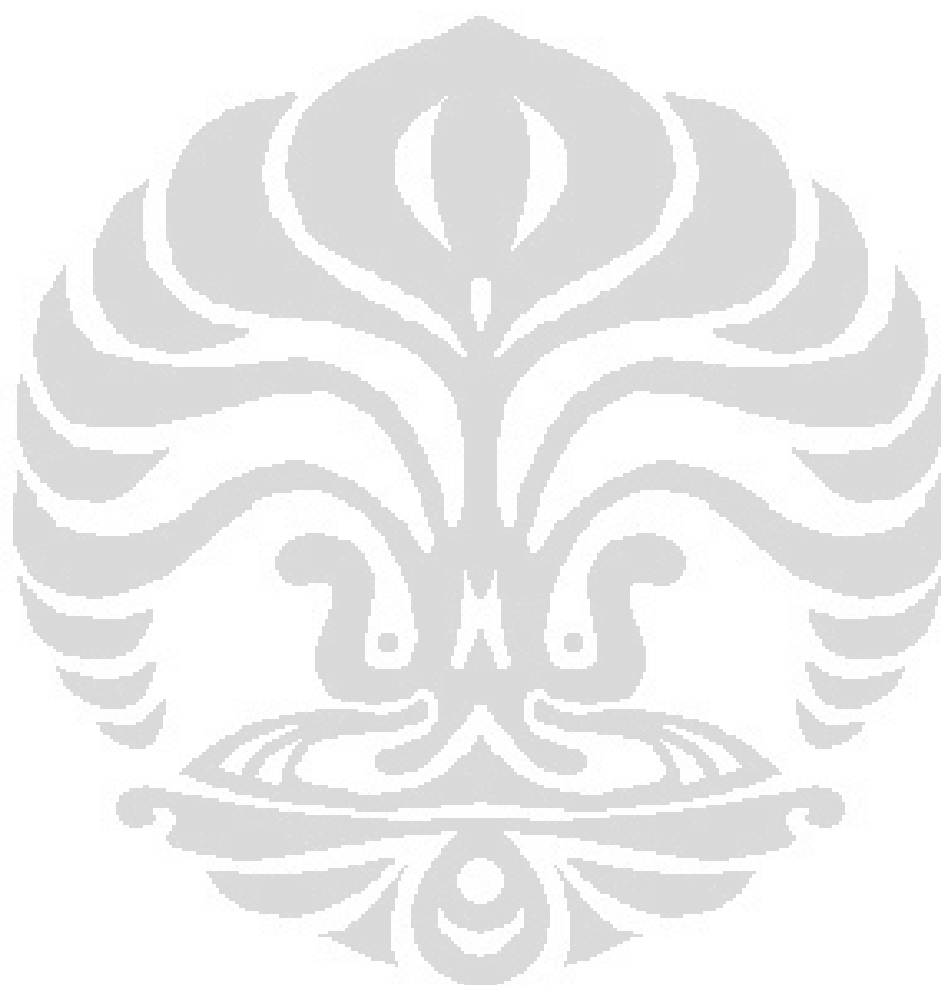
<sup>166</sup> *Ibid.*

<sup>167</sup> "Industri Tekstil Indonesia Masih Bersaing dengan China," diakses dari <http://www.businessnews.co.id/featured/industri-tekstil-indonesia-masih-bersaing-dengan-China.php>, diakses pada 17 Mei 2012, pukul 18.45 WIB.

<sup>168</sup> Laporan Bulanan Ditjen KPI Kementerian Keuangan Republik Indonesia Maret 2010.

<sup>169</sup> Nawawi, "ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) dan Realitas Kesiapan SDM Indonesia," *masyarakat Indonesia*, 2010, Vol. XXXVI, No. 2, h. 39.

mengembangkan kualitas SDM lokal. Namun jika sifat investasi hanya relokasi pertukaran ilmu akan sangat susah terjadi karena tenaga ahli beserta staff asing akan diboyong ke tanah air sehingga peran pemerintah yang akan lebih mengambil sikap bagaimana membentuk SDM nasional lebih kompetitif sehingga industri nasional mampu bangkit.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

Kesepakatan *ASEAN China Free Trade Area* (ACFTA) merupakan kesepakatan perdagangan bebas regional antara ASEAN dan China yang ditandatangani pada tahun 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Perjanjian ACFTA dalam perdagangan barang, yang berlaku pada tanggal 20 Juli 2005, menghasilkan penurunan tarif impor secara bertahap yang berlaku timbal-balik di antara negara-negara yang bersepakat. Pada 1 Januari 2010, pelaksanaan ACFTA yang hampir sempurna dilaksanakan oleh ekonomi negara-negara ASEAN-6, termasuk Indonesia dan China, dengan penerapan tarif nol kepada 90 persen produk-produk atas hampir seluruh jajaran tarif.

Perdagangan bebas mendekatkan pada keyakinan bahwa mekanisme pasar akan membentuk interaksi antar negara dan individual dalam bentuk kerjasama yang menguntungkan. Pandangan liberalis meyakini bahwa perdagangan bebas dapat membuat entitas ekonomi berproduksi maksimal dengan keunggulan komparatif yang dimiliki sehingga dengan potensi ekonomi yang dioptimalkan maka kesejahteraan seluruh anggota masyarakat akan tercipta.

Dalam implementasi perdagangan bebas dalam skema ACFTA, khususnya kesepakatan antara Indonesia dan China memperlihatkan *absolut gain* tidak berjalan melainkan *relative gain* dengan keuntungan yang diperoleh China. sebagai negara yang berbasiskan manufaktur, bahan mentah dan energi menjadi sangat penting bagi China sehingga Indonesia menjadi penting demi kepentingan nasional meraih sumber daya alam. Sebaliknya, China menjual produk hasil olahan yang menghasilkan nilai tambah sehingga pola asimetris terlihat dalam perdagangan antara China dan Indonesia.

Dengan kenyataan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam sumber daya alam dan produk yang dihasilkan dengan tenaga murah membuat Indonesia lemah dalam persaingan perdagangan bebas khususnya dengan China yang mampu menghasilkan produk masal dengan menggunakan perkembangan teknologi sehingga produk menjadi murah ditambah pemerintah

yang mendukung industri melalui kebijakan pemberian subsidi. Dengan demikian peran pemerintah Indonesia meningkatkan daya saing menjadi mutlak diperlukan khususnya dalam meregulasi kebijakan yang mempermudah industri.

Pemerintah dalam menghadapi ACFTA memiliki beberapa strategi kebijakan guna menghadapi perdagangan bebas ASEAN-China tersebut. Diantaranya: Meningkatkan efektivitas pengamanan pasar dalam negeri dari penyelundupan, Melakukan penguatan pasar ekspor, seperti *Trade Promotion Center*, Peningkatan promosi penggunaan produk dalam negeri, Penanganan issue domestik lainnya, seperti infrastruktur dan energi, perluasan akses pembiayaan, perbaikan pelayanan publik, dan lain-lain. Memang pemerintah menyiapkan strategi kebijakan yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional namun implementasinya masih jauh dari kata cukup karena sifatnya yang terlalu normative tanpa *action plan* nyata. Strategi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyiratkan ketidaksiapan Indonesia menghadapi ACFTA. pemerintah tidak bisa memberikan jaminan pada masyarakat Indonesia khususnya kalangan industri terlihat dari banyaknya demonstrasi yang terjadi sebelum diberlakukannya liberalisasi penuh.

Pasca implementasi ACFTA pada tahun 2010, kekhawatiran kalangan industri terbukti, banyaknya produk impor khususnya China memenuhi pasar lokal. Dalam perdagangan TPT cenderung defisit terhadap perdagangan TPT China. sebelum masa implementasi saja, perdagangan TPT Indonesia sudah defisit dilihat dari neraca perdagangan dari tahun 2006-2009 dan pada masa 2010-2011 pun tetap defisit walupun pertumbuhan TPT meningkat. TPT Indonesia belum mampu memaksimalkan penetrasi pasar China sebagaimana produk China mampu memenuhi pasar domestik dan diminati masyarakat Indonesia. Hal yang lebih ironis, produk TPT lokal malah harus kehilangan pesona karena harga yang lebih mahal dan cenderung kurang inovatif. Produk China memang terkenal dengan murah dan lebih mengikuti trend dunia walaupun dari segi kualitas jauh dari produk lokal. Menurunnya permintaan TPT lokal tentunya berdampak pada kelangsungan industri TPT nasional terkait dengan murahnya produk China, industri menengah dan kecil yang lebih mengalami dampak negatif dari

perdagangan bebas ini karena pasar produk yang mereka hasilkan dioorientasikan untuk pasar domestik.

Dengan menurunnya permintaan produk lokal tentunya berpengaruh terhadap kelangsungan industri begitu pula industri TPT yang berdampak pada tutupnya sejumlah pabrik dan mengakibatkan timbulnya pengangguran. Isu lainnya terkait dampak ACFTA terhadap TPT adalah beralihnya produsen menjadi importir atau pedagang karena lebih menguntungkan. Memang pengangguran menjadi berkurang namun kelangsungan industri nasional menjadi terancam dan kekhawatiran deindustrialisasi terjadi di Indonesia. Dampak negatif yang terjadi seharusnya dapat diminimalisir dengan strategi kebijakan yang dipersiapkan pemerintah Indonesia namun sayangnya kebijakan tersebut dalam implementasinya dalam setahun pemberlakuan kurang maksimal. Jika ditinjau lebih lanjut strategi kebijakan yang diterapkan Indonesia itu bersifat berkelanjutan bukan hanya karena adanya ACFTA sehingga alasan penerapan 5 tahun menjadi kewajiban pemerintah menanggapi dampak negatif dari pemberlakuan perdagangan bebas ini.

Pemerintah melihat manfaat dari ACFTA karena pasar China yang besar tanpa melihat kesiapan industri apakah mampu memenuhi standar produk yang diminati pasar China. Selain itu, ekspor migas dan pertambangan yang menjadi primadona ekspor Indonesia seharusnya tidak dieksploitasi berlebih sehingga mengancam keamanan energi atau dalam kaitannya dengan industri mengenai distribusi energi sebagai salah satu strategi kebijakan pemerintah yang menjamin distribusi suplai energi kepada industri.

Melihat industri TPT memiliki keunggulan komparatif upah buruh murah namun tingkat daya kerjanya masih lemah sehingga peningkatan kapasitas teknologi mutlak dibutuhkan demi mengejar efisiensi. Dengan demikian kebijakan yang mendukung daya saing sangat dibutuhkan industri TPT. Industri TPT merasakan biaya ekonomi tinggi yang terjadi di Indonesia karena lemahnya infrastruktur, distribusi energi dan listrik, maupun masalah bahan baku kapas yang masih di impor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat baik dan ekspor yang terus meningkat. Namun jika dilihat lebih dalam lagi, ekspor Indonesia masih didominasi bahan mentah seperti batu bara, gas alam, minyak sawit dan produk

lainnya yang cenderung tidak memiliki nilai tambah. Pemerintah Indonesia kurang tanggap dalam mengelola strategi mengenai isu perdagangan. Hal ini terlihat dari kebijakan kementerian Perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan nilai ekspor, penggenjotan bahan mentah menjadi pilihan melihat daya saing produk industri masih lemah. Tidak hanya untuk skala ekspor, produk lokal pun tidak mampu berkompetisi dengan produk impor di pasar domestik.

Rekomendasi kebijakan guna meningkatkan daya saing perdagangan TPT Indonesia lebih ditekankan pada pengurangan biaya ekonomi tinggi seperti infrastruktur, energi dan listrik, impor kapas maupun kemudahan birokrasi. Dalam mengamankan pasar produk lokal penerapan SNI yang matang serta peran bea dan cukai harus maksimal tidak tebang pilih.

1. Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah agresif melaksanakan pameran produk dalam negeri ke China maupun di tingkat nasional. Hal ini dilakukan agar hasil karya anak bangsa bisa dikenal masyarakat China tentunya dengan karya yang inovatif sehingga bisa memasuki atau memenuhi pasar China.
2. Peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing dengan meningkatkan fasilitas infrastruktur sebagai wadah distribusi arus barang baik. Pengembangan infrastruktur fisik, pengembangan infrastruktur pembayaran, serta penguatan sistem dan teknologi informasi.
3. Pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha harus melebarkan jaringan untuk memperkaya informasi mengenai kebutuhan masyarakat China.
4. Kesiapan sumber daya manusia juga merupakan hal penting sehingga pendidikan menjadi penting khususnya ITPT. Dengan SDM yang baik tentu pengembangan dan penelitian guna meningkatkan kualitas TPT maupun mencari alternative terhadap kebutuhan kapas yang selama ini selalu impor.
5. Dalam hal melindungi produk dalam negeri, penerapan SNI harus tetap sasaran dimana standar yang dibuat tidak hanya sebatas standar sehingga akan merugikan konsumen pula. Produk impor yang masuk ke Indonesia harus sesuai dengan SNI sehingga tidak sembarang produk bisa masuk ke Indonesia. Dengan demikian, ketegasan kebijakan dan aparaturnegara mutlak diperkuat.

## DAFTAR REFERENSI

### I. Buku

- Hart, Jeffrey A. and Aseem Prakash. *Strategic Trade and Investment Policies: Implication for the Study of International Political Economy*. USA:Blackswell Publishers Ltd. 1997.
- Inayati, Ratna shofi. "Tata Politik dan Ekonomi Regional ASEAN-China." dalam *Ekonomi Politik Kemitraan ASEAN: Sebuah Potret kerja Sama*. ed. Rahadian T. Akbar. Jakarta:Pusat Penelitian Politik lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia. 2011.
- Madura, Jeff. *International Financial Management 6<sup>th</sup> Edition*. South Western College: Inernational Thomson Publishing Inc. 2000.
- Muas, Tuty Enoch. "Hubungan Indonesia-China:Secara Historis, Dinamis!." dalam *Merangkul China* ed. I Wibowo & Syamsul Hadi. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Pambudi, Daniel dan Chandra, Alexander C. *Garuda Terbelit Naga: Dampak Kesepakatan Perdagangan Bebas Bilateral ASEAN-China terhadap Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Institute for Global Justice. 2006.
- Siddique, M.A.B. *Regionalism, trade and economic development: theories and evidence from the Asia-Pacific region*. UK: Edward Elgar Publishing Limited. 2007.
- Stiglitz, Joseph E. *Making Globalization Work*. New York:Penguin. 2006.
- Syamsul Hadi. "Hubungan Indonesia-China di Era Pasca-Orde baru: Perspektif Indonesia." dalam *Merangkul China* ed. I Wibowo & Syamsul Hadi. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- Tambunan, Tulus. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004.
- Wen, Chen. "ASEAN-China Trade Relations:Origins, Progress and Prospect." dalam *ASEAN-China Economic Relations*. ed. Saw Swee-Hock. Singapore: Institute of Southeast asian Studies. 2007.
- Yu, Wang Jiang. "Legal and Policy Considerations of China-ASEAN FTA: The Impact on the Multilateral Trading System." dalam *China and Southeast Asia: Gobal Changes and Regional Challenges*. H.K Leong and S.C.Y Ku,eds. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies and Center for Southeast Asian Studies, Sun Yatsen University. 2005.

### II. Jurnal

- Adam, Latif. "ACFTA dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia-China." *Inspirasi*, Vol. 2, No. 2, 2010.
- Adam, Latif dan Negara, Siwage Dharma. "ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT: Tantangan dan Peluang Bagi Indonesia." *Masyarakat Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, vol.xxxvi, No.2, 2010.
- Andrianto, Jati, Aditya Perdana Putra dan Fadjar Andrianto. "ACFTA:Memetakan Sektor Berpeluang dan Terancam." *Jurnal Sosial Demokrasi*, Vol. 8, No. 3, 2010.
- Brander, James A. and Barbara J. Spencer. "Export Subsidies and International Market Share Rivalry." *Journal of International Economics*, No. 18, 1985.
- Cai, Kevin G."The ASEAN-China Free Trade Agreement and East Asian Regional Grouping." *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 25, No. 3, December 2003.
- Chongbo, William. "Indonesia Textile and Garment Industry: Challenges and Prospect." *Indonesian Quarterly*, Vol.33, No.3, 2005.
- De Carlo, David, "Industrial Policy as Strategic Trade Policy in a Global Economy," *Undergraduate Economic Review*, Vol. 3, Iss.1, Article 9, 2009.
- Huda, Nurul dan zulihar. "Perdagangan Bilateral Indonesia-China Periode 2000-2009." *Dikta Ekonomi*, Vol. 6, No. 3. Desembers 09.
- Hongfang, Shen and Chen Linglan. "China-Southeast Asian Economic Relations in the 21st Century: Evolving Features and Future Challenges." dalam *International Journal of China studies*, Vol. 1, No. 1, January 2010.
- Launa dan Azman Fajar." ACFTA dan Ancaman Kedaulatan." *Jurnal Sosial Demokrasi*, Vol. 8, No.3, Februari - Juni 2010.
- Launa. "ACFTA: Menengok Jalan China." *Jurnal Sosial Demokrasi*, Vol.8, No.3, Februari - Juni 2010.
- Mutakin, Firman dan Aziza Rahmaniari Salam. "Dampak Penerapan ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) Bagi Perdagangan Indonesia." *Economic Review*, No. 218, Desember 2009.
- Razeen, Sally. "Free trade agreements and Prospects for Regional Integration in east Asia." *Asian Economic Policy Review*, Vol.1, No.2, 2006.
- Wanardi, Jusuf. "Tantangan Indonesia Menghadapi Perdagangan Bebas ASEAN-China." *Analisis CSIS*, Vol.39, No.1, Maret 2010.
- Wu, Chongbo. "Forging Closer Sino-Indonesia Economic Relations and Policy Suggestions." *Ritsumeikan International Affairs*, Vol.10. 2011.

### **III. Penelitian/tesis/makalah/seminar/laporan**



- Bernardino, Natividad Y. "The ASEAN-China Free Trade Area: Issues and Prospects." Asia Pacific Network on Food Security, Regional Workshop Paper, Manila, 3-9 November 2004.
- Booth, Anne. "China's Economic Relations with Indonesia: Threats and Opportunities." dalam SOAS, University of London. Oktober 2011.
- BSN. *SNI Penguat Daya Saing Bangsa*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional. 2010.
- Husin, Imron. "The Emergence of China: Some Economic Challenges to Indonesia." AT10 Research Conference Tokyo, 3-4 February 2004.
- Laporan Bulanan Ditjen KPI Kementerian Keuangan Republik Indonesia Maret 2010.
- Lijun, Sheng. "China-ASEAN Free Trade Area: Origins, Developments and Strategic Motivations." dalam *ISEAS Working Paper: International Politics & Security Issues*, No. 1, 2003.
- Lim, Ivan dan Philipp Kauppert. "Facing a Political Lock-In Situation with the ACFTA Which options for Indonesia?" Freidrich-Ebert-Stiftung Indonesia, March 2010.
- Manarungsan, Sompop. "Thailand-China Cooperation on Trade, Investment and ODA." Thailand ODA Report 2008.
- Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia, Bank Indonesia. Maret 2010.
- Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia tenggara dan RRC. Jakarta: Departemen Luar Negeri. 2003.
- Pimentel-Prenio, Ann, Majah-Leah V. Ravago and Erlinda Medalla. "THE AFTA-CEPT and the ASEAN-China Early Harvest Program: An Assessment of Potential Short-run Impact." MPRA Paper No. 28330, posted 22. January 2011.
- Purba, Mandala Sukarto. "Towards Regionalism Through The ASEAN - China Free Trade Area: Prospects and Challenges." Presented In (Partial) Fulfilment of The Requirements for Degree of Master in Law The Faculty of Law of The University of The Western Cape. May 2006.
- Purba, Martina Angelika. "The Rise of China Economic Power: China Growing Importance to Indonesian Economy." dalam International Institute of Social Studies. Jakarta. 2012.
- Pongjityingyong, Nattinan. "Study of the Effect of China Thailand FTA on Thailand's Fruits and Vegetables Sector. Graduate School of International Affairs Ming Chuan University. 2007.
- Rencana Strategis Kementerian Perdagangan RI periode 2010–2014.

Smith, Anthony L. "From Latent Threat to Possible Partner: Indonesia's China Debate." *Asia-Pacific Center for Security Studies*. December 2003.

Soesastro, Hadi. "China-Indonesia Relations and the Implications for the United States." *USINDO Report*. 7 November 2003.

The World Bank. "Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia: Melihat ke masa depan September 2010." 2010.

Thébault-Weiser, Erin. "A Review of Select Policies of The Indonesian Ministry of Industry." The United States Agency for International Development. Maret 2008

Wanandi, Sofyan. "Tantangan Ekonomi Indonesia" *Veritas Dei, Reformed Center for Religion and Society*. Vol. II, Tahun I, Juni 2010.

Yang, Jiang. "China's Foreign Economic Policy Making and Cooperation with Asean: a Case Study of The Asean-China Free Trade Agreement." Thesis Submitted For the Degree of Master of Social Sciences Department of Political Science National University Of Singapore. 2004.

Yue, Chia Siow. "ASEAN-China Free Trade Area." dalam Paper for presentation at the AEP Conference Hong Kong, 12-13 April 2004.

#### **IV. Media massa**

"Daya Saing Lokal Melemah." *Koran Jakarta*. 25 April 2011.

Drajat, Ben Perkasa. "Skenario Diplomasi Presiden Gus Dur [Scenario for President Gus Dur's Diplomacy]." *Panji Masyarakat*. no. 31, November 17, 1999.

Hadi, Syamsul. "Perdagangan Bebas Akan Memberikan Keuntungan Maksimal Bagi Negara Yang Memiliki Daya Saing Lebih Baik." *Tabloid Diplomasi*. No. 45, Tahun IV, 15 juli-14 agustus 2011.

"Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Di Revitalisasi." Siaran Pers Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian 21 Juli 2010.

Nugraha, Andri Gilang. "Tantangan dan Peluang Serta Langkah-Langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh Asean-China *Free Trade Agreement* (ACFTA)." *Buletin KPI*. No.2, 2010.

Pamuji, Heru. "Simalakama Capping Listrik." *Gatra*. Nomor 11, 20 Januari 2011.

Widayanto, Sulistyoyo. "Negosiasi untuk Mengamankan Kepentingan Nasional di Bidang Perdagangan." *Buletin KPI*. Edisi 43, 2007.

#### **V. Sumber internet**

- Adam, Latif. "ACFTA Dalam Perspektif Hubungan Dagang Indonesia China."  
<http://inspirasiabloid.wordpress.com/2010/03/19/acfta-dalam-perspektif-hubungan-dagang-Indonesia-China/>
- Adam, Latif. "Surplus yang Tergerus."  
[http://www.ekonomi.lipi.go.id/informasi/berita/berita\\_detil2.asp?Vnomer=467](http://www.ekonomi.lipi.go.id/informasi/berita/berita_detil2.asp?Vnomer=467).
- Alethea, Anna Ailsa. "Pengaruh "Kebijakan" Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) Terhadap Inflasi di Indonesia."  
<http://dean2722.blogspot.com/2010/12/pengaruh-kebijakan-kenaikan-tarif-dasar.html>,
- Alifandi, Anton. "Perdagangan Bebas ASEAN Cina."  
[http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan\\_khusus/2010/06/100625\\_acftahalaman.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2010/06/100625_acftahalaman.shtml)
- Andrian. "Dampak Implementasi CAFTA: 9 Sektor Industri Perlu Perhatian."  
<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=276466>
- Antontirta. "Perdagangan Bebas dan Ekspor Indonesia."  
<http://antontirta.blogdetik.com/2010/03/25/perdagangan-bebas-dan-ekspor-indonesia/>
- Arafat, Yaseer. "Tekstil Cina Gempur Pasar, Tekstil Indonesia terpuruk." Diakses  
<http://harianjoglosemar.com/berita/tekstil-China-gempur-pasar-tekstil-indonesia-terpuruk-42218.html>.
- "ASEAN-China Free Trade Area Affects Indonesian Industries."  
<http://newsdawn.blogspot.com/2011/04/asean-china-free-trade-area-affects.html>
- Astono, Banu. "Liberalisasi Pasar TPT, Jalan Sutra bagi China."  
<http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0312/18/ekonomi/753036.htm>,
- Basri, Faisal. "FTA ASEAN-China dan Deindustrialisasi."  
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2009/12/21/06350379/FTA.ASEANChina.dan.Deindustrialisasi>,
- Burmansyah, Edy. "ACFTA Dan Perlindungan Industri Nasional."  
[http://www.theglobalreview.com/content\\_detail.php?lang=id&id=1569&type=4](http://www.theglobalreview.com/content_detail.php?lang=id&id=1569&type=4),
- Caturini, Rizki. "Produk China menjadi raja, industri lokal tak berdaya."  
<http://lipsus.kontan.co.id/v2/acfta/produk-China-menjadi-raja-industri-lokal-tak-berdaya>,

- Caturini, Rizki. “Benahi industri lokal agar tak makin terjungkal.”  
<http://lipsus.kontan.co.id/v2/acfta/benahi-industri-lokal-agar-tak-makin-terjungkal>,
- Chandra, Alexander C. “Dilema Indonesia dalam ACFTA.” diakses dari: <http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/18/02352497/dilema.Indonesia.dalam.acfta>
- “China Pledges \$400m to Indonesia.”  
 BBC News, <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1891007.stm>, March 24, 2002.
- “China, Indonesia Agree to Intensify Economic Cooperation.”  
<http://english.sina.com/China/1/2006/1006/91073.html>.
- “China and Indonesia seal strategic pact.”  
[http://www.nytimes.com/2005/04/25/world/asia/25ihtIndonesia.html?\\_r=1](http://www.nytimes.com/2005/04/25/world/asia/25ihtIndonesia.html?_r=1)
- “Dinamika Pengaruh China dalam Kerja Sama Multilateral di Kawasan Asia Timur.” <http://morentalisa.wordpress.com/2012/01/18/dinamika-pengaruh-China-dalam-kerja-sama-multilateral-di-kawasan-asia-timur/>
- Direktorat Kerjasama Regional, Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional.  
[www.depdag.com](http://www.depdag.com)
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (PPK-LK Dikdas). “Membendung Gelontoran Produk Cina.”  
<http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2010/01/31/Topik/index.html>,
- “Deperin Tempuh Tiga Kebijakan Hadapi ACFTA.”  
<http://beritadaerah.com/berita/sulawesi/18704>,
- Djumena, Erlangga. “Produk China di Setiap Lini.”  
<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/04/11/08161654/Produk.China.di.Setiap.Lini>
- Eduardus. “Working Paper : Amerika Serikat dan Krisis Finansial Asia 97-98.”  
<http://coretcoretkuliah.wordpress.com/2011/01/12/working-paper-amerika-serikat-dan-krisis-finansial-asia-97-98/>
- “Ekspor Tekstil Bisa Capai Kondisi Terburuk.” <http://www.disperindag-jabar.go.id/?pilih=lihat&id=1111>,
- “Evaluasi China-ASEAN Free trade area.”  
<http://swingingme.wordpress.com/2011/02/17/evaluasi-China-asean-free-trade-Area/>

Haryanti, Setyani Sri. "Indonesia Harus Tingkatkan Daya Saing dalam Cafta."  
[www.e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank/.../24](http://www.e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/probank/.../24) -2011

Idris, Fahmi. "Kebijakan dan Strategi Pengembangan Industri Nasional."  
[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=215&Itemid=76](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=215&Itemid=76).

"Industri Tekstil Indonesia Masih Bersaing dengan China."  
<http://www.businessnews.co.id/featured/industri-tekstil-indonesia-masih-bersaing-dengan-China.php>

Ishihara, Takako. "Industrial Policy and Competition Policy."  
[www.jftc.go.jp/eacpf/05/jicatext/aug27.pdf](http://www.jftc.go.jp/eacpf/05/jicatext/aug27.pdf),

"Jangan Salahkan Produk Cina." <http://id.berita.yahoo.com/diplomat-eropa-soal-acfta-jangan-salahkan-produk-cina-100933794.html>,

Karina, Sandra. "Penyelundupan Tekstil China Capai USD 500 Juta."  
<http://economy.okezone.com/read/2011/10/25/320/520226/penyelundupan-tekstil-China-capai-usd500-juta>

"Kebijakan Salah Kaprah, Gas Indonesia Ternyata 'Diobral' ke Luar Negeri."  
<http://www.seruu.com/energi--pertambangan/minyak--gas-bumi/artikel/kebijakan-salah-kaprah-gas-indonesia-ternyata-diobral-ke-luar-negeri>,

"Kemenperin Tanggung SNI 10 Produk Tekstil."  
<http://www.kemenperin.go.id/artikel/3219/Kemenperin-Tanggung-SNI-10-Produk-Tekstil>,

Kuncoro, Mudrajad. "Impian di Balik FTA Asean-Tiongkok."  
<http://lepmida.com/column.php?id=252>,

Lazuardi, Hery, dan Maria Y. Benyamin. "ACFTA hits 5 industrial sectors."  
<http://www.lkdi.org/cms/id/2011/09/19/acfta-hits-5-industrial-sectors/>

"Limbungnya Industri Nasional."  
[http://www.bsn.go.id/news\\_detail.php?news\\_id=2913](http://www.bsn.go.id/news_detail.php?news_id=2913),

Mei, Lin. "The Economic Relations Between China and Indonesia and Mainland China's Investment in Indonesia."  
[www6.cityu.edu.hk/searc/CSEA.../CSEA.../LinMei\(Eng\\_rev\).pdf](http://www6.cityu.edu.hk/searc/CSEA.../CSEA.../LinMei(Eng_rev).pdf),

"Menggugat Perjanjian ASEAN-China."  
[http://www.globaljust.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=385&Itemid=1](http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=385&Itemid=1),

"Modus Kloning Penyelundupan Tekstil Ilegal."  
<http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2006/12/19/24464/%E2%80%9CmodusKloning%E2%80%9D-Penyelundupan-Tekstil-Ilegal>,

- Muttaqin, Hidayatullah. “Bunuh Diri Ekonomi Indonesia.” <http://www.jurnalekonomi.org/bunuh-diri-ekonomi-indonesia/>,
- Pamenan, Tri D. “Ada Kesalahan dalam Kebijakan Industri Nasional.” <http://www.kpbn.co.id/news-4130-0-ada-kesalahan-dalam-kebijakan-industri-nasional.html>,
- Pardosi, Ishak H. “Susahnya Menghapus Pesona Barang Murah Negeri Tirai Bambu.” <http://monitorindonesia.com/ekonomi/59-headline/883-susahnya-menghapus-pesona-barang-murah-negeri-tirai-bambu.html>,  
 “Pedoman Pemberian Penghargaan P3DN.” [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id)
- “Pengusaha Sepakat Bayar Listrik Tanpa Capping.” <http://www.kemenperin.go.id/artikel/1242/Pengusaha-Sepakat-Bayar-Listrik-Tanpa-Capping>,
- “Penyelundupan Tekstil Kian Marak.” <http://korantrans.wordpress.com/2009/11/page/4/>,
- “Pertanian Indonesia Terancam ACFTA: Hancur Diterpa Impor, Buntung karena Ekspor.” <http://www.spi.or.id/?p=1799/>
- Purna, Ibnu, Hamidi dan Prima. “ACFTA sebagai Tantangan Menuju Perekonomian yang Kompetitif.” [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=4375&Itemid=29](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4375&Itemid=29)
- Retnoningsih, Indah. “Perkembangan Kerjasama Bilateral Ekonomi Indonesia Dan China Dari Tahun (1967 -2006) dalam lingkup pengaruh ACFTA di Kawasan ASEAN.” <http://diplomacy945.blogspot.com/2010/06/perkembangan-kerjasama-bilateral.html>,
- “Revitalisasi Permesinan Industri.” <http://www.kemenperin.go.id/artikel/20/Revitalisasi-Permesinan-Industri>,
- Ritzki Pitakasari, Ajeng. “Pengusaha: Biaya Sertifikasi SNI Turunkan Daya Saing.” <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/12/04/02/m1ue1h-pengusaha-biaya-sertifikasi-sni-turunkan-daya-saing>,
- Shofiana S, Ana. “Kebijakan Ekspor Gas Rugikan Industri DN.” <http://www.centroone.com/news/2012/05/1s/kebijakan-ekspor-gas-rugikan-industri-dn/>,

Sukma, Rizal. "Indonesia's Response to the Rise of China: Growing Comfort amid Uncertainties."

[www.nids.go.jp/english/publication/joint\\_research/series4/.../4-5.pdf](http://www.nids.go.jp/english/publication/joint_research/series4/.../4-5.pdf),

Sunarman, FR. "ACFTA Jadi boomerang: Sinergi Kebijakan Ekspor-Import perlu dikembangkan." [www.perpustakaan.bappenas.go.id/.../file?...ACFTA](http://www.perpustakaan.bappenas.go.id/.../file?...ACFTA),

"TPT sepakat bayar listrik penuh - PLN tawarkan opsi pelunasan dengan skema cicilan." diakses dari: <http://www.ekon.go.id/clipping/2011/02/14/12-13-14-februari-2011>.

WMK, Anwari. "Titik Nadir Deindustrialisasi."

[http://www.lp3es.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=135&Itemid=2](http://www.lp3es.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=135&Itemid=2)

[www.ditjenkpi.depdag.go.id](http://www.ditjenkpi.depdag.go.id).

Yuliasuti, Nusarina. "Pasar China Belum Digarap Serius." <http://jogja.antaranews.com/berita/299434/pasar-China-belum-digarap-serius>,

Yunanto, Aris. "Januari 2010, China "Serbu" Indonesia." <http://forum.detik.com/januari-2010-China-serbu-indonesia-t130700.html>

